

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI (KRPL) DI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HAIRUL ANWAR

NIM. 500024915

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2015

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FOOD PROGRAM AREA HOUSE (KRPL) KALIMANTAN PROVINCE IN NORTH TARAKAN

Hairul Anwar

Email : anwarhairul72@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesian Open University

Realizing the importance of diversification, the government has taken various efforts and policies. One of the efforts is the implementation of the Sustainable Food House Area Program (KPRP). The purpose of this study are: (1) Analyzing the Program Implementation Region Sustainable Food House (KRPL) in Tarakan, North Kalimantan Province; and (2) Determine the Factors Supporting and Inhibiting Program Implementation Region Sustainable Food House (KRPL) in Tarakan, North Kalimantan province.

Based on the approach used, the study included in this type of qualitative research. The location of this research was conducted in the town of Tarakan. Object observed in this study were Implementation Program Region Sustainable Food House (KRPL). Data collected through interviews and observations. The data were analyzed through a qualitative descriptive domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, and analysis of cultural themes. Based on the results of the study indicate that the Program Implementation Region Sustainable Food House (KRPL) in Tarakan effective, but implementation on the ground is still found obstacles. Forms activities Program Implementation Region Sustainable Food House (KRPL) is the planning, organization, implementation, and monitoring and evaluation.

Tarakan city government's aim to implement Sustainable Food House Area Program (KRPL) is to motivate and empower women farmers take advantage of their yards to grow vegetables, fruits and livestock for food and nutrition fulfillment families to support food security. The factors supporting the implementation of the implementation of the Programme Region Sustainable Food House (KRPL) in Tarakan, among other aspects of the transmission, the clarity of the information, and consistency in communication factors, aspects of staff, information, authority, and facilities in resource factors executor, aspects of the appointment of bureaucrats the disposition factors, and aspects of the fragmentation of the factor structure of the bureaucracy. The inhibiting factor is the incentive aspect of the disposition factors and aspects of the Standard Operating Procedure (SOP) on the factor structure of the bureaucracy.

Keywords: implementation of policies, program of KPRP, policies implementation obstacles

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Hairul Anwar

Email : anwarhairul72@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Menyadari pentingnya diversifikasi pangan, pemerintah telah mengambil berbagai upaya dan kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara; dan (2) Mengetahui Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

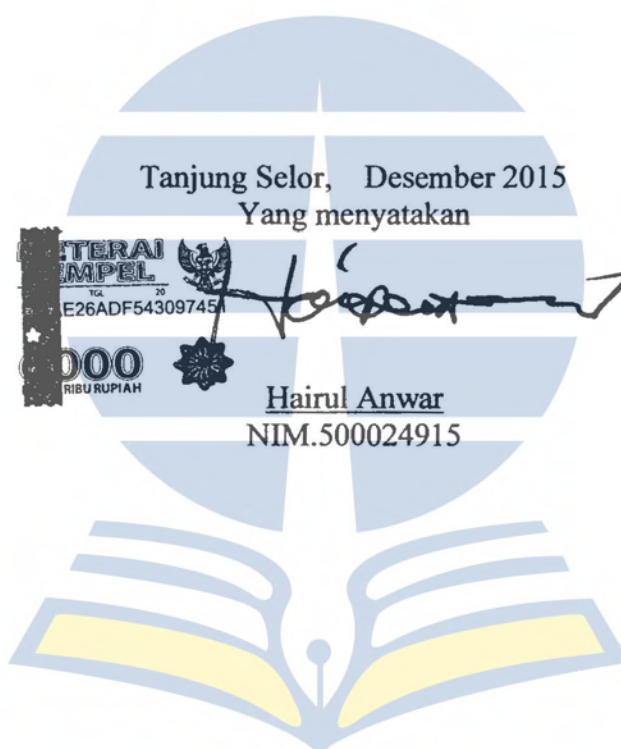
Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tarakan. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan berjalan efektif, namun pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala. Bentuk kegiatan Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi.

Tujuan pemerintah Kota Tarakan melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah memotivasi dan memberdayakan kelompok wanita tani memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan ternak untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga guna mendukung ketahanan pangan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan antara lain aspek transmisi, kejelasan proses informasi, dan konsistensi dalam faktor komunikasi, aspek staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dalam faktor sumber daya pelaksana, aspek pengangkatan birokrat pada faktor disposisi, dan aspek fragmentasi pada faktor struktur birokrasi. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah aspek insentif dalam faktor disposisi dan aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) pada faktor struktur birokrasi.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, program KPRL, kendala implementasi, kebijakan

LEMBAR PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara


Penyusun TAPM : Hairul Anwar
NIM : 500024915
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : 04 Desember 2015

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

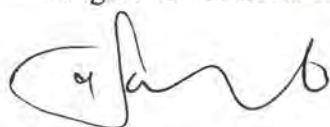

Dr. H. Muhammad Yunus Abbas, M.Si
NIP. 19651010 199003 1 026


Dr. Sofjan Arifin, M.Si
NIP.19660619 1999203 1 002

Mengetahui,


Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003




Suciati, M.Si, Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hairul Anwar
NIM : 500024915
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pasca Sarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 04 Desember 2015
Waktu : 19.00-21.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji :
Drs. Yusrizal Rachman, M.K.K.K.

Penguji Ahli :
Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D

Pembimbing I :
Dr.H.Muhammad Yunus Abbas, M.Si

Pembimbing II :
Dr. Sofjan Aripin, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, dengan ijin dan kehendak-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang merupakan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Adapun judul penelitian dalam TAPM ini adalah “Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”. Sedangkan tujuan penelitian adalah Menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara serta Menganalisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam penyusunan TAPM ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam proses penyelesaian TAPM. Penulis memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Muhammad Yunus Abbas, M.Si dan Dr. Sofjan Arifin, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan TAPM ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyelesaian penyusunan TAPM ini;
2. Ibu Suciati, M.Si, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta;
3. Bapak Drs. Yusrizal Rahman, M.KKK, selaku Kepala UPPBJ-UT Samarinda;
4. Bapak Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik;
5. Bapak Prof. Muchlis Hamdi, MPA.,Ph.D, selaku Penguji Ahli;
6. Bapak Ir.Elang Buana, M.Si, Selaku Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan yang telah memberikan ijin lokasi Penelitian ;
7. Ibu Diana Risawaty, SP.,selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan dorongan dan pemikiran dalam penyelesaian TAPM;

8. Prof. Dr.Sri Suwitri, M.Si, Dr.Hardi Warsono, Dr. Suharno, Dr. Samudra Wibawa, Dr. Entang, Dr. Ridwan, selaku pengajar yang telah banyak memberikan masukan terkait dengan penyusunan TAPM ini;
9. Kedua Orang Tua, Isteri (Nurasita, SE) dan anak tercinta (Fridya Maulitha) yang senantiasa memberikan dukungan dan doa pada setiap kesempatan;
10. Rekan-rakan Mahasiswa Universitas Terbuka yang namanya tidak saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, spirit dan kerjasamanya dalam mendukung proses penyelesaian TAPM ini.

Tanjung Selor, Desember 2015

Penulis

Hairul Anwar



RIWAYAT HIDUP

Nama : Hairul Anwar
 NIM : 500024915
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal : Bone, 18 Desember 1972

Riwayat Pendidikan :

- Lulus SD di Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (1985);
- Lulus SMP di Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (1988);
- Lulus SMA di Balikpapan (1991);
- Lulus Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman Kota Samarinda (1996).

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1997 s/d 1998 sebagai Staf Biologi WWF-IP Indonesia Program Kayan Mentarang;
- Tahun 1998 s/d 2002 sebagai Kepala Bagian Pembinaan Hutan PT. Kayu Lapis Indonesia;
- Tahun 2003 s/d 2005 sebagai Fasilitator Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Bulungan;
- Tahun 2006 s/d 2013 sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK (Teknologi) Negeri 3 Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Tahun 2013 s/d 2014 sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
- Pada Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, Desember 2015

Hairul Anwar
 NIM. 500024915

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	15
1. Konsep dan Sifat Kebijakan Publik	15
2. Implementasi Kebijakan Publik	20
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	53
B. Penelitian Terdahulu	61
C. Kerangka Berpikir	64
D. Operasionalisasi Konsep	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	69
B. Fokus Penelitian	70
C. Lokasi Penelitian	75
D. Instrumen Penelitian	76
E. Prosedur Pengumpulan Data	77
F. Metode Analisis data	79

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	87
1. Gambaran Umum Kota Tarakan	87
a. Kondisi Geografis Kota Tarakan	87
b. Sejarah Kota Tarakan	88
c. Misi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan	89
d. Program Strategis Kota Tarakan	90
e. Data Kependudukan Kota Tarakan	93
2. Deskripsi Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian	95
Di Kota Tarakan	
3. Deskripsi Usaha Pertanian Subsektor Tanaman	98
Tanaman Pangan di Kota Tarakan	
4. Deskripsi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari	102
(KRPL) di Kota Tarakan	
5. Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Tarakan	106
B. Hasil Penelitian	107
1. Proses Implementasi Program Kawasan Rumah	107
Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan	
2. Faktor– Faktor yang Mendukung dan Menghambat	125
Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari	
(KRPL) di Kota Tarakan	

C. Pembahasan	133
1. Proses Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan	133
2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat.....	153
Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari	

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	164
B. Saran.....	166

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Langkah dalam Proses Pengorganisasian	42
2.2	Kerangka Pikir Penelitian	66
3.1	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	80



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	93
4.2	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan	93
4.3	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tarakan	94
4.4	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan, Luas Lahan yang di Kuasai di Kota Tarakan	95
4.5	Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Tahunan dan Semusim Menurut Kelompok Tanaman dan Kecamatan	96
4.6	Nama-Nama Kelompok Wanita Tani (KRPL) di Kota Tarakan	105
4.7	Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Tarakan	106
4.8	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi KRPL	126

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Persetujuan Tempat Penelitian
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Transkrip Wawancara
- Lampiran 4. Contoh SK Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan P2KP Tahun 2013
- Lampiran 5. Contoh SK Penetapan Pendamping Kabupaten Kegiatan P2KP
- Lampiran 6. Contoh SK Penetapan Pendamping Kelurahan Kegiatan P2KP
- Lampiran 7. Contoh Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Kelompok Kegiatan P2KP
- Lampiran 8. Contoh Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Sosial
“ Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL ”
- Lampiran 9. Contoh Kuitansi Penyerahan Bantuan Sosial
“ Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL ”
- Lampiran 10. Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan
“ Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL ”
- Lampiran 11. Contoh Rekapitulasi Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) Kelompok Penerima Bantuan Sosial
- Lampiran 12. Data Perkembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Tarakan Tahun 2014
- Lampiran 13. Foto-foto Aktifitas Wawancara dan observasi Lapangan dalam kegiatan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat. Pembangunan sektor pertanian sebagai sektor pangan utama di Indonesia penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini karena lebih dari 55% penduduk Indonesia bekerja dan melakukan kegiatannya di sektor pertanian dan tinggal di pedesaan (Suprihono, 2003: 1).

Salah satu subsektor pertanian yang wajib memperoleh perhatian adalah subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan wajib memperoleh perhatian karena pangan adalah faktor penting yang sangat menunjang keberlangsungan hidup umat manusia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama yang sangat mendasar. Atas dasar kebutuhan tersebut, maka para pemimpin negara dan pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Sedunia telah mengikrarkan komitmen bersama untuk mencapai ketahanan pangan sebagai upaya melawan kelaparan. Atas dasar tersebut, pangan kemudian ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang penyelenggaraannya wajib dijamin oleh Negara.

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan (FAO, 2006: 1). Konsep ketahanan pangan (*food security*) lebih luas dibandingkan dengan konsep swasembada pangan, yang hanya berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Prabowo, 2010: 66).

Urusan pangan diatur melalui UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai pengganti UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan Perundang-undangan ini dibangun berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan. Sebagai asumsinya, apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut

diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, yang diutamakan berasal dari kemampuan sektor pertanian domestik dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Apabila dilihat dari potensi pertanian, maka dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam kedaulatan dan kemandirian pangan. Besarnya potensi di sektor pangan di Indonesia bahkan dapat diandalkan menjadi penyangga utama kekuatan ekonomi Indonesia. Dengan sumber daya yang berlimpah, Indonesia tentunya memiliki kemampuan untuk menjamin kecukupan pangan bagi seluruh penduduknya. Ironisnya, di tengah-tengah sumber daya yang melimpah tersebut masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan kebutuhan pangan yang mencukupi. Terkait dengan permasalahan pangan, data menunjukkan bahwa sekitar tiga puluh persen rumah tangga mengatakan bahwa konsumsi mereka masih berada dibawah kebutuhan konsumsi yang semestinya. Lebih dari seperempat anak usia dibawah 5 tahun memiliki berat badan dibawah standar, dimana 8 % berada dalam kondisi sangat buruk. Bahkan sebelum krisis, sekitar 42% anak

dibawah umur 5 tahun mengalami gejala terhambatnya pertumbuhan (kerdil), suatu indikator jangka panjang yang cukup baik untuk mengukur kekurangan gizi (*Worldbank*, 2015: 1).

Kemampuan Indonesia memproduksi sekitar 31 juta ton beras setiap tahunnya dan mengkonsumsi sedikit di atas tingkat produksi tersebut; dimana impor umumnya kurang dari 7% konsumsi. Lebih jauh jaringan distribusi swasta yang berjalan secara efisien turut memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang cukup secara nasional tidak mampu menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat lokal, rumah tangga, dan individu. Permasalahan pangan yang dihadapi baik secara global, nasional, maupun lokal dapat dipilah menjadi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain ketersediaannya juga perlu diperhatikan, pola konsumsi pangan rumah tangga atau keseimbangan kontribusi diantara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi standar gizi yang dianjurkan.

Konsep diversifikasi pangan untuk hidup sehat sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-2 Sebelum Masehi di zaman Cina kuno. Pada zaman tersebut, makanan yang dianjurkan adalah yang terdiri dari lima jenis biji-bijian, lima jenis pangan hewani, lima jenis buah dan lima jenis sayur, dan makanan atau minuman lain yang enak aroma dan rasanya (*Zhi-chien*, 1993: 91). Perkembangan Ilmu Gizi sekitar seabad lalu tentang identifikasi dan manfaat berbagai komponen karbohidrat, komponen lemak dan komponen protein melahirkan konsep ilmiah tentang diversifikasi pangan yang sesuai

zamannya. Pada masa tersebut diversifikasi pangan dimaknai sebagai keragaman jenis pangan sumber karbohidat, jenis pangan sumber lemak dan jenis pangan sumber protein. Kemudian sejalan dengan penemuan berbagai vitamin, konsep ilmiah diversifikasi pangan berkembang menjadi diversifikasi pangan yang terdiri dari jenis-jenis pangan dari lima kelompok pangan utama, yaitu pangan sumber energi, pangan sumber protein, buah dan sayur (Hardinsyah, 1996).

Hanafie (2012: 250) mengungkapkan ada beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya diversifikasi pangan, yaitu:

1. Dalam lingkup kepentingan nasional, pengurangan konsumsi beras akan memberikan dampak positif terhadap kelestarian swasembada atau ketahanan dan keamanan pangan.
2. Diversifikasi konsumsi akan mengubah alokasi sumber daya ke arah yang lebih efisien, fleksibel, dan stabil.
3. Keanekaragaman pangan juga penting apabila ditinjau dari segi nutrisi.
4. Pengetahuan tentang keanekaragaman pangan juga akan berguna dalam perumusan strategi pengembangan sistem pangan yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan, terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap konsumsi oleh manusia.

Menurut Riyadi (2003), diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan (alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. Pertimbangan rumah tangga untuk memilih bahan makanan pokok keluarga di dasarkan pada aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek konsumsi pangan. Diversifikasi pangan ditujukan tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan tetapi dimaksudkan pula untuk mencapai

keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kebijakan atau program secara langsung dan tidak langsung yang terkait dengan diversifikasi pangan terus digulirkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan dan dilakukan oleh banyak instansi. Sebagai contoh gerakan sadar pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, program diversifikasi pangan dan gizi oleh Departemen Pertanian (1993-1998) dan lain-lain. Dari sisi kelembagaan, tahun 1989 pada kabinet Pembangunan VI dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pangan yang meluncurkan slogan "Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI). Pada tahun 1996 telah lahir UU Nomor 7 tentang Pangan. Kemudian pada tahun 2002 muncul Keppres No. 68 tentang Ketahanan Pangan. Tahun 2001 pada era Kabinet Gotong Royong telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dipimpin langsung oleh Presiden (Suyono, 2002). Dalam usaha perwujudan ketahanan pangan pada umumnya dan diversifikasi konsumsi pangan pada khususnya juga dituangkan dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini mempunyai salah satu tujuan yaitu menjamin peningkatan produksi dan konsumsi yang lebih beragam (Ariani, 2003).

Upaya-upaya membudayakan keanekaragaman pangan sangat perlu dibangun untuk menangani persoalan kekurangan pangan yang terjadi saat ini maupun yang lebih mengkhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Menyadari akan pentingnya keanekaragaman pangan, pemerintah telah

mengambil berbagai upaya dan kebijakan. Salah satu upaya terkait diversifikasi pangan adalah pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program KRPL merupakan salah satu dari gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). P2KP merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Panduan Teknis P2KP, 2015).

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung diversifikasi konsumsi pangan (Salim, 2011).

Diversifikasi pangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Permasalahan penyempitan lahan pertanian yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Kota Tarakan tentunya perlu diatasi. Program KRPL merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di Kota Tarakan yang mampu mengatasi penyempitan jumlah lahan pertanian. Program KRPL merupakan salah satu dari gerakan P2KP yang dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan utama, yaitu: (a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; (b) Pengembangan Pangan Lokal; serta (c) Promosi dan Sosialisasi P2KP. Kegiatan P2KP telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan berbagai sasaran dan capaian yang terus berkembang.

Program KRPL mulai dilaksanakan di Kota Tarakan sejak tahun 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 058/BKPP-KKP/IV/2013, tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan P2KP tahun 2013”Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan dilanjutkan tahun 2014. Pada tahun 2015, KRPL dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 520//Dppkp-IV/V/2015 Tentang Nama Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Pengisian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015. Masalah

pangan merupakan salah satu dari 3 (tiga) masalah besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Sebagaimana dilansir pada situs berita korankaltim.com bahwa terdapat tiga masalah besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Tarakan, yaitu masalah air, masalah pangan, dan masalah energi (www.korankaltim.com). Upaya yang dilaksanakan pemerintah Kota Tarakan untuk mengatasi masalah pangan antara lain adalah menetapkan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Lahan pertanian merupakan salah satu modal dalam usaha di bidang pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2003. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian hasil Sensus Pertanian 2013 adalah sebesar 40,01 ribu m², naik sebesar 622,45 persen jika dibandingkan hasil ST2003 yang tercatat sebesar 5,54 ribu m² (BPS Kota Tarakan, 2013). Peningkatan ini tentunya juga dapat dipengaruhi oleh adanya program percepatan diversifikasi konsumsi pangan seperti halnya program KRPL. Fakta ini menunjukkan bahwa ada dampak positif dari implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Namun demikian, dibalik dampak positif dari Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, program tersebut masih mengalami beberapa kendala. Sampai dengan saat ini, belum ada

evaluasi terkait dengan program KRPL. Apabila dilihat berdasarkan data laporan ketahanan pangan tahun 2014 dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga Pengelola Usaha Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Peternakan Kendala tersebut justru mengalami penurunan. Pada hasil ST13 menunjukkan gejala tidak linier. Justru jumlah rumah tangga usaha pertanian mengalami penurunan dari sebanyak 24.757 menjadi sebanyak 24.387. Pada tahun 2013, jumlah penduduk adalah sebanyak 220.200 yang berasal dari 55.960 kepala keluarga (KK).

Fenomena lain berdasarkan data ketersediaan bahan pangan lokal dan capaian konsumsi penduduk Kota Tarakan Tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi terbesar masyarakat Kota Tarakan pada kelompok padi-padian (beras) 113 kg/kapita/tahun. Sementara konsumsi pada kelompok palawija sebesar 29,98 perkapita/tahun yang terdiri dari : jagung 5,44 kg/kapita/tahun, ubi kayu 23,82 kg/kapita/tahun dan ubi jalar 0,71 kg/kapita/tahun. Dari Kementerian Pertanian untuk kelompok palawija standar anjuran 32 kg/kapita/tahun, sementara capaian sebesar 29,98 kg/kapita/tahun, ada selisih 2,02 kg/kapita/tahun. Pada kelompok sayur-sayuran jumlah konsumsi 57,2 kg/kapita/tahun, sementara standar anjuran dari Kementerian Pertanian 58,0. Jadi ada selisih sebesar 0,8 kg/kapita/tahun. Melihat kenyataan tersebut diatas bahwa konsumsi beras oleh masyarakat Kota Tarakan cukup besar bila dibandingkan dengan konsumsi palawija dan sayur-sayuran. Tentu hal ini sangat menarik untuk di teliti, sejauh mana implementasi kebijakan

pemerintah tentang diversifikasi pangan melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terlaksana di Kota Tarakan.

Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai proses implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang perlu dianalisis terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen yang dikemukakan Fayol (dalam Shafritz, *et al.*, 2012: 223). Untuk melaksanakan suatu program dengan baik, maka tentunya dibutuhkan manajemen yang baik pula berdasarkan pada prinsip manajemen sebagaimana yang dikemukakan Fayol tersebut.

Dalam implementasi suatu kebijakan tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diimplementasikan. Begitu pula halnya pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi atau sikap. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pada dasarnya, komunikasi dari pengambil kebijakan terhadap dinas

pelaksana dan juga kelompok sasaran dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) harus berjalan dengan baik. Begitu pula halnya dengan struktur birokrasi, sumber daya yang mencukupi, dan disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward III (1980) yang dikenal dengan teori *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami implementasi kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan diversifikasi pangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tarakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelenggaraan dan Implementasi Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bagi masyarakat Kota Tarakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauhmana tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat Implementasi Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

- c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Sifat Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan menurut Poerwadarminta (1994: 115) bahwa kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. Kebijakan dapat juga berarti:

- a. Hal bijaksana; kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya);
- b. Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya);
- c. Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulitan dan sebagainya)

Istilah kebijakan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif. Sedangkan *policy* berasal dari bahasa Latin “*politeia*” yang berarti kewarganegaraan. Karena *policy* dikaitkan dengan pemerintahan, maka lebih tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan kebijakan (Suryaningrat, 1999: 11). Berbeda dengan Winarno (2008: 14), bahwa istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Carl Friedrich dalam Winarno (2008: 16) memberikan pengertiannya

terhadap kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran dan suatu maksud tertentu.

Kebijakan publik dapat dinilai sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu (Nugroho, 2004: 25). Robert Eyestone (dalam Winarno, 2008: 15) menyatakan bahwa kebijakan administrasi publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Melalui konsep tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan administrasi publik menyangkut kepentingan banyak pihak. Sedikit berbeda dengan konsep tersebut, Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2008: 15) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Dengan demikian, kebijakan publik berhubungan dengan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Namun konsep ini menjadi agak sulit untuk dipahami karena tidak menjelaskan mengenai apa yang diputuskan oleh pemerintah, dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Pakar lainnya, Richard Rose (dalam Winarno, 2008: 15-16) menjelaskan bahwa kebijakan seharusnya dipahami sebagai serangkaian

kegiatan yang banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003: 132). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan batasan-batasan dan konsep yang lebih jelas untuk memahami kebijakan administrasi publik.

Kebijakan publik memiliki banyak batasan dan konsep yang menggunakan penekanan yang berbeda-beda. Namun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kebijakan. Hal tersebut adalah pendefinisian kebijakan administrasi publik harus tetap memiliki pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dibandingkan mengenai apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008: 7) mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

James Anderson (dalam Agustino, 2008: 7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut Agustino (2008: 8), ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik sebagaimana uraian berikut:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam

program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Dari pengertian kebijakan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Selain itu, kebijakan juga ditujukan untuk kepentingan orang banyak.

Dampak implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara terhadap penganekaragaman konsumsi Menurut Winarno (2008: 19-20), sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.
- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memnerikan

- perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.
 - d. Hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk ke manifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
 - e. Dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Definisi sifat kebijakan publik di atas adalah jelas bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan dan diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Pada tahap implementasi akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Pembuatan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Winarno (2008: 31) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni:

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dipandang sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky (1980) disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan suatu organisasi untuk mengubah metode penilaian kinerja pegawai. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980: 8-12) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan, sebagaimana pernyataannya: "...*Policy context, together with policy content are the two broad categories of variables determining policy success*".

Isi kebijakan tersebut mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan

dihasilkan, (3) derajat perubahan yang akan diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sedang konteks kebijakan mencakup: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan (Grindle, 1980: 8-12).

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Studi implementasi merupakan bidang kajian yang telah berkembang sejak lama. Dalam perkembangan tersebut, terdapat beberapa sudut pandang penting dalam melihat studi implementasi. Perbedaan sudut pandang ini berakibat pada variatifnya dimensi persoalan yang coba diungkapkan. Ada yang memberi penekanan pada faktor kebijakan, yang lain memberi perhatian terhadap faktor pelaksanaan atau implementornya, sementara yang lainnya lagi mencoba memahami pengaruh lingkungan terhadap proses implementasi.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa "*to implement*" (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan

sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008: 67).

Definisi yang lain diberikan oleh Goggin, *et al.* (1990: 34). Dengan menggunakan pendekatan komunikasi, para penulis ini melihat implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan. Implementasi dalam pandangan mereka, sering disejajarkan dengan ketaatan (*compliance*) negara suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Implisit dalam pernyataan tersebut adalah tidak adanya modifikasi atau perubahan terhadap suatu keputusan kebijakan yang justru dapat bertentangan dengan maksud para pembuat kebijakan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan bagian yang sangat penting dari kebijakan publik. Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. tanpa adanya implementasi, kebijakan publik tentu saja tidak akan dapat dirasakan hasilnya.

Meskipun kebijakan publik banyak diulas dan menjadi kajian oleh berbagai pihak, namun implementasi kebijakan masih sedikit memperoleh perhatian dari para ilmuwan politik. Van Meter dan Van Horn (1975)

mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan mengapa studi mengenai implementasi kebijakan publik masih jarang disinggung oleh ilmuwan politik. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya asumsi yang naif yang tersirat dalam banyak studi kebijakan.
- b. PBB mengkonsentrasikan perhatian para pembuat keputusan pada pilihan-pilihan antara metode-metode yang berbeda dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dipilih.
- c. Masalah implementasi sangat kompleks sehingga seringkali menimbulkan kesulitan dalam usaha mengkaji secara rinci.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa proses implementasi tidak berarti diabaikan oleh para pembuat kebijakan dan analisis-analisis kebijakan. Selain itu, hambatan-hambatan dalam studi implementasi kebijakan publik juga dapat diatasi. Para ilmuwan sendiri banyak yang berpendapat bahwa studi implementasi kebijakan perlu dikembangkan. Hal ini kemudian didorong oleh fenomena yang menunjukkan banyaknya hasil-hasil yang mengecewakan dari program-program sosial yang telah ditetapkan.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Abdullah (1997: 11), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008: 65) dapat dilihat sebagaimana kutipan berikut :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. Sementara Winarno (2008: 101), yang mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Berarti, tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan

dalam upaya persiapan implementasi dan proses “yang sebenarnya” dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa dalam perspektif teoritik, proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. macam-macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasi juga akan mengalami perbedaan. Menurut Van Meter dan van Horn (1975), kebijakan publik dapat digolongkan menurut karakteristik yang berbeda, yaitu jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung.

a. Implementasi Dipengaruhi oleh Sejah Mana Kebijakan Menyimpang dari Kebijakan-Kebijakan Sebelumnya

Perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional). Perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial di masa depan. Hal ini akan sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar.

Akibatnya, peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antar pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

b. Proses Implementasi Dipengaruhi oleh Jumlah Perubahan Organisasi yang Diperlukan

Ada yang menyatakan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan re-organisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur administratif yang ada. Kebijakan yang menetapkan perubahan-perubahan dalam hubungannya dengan pemeran serta yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih sulit dilaksanakan daripada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan hanya perubahan hasil dalam hubungan-hubungan yang mantap.

Van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2008: 146) juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik, sebagaimana berikut :

- a. Kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian kepada tipe kebijakan yang dipertimbangkan.
- b. Faktor-faktor penentu yang mendorong realisasi atau non-realisis tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain.

Implementasi kebijakan publik akan sangat berhasil apabila perubahan maginal diperlukan dan konsensus tujuan tinggi. Sebaliknya, bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah, maka

prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Di samping itu, kebijakan dengan perubahan yang besar atau konsensus yang tinggi diharapkan akan diimplementasikan dengan lebih efektif daripada kebijakan yang mempunyai perubahan kecil dan konsensus rendah. Dengan demikian, konsensus tujuan akan diharapkan berdampak pada proses implementasi kebijakan daripada unsur perubahan.

Dalam literatur ilmu kebijakan publik, terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Diantaranya adalah model implementasi kebijakan dari pemikiran Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Winarno, 2008: 146) dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permormansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara *linier* dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008: 146) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada

dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopsi) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: Sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu, sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

c. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta

sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

e. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

f. Kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan bukanlah akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Model implementasi lainnya dirumuskan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 156) yang dikenal dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III (dalam Agustino, 2008: 156) terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi, diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi) (Winarno, 2008: 127).

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai (Winarno, 2008: 127).

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif (Widodo, 2001: 73). Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

1) Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak

memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan (Winarno, 2008: 132).

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum (Winarno, 2008: 134).

3) Wewenang

Dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya (Winarno, 2008: 135).

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil (Winarno, 2008: 137).

c. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan (Widodo, 2001: 203). Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino, 2008: 156), jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III (dalam Agustino, 2008: 156) antara lain:

1) Pengangkatan birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan (Winarno, 2008: 144).

2) Insentif

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008: 156) menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi (Winarno, 2008: 146).

d. Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidak-efisienan struktur birokrasi yang ada (Widodo, 2001: 195). Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2008: 151), terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

1) *Standard Operating Procedures* (SOPs)

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Winarno, 2008: 151).

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit (Winarno, 2008: 153).

Studi implementasi adalah suatu studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda (Parsons, 2005: 463). Menurut Van Meter Dan Van Horn (dalam Winarno, 2008: 146) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan terlebih dahulu.

Kemudian Charles O. Jones (dalam Harahap, 2004: 15) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan. Wibawa (dalam Tangkilisan, 2003: 20) berpendapat implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Dalam menentukan implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu terhadap sesuatu objek yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses implementasi kebijakan suatu program adalah keterangan tentang sesuatu, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, atau menerangkan tentang bagaimana dan mengapa seseorang berperilaku tertentu, seumpamanya dalam konteks tertentu (Mulyono, 2008: 21). Teori tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dengan cara yang tepat dan hemat dalam upaya mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan efisien. Cara efektif dan efisien inilah yang menjadi pedoman utama dari implementasi kebijakan.

Efektif adalah memperoleh hasil yang tepat dan sesuai dengan harapan atau tujuan yang diinginkan, sedangkan efisien adalah memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Menurut Mulyono (2008: 22) Alternatif pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan suatu program adalah sebagai berikut :

- a. Efektif dan efisien
- b. Efektif tetapi tidak efisien
- c. Tidak efektif dan tidak efisien
- d. Tidak efektif, tetapi efisien

Suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien merupakan hasil dari keberhasilan tata implementasi kebijakan. Tata kerja implementasi kebijakan terdiri dari latar belakang, tujuan, teori, serta justifikasi keputusan dan tindakan. Implementasi kebijakan program dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu. Fungsi Implementasi kebijakan program adalah elemen-elemen dasar yang

akan selalu ada dan melekat di dalam proses implementasi kebijakan program yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan program terdiri atas lima faktor, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun, pada saat sekarang ini, fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Masing-masing pengertian dari fungsi implementasi kebijakan program tersebut adalah:

a. **Perencanaan**

Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan, termasuk dalam memulai atau menjalankan sebuah bisnis. Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Handoko, 2011: 77). Perencanaan yang perlu dibuat terdiri dari rencana organisasi, rencana pemasaran dan rencana keuangan. Perencanaan dibuat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti, singkat dan padat, tetapi mampu dipahami oleh orang lain.

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik

untuk memenuhi tujuan itu. Pimpinan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Perencanaan telah diterapkan pada semua jenis kegiatan dan sesungguhnya terdapat berbagai jenis perencanaan. Beberapa rencana meliputi kegiatan yang sangat luas, sedangkan ada juga yang meliputi kegiatan terbatas saja. Ada beberapa pendapat bahwa rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut (Terry, 2011: 60-61) sebagai berikut :

1) Rencana pengembangan

Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah tujuan dari instansi. Cara rasional untuk mengetahui pengembangan yang diinginkan itu ialah berdasarkan sepakat para personil yang berwenang dalam menentukan pengembangan dan perencanaan yang mendukung pencapaian pengembangan tersebut. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang posisi instansi, arah tujuannya dan sasaran yang harus dicapai; masalah-masalah yang sedang atau akan dihadapi dalam rangka pencapaian tujuannya, waktu untuk melaksanakan pengembangan rencana dan kegiatan-kegiatan khusus perlu dilakukan untuk mencapainya.

2) Rencana tujuan

Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada tujuan per kegiatan atau program. Dengan diarahkan oleh pembuat rencana tujuan maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimal. Jenjang waktu untuk rencana-rencana laba pada umumnya adalah satu hingga tiga tahun.

3) Rencana pemakai

Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara menyampaikan suatu program tertentu atau memasuki

kelompok sasaran dengan cara yang lebih baik. Rencana-rencana seperti itu sering disebut sebagai rencana pemakaian dan sudah populer dalam ilmu manajemen.

4) Rencana anggota-anggota manajemen

Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan anggota-anggota manajemen yang ada yang menjadi semakin hari semakin penting. Tidaklah bijaksana untuk membiarkan anggota-anggota manajemen menghadapi tantangan-tantangan tanpa adanya suatu perancangan kebijaksanaan. Tindakan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan keinginan instansi perlu diatur untuk menumbuhkan kepemimpinan dan untuk mengembangkan anggota-anggota manajemen.

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Salam, 2004:14). Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (1995: 95) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan diatas, perencanaan adalah usaha untuk melakukan tindakan/pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan pada masa akan datang. Menurut Salam (2004: 15) Jenis-jenis rencana sebagai berikut :

- 1) Kebijakan, yaitu pernyataan atau pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan;
- 2) Anggaran, yaitu suatu ikhtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang;
- 3) Prosedur, yaitu suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan.

Bertolak ukur dari pendapat diatas, bahwa fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan (1995: 111) Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan, yaitu :

- 1) Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional;
- 2) Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis;
- 3) Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki;
- 4) Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat;
- 5) Perencanaan dapat memperkecil resiko;
- 6) Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian;
- 7) Perencanaan merangsang prestasi kerja;
- 8) Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.

Keuntungan dalam perencanaan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Menurut Hasibuan (1995: 112) Ada beberapa syarat perencanaan yang baik, yaitu :

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan;
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, dan fakta;
3. Menetapkan beberapa alternatif;
4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana.

Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik, maka akan

dihasilkan suatu rencana yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perencanaan terhadap implementasi kebijakan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan suatu sistem kerja yang menguraikan tata aturan yang sistematis atas operasional suatu program baik secara parsial maupun secara keseluruhan. SOP berfungsi sebagai bentuk panduan untuk dijadikan kerangka acuan kerja bagi personil yang bertugas menangani fungsi pokok masing-masing. Oleh karena itu, SOP harus ditulis secara detail mudah dimengerti dan dijalankan oleh siapapun yang bertugas.

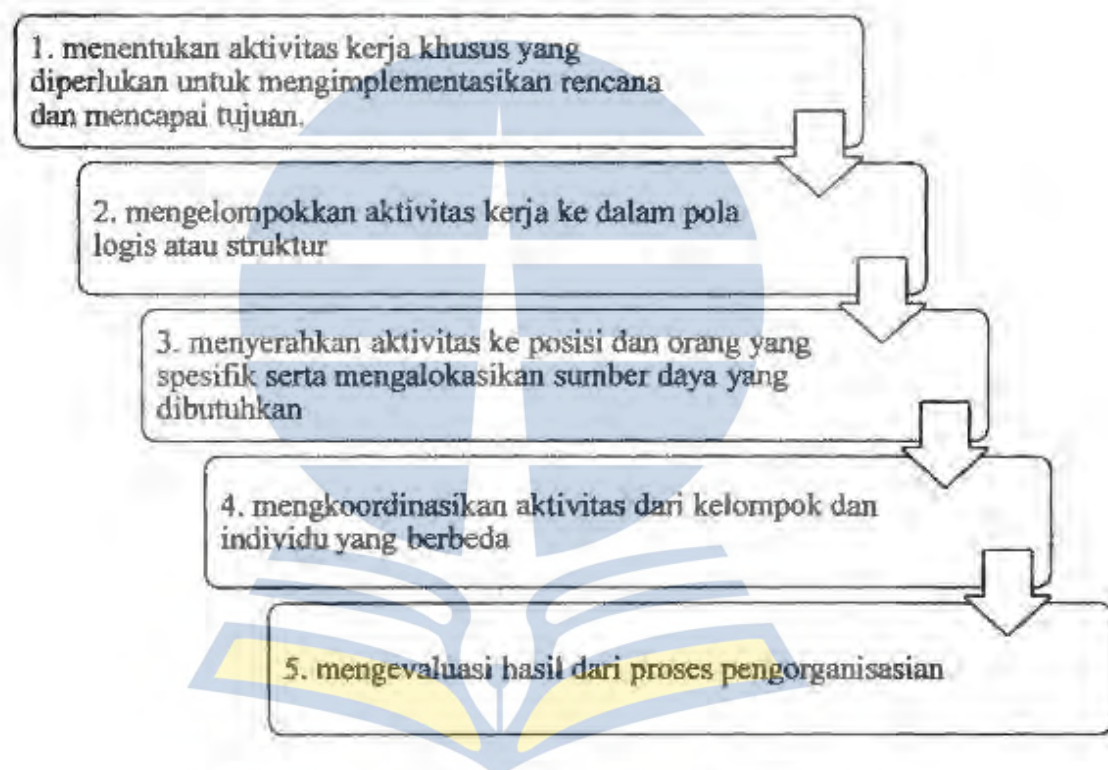
b. Pengorganisasian

Fungsi kedua adalah pengorganisasian atau *organizing*. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang

dibutuhkan termasuk unsur-unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses (Terry, 2011: 73). Tujuan pengorganisasian adalah untuk membimbing sumberdaya manusia yang ada bekerjasama secara efektif.

Boone & Kurtz (2014: 80) menggambarkan langkah-langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1. Langkah dalam Proses Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara anggota organisasi agar tujuan dapat dicapai dengan efisien. Fungsi pengorganisasian dalam organisasi akan membawa kebaikan (Alma, 2012: 118) sebagai berikut :

- 1) Pimpinan dengan mudah mengetahui tugas tiap bawahan;
- 2) Perselisihan antara pegawai seperti saling tunjuk kesalahan atau saling lempar tanggung jawab dapat dihindari;
- 3) Penghematan dalam biaya-biaya organisasi;
- 4) Pembagian kerja dapat diadakan dengan tepat dan jelas.

Fungsi pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan menunjukkan garis-garis perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian yaitu apabila organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Menurut Hasibuan (1995: 121) Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar, yaitu :

- 1) Bagian-bagian/departemen/devisi;
- 2) Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas.

Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu syarat tercapainya kerja sama (*Team work*) antara pegawai. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-

alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut (Hasibuan, 1995: 123). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah kelompok orang yang bekerja sama, dengan adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang.

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan (Salam, 2004: 19). Fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien. Menurut Salam (2004:19) Ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian, yaitu :

- 1) Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Pengelompokan kegiatan harus mengelompokkan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan

- kegiatan;
- 3) Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada bawahan.

Faktor penting dalam pengorganisasian adalah adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai suksesnya pelaksanaan strategi. Definisi menurut Griffin (2004: 173) bahwa struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi serta cara-cara mengaitkan pekerjaan satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi mengidentifikasi tanggung jawab untuk setiap posisi. Secara rinci struktur organisasi itu menggambarkan:

- 1) Aktivitas kerja masing-masing unit dalam organisasi;
- 2) Hubungan diantara masing-masing unit aktivitas;
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok;
- 4) Menentukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit;
- 5) Memperjelas koordinasi antara masing-masing unit.

Struktur organisasi organisasi dapat digambarkan dengan bagan organisasi yaitu suatu diagram yang memperlihatkan interaksi tanggung jawab dari para pegawai.

c. **Pelaksanaan**

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, tibalah saatnya untuk melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian itu dengan menggerakkan seluruh sumberdaya yang telah direncanakan dan diorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan bukannya hanya tergantung kepada perencanaan dan

pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan. Penggerakan atau pelaksanaan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian (Hasibuan, 1995: 176).

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Salam, 2004: 20).

Berdasarkan pendapat diatas, maka fungsi penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Menurut Salam (2004:21), bahwa ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, yaitu :

- 1) Motivasi adalah suatu keahlian seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya agar tercapainya organisasi;
- 2) Kepemimpinan adalah merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan;
- 3) Sikap dan moral seorang pimpinan dalam membina kerja sama, harus mampu memahami perilaku bawahannya;
- 4) Komunikasi adalah informasi, pesan yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan ditafsirkan sama oleh orang lain.

Sesudah rencana dibuat, struktur organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan (*directing*) ini, secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin (manager/pemilik) organisasi.

Pengarahan atau pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*) dan kualitas.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya

perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar; tepat waktu; biaya yang efektif; tepat-akurat; dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Akurat, yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat;
- 2) Tepat waktu, yaitu informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilaksanakan segera;
- 3) Obyektif dan menyeluruh, yaitu informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap;
- 4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik;
- 5) Realistik secara ekonomis dan organisasional;
- 6) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi;
- 7) Fleksibel;
- 8) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional;
- 9) Diterima para anggota organisasi.

Anggaran merupakan peralatan pengawasan yang digunakan sangat meluas baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan.

Penyiapan anggaran adalah suatu bagian integral dari proses perencanaan, dan anggaran itu sendiri adalah hasil proses perencanaan, atau pernyataan rencana. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang. Pengawasan anggaran adalah suatu sistem penggunaan bentuk-bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan.

Proses pengawasan sedikitnya terdiri dari 5 tahap tahapannya diuraikan sebagaimana berikut.

1) Tahap 1 : Penetapan standar

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan sasaran dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target tujuan, anggaran, keselamatan kerja, dan sasaran.

2) Tahap 2 : Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai cara-cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: (1) berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan? (2) dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan, laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon?, dan

(3) siapa (*who*) yang akan terlibat? Pengukuran ini sebaiknya mudah dan tidak mahal serta dapat diterangkan kepada pegawai.

3) Tahap 3 : Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: (1) pengamatan (observasi), (2) laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan, (3) metoda-metoda otomatis, (4) pengujian (tes), atau dengan pengambilan sampel.

4) Tahap 4 : Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5) Tahap 5 : pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Menurut Salam (2004:21) Beberapa proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama;
- 2) Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.

Dengan adanya pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Menurut Hasibuan (1995: 222) Pengawasan berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

- 1) Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan;
- 2) Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana;
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik;
- 4) Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengawasan sangat menentukan baik/buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan

sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (Hasibuan, 1995: 223). Berdasarkan pendapat tersebut, pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan supaya tujuan yang di hasilkan sesuai yang direncanakan.

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan (Salam, 2004: 21). Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. jika terdapat tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif/perbaikan sesuai dengan langkah, prosedur, dan ukurannya yang telah ditetapkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan di masa yang akan datang.

Implementasi kebijakan program yang telah diuraikan di atas

sangat erat kaitannya dengan prinsip manajemen. Selain fungsi, dalam ilmu manajemen juga dikenal prinsip manajemen. Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah.

Dalam zaman modern ini semua jenis kegiatan harus memiliki suatu manajemen, dalam arti sebagai suatu aturan yang jelas. Pada masa sekarang ini juga dapat dikatakan bahwa bidang manajemen sudah merupakan suatu profesi bagi ahlinya. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan apapun pekerjaan harus dikerjakan secara efisien dan efektif, sehingga diperoleh masukan atau input yang besar. Dalam perkembangannya, manajemen digunakan dalam segala bentuk kegiatan, baik kegiatan profesi maupun non profesi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, maka manajemen dapat diklasifikasikan dalam dua cara yaitu tingkatan dalam organisasi dan lingkup kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini proses implementasi kebijakan akan dibahas sesuai dengan lingkup organisasi yang diteliti.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (2006: 34), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (2009: 121), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (2008: 70) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah mempunyai saudara kembar, yaitu partisipasi masyarakat (*citizen participation*). Partisipasi masyarakat dengan demikian identik dengan otonomi daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah sukar dibayangkan untuk sukses tanpa partisipasi dari warga masyarakat. Hal ini terkait dengan bergesernya peranan pemerintah dari “*gardening*” menuju “*game-keeper*”.

Semakin melembaganya partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola daerah secara mandiri. Meskipun demikian, konsep mandiri bukanlah suatu konsep yang sempit dan statis, sekedar menempatkan kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah secara mandiri atau keswadayaan mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan pembangunan. Konsep mandiri berarti perimbangan kekuatan antara masyarakat daerah dan negara dalam menentukan arah tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat daerah, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap masyarakat daerah melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipatoris sehingga mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal. Strategi lain adalah melakukan tekanan secara politik terhadap institusi-institusi lokal

seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya yang menyangkut fungsional kinerja mereka. Tekanan ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pada kinerja institusi-institusi formal tersebut agar mampu merespons, merencanakan serta melaksanakan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi daerah di satu pihak membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi daerah dapat memberikan kesempatan berpartisipasi dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya daerah menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintah daerah. Dalam lingkungan dimana budaya partisipasi masyarakat sangat rendah, otonomi daerah dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersifat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat.

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi (Hanna dan Robinson, dalam Hikmat, 2006: 159). Strategi utama tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak;
- 2) Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan;
- 3) Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui konsientisasi. Menurut Freire (dalam Sumartono, 2008: 91), konsientisasi adalah sebuah proses dialektis di mana kaum miskin dan tertindas makin lama makin sadar akan situasi ketertindasannya dan kemudian berkehendak untuk mengubah kondisinya. Proses konsientisasi adalah proses pemberdayaan kolektif untuk menentang pemegang kekuasaan melalui kesadaran berpolitik. Konsientisasi merupakan proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-hubungan politis, ekonomi, dan sosial. Masyarakat dibangkitkan pemahamannya akan kekuatan yang sebenarnya mereka miliki.

Masyarakat tidak hanya sebagai penerima program sementara mereka tidak mengetahui tujuan dari program tersebut. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pembuat keputusan sendiri. Dengan cara ini orang akan mampu mengambil tindakan sendiri untuk menentang unsur opresif dari realitasnya, termasuk didalamnya pemecahan

(pematahan) hubungan antara subjek dan objek untuk kemudian membentuk esensi partisipasi yang sungguh-sungguh.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Masyarakat yang tidak berdaya diberi ilmu pengetahuan, kesempatan bertindak, sehingga mereka merasa mampu dan merasa pantas untuk dilibatkan. Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kedua kecenderungan ini saling terkait kadangkala keduanya bertukar posisi dalam prosesnya (Pranarka dan Vidhyandika, dalam Hikmat, 2006: 161).

Menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 84) Pemberdayaan merupakan sebuah proses sehingga mencakup tahapan-tahapan tertentu, yaitu penyadaran, *capacity building*, dan pendayaan. Tahap penyadaran merupakan tahap dimana target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mencapai “sesuatu”. Misalnya pemberian pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*. Intinya target dibuat mengerti bahwa mereka perlu berdaya yang dimulai dari dalam diri mereka sendiri.

Tahap kedua yaitu “*capacity building*” atau pengkapasitasan, memampukan atau *enabling*. Target harus mempunyai kemampuan terlebih dahulu sebelum mereka diberikan daya atau kuasa. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia misalnya *training* (pelatihan), *workshop* (loka latih), dan seminar. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Namun pengkapasitasan organisasi ini jarang dilakukan karena ada anggapan apabila pengkapasitasan manusia sudah dilakukan maka pengkapasitasan organisasi akan berlaku dengan sendirinya.

Jenis yang ketiga adalah pengkapasitasan sistem nilai. Sistem nilai adalah “aturan main”. Dalam cakupan organisasi sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, atau sistem dan prosedur. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan “aturan main”. Pengkapasitasan ini jarang dilakukan juga karena sama dengan pengkapasitasan organisasi ada *stereotype* bahwa pengkapasitasan ini dapat terbentuk dengan sendirinya setelah pengkapasitasan manusia. Tahap yang terakhir adalah pemberian daya atau “*empowerment*” dalam makna sempit. Target diberikan daya,

kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kapasitas kecakapan yang telah dimiliki.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil-hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu tersebut kemudian dapat digunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini. Berikut uraian dari hasil penelitian terdahulu.

Mariyati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Implementasi pada KRPL Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini ingin mengetahui peran dan sinergitas stakeholders, faktor-faktor pendukung atau penghambat keberlanjutan implementasinya, serta manfaat implementasi program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan di Puhjarak. Jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis datanya, analisis yang dikemukakan Bogdan & Taylor meliputi tahap pralapangan, dilapangan dan pasca lapangan. Hasil penelitian menunjukkan peran dan sinergitas stakeholders dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak belum optimal. Faktor pendukungnya karena tanah yang subur, potensi pekarangan cukup luas, sarana dan prasarana serta kelembagaan yang tersedia dan KRPL merupakan program pemerintah. Faktor pengambatnya karena permasalahan teknis yang belum terselesaikan dan berkurangnya

motivasi pelaku rumah pangan lestari (KRPL). Implementasi program KRPL bermanfaat mendukung ketahanan pangan di desa tersebut minimal ditingkat rumah tangga.

Rohayat (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Mendorong Kemandirian Anggota Kelompok Tani Bunda Asri di Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong”. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan : (1 perencanaan Program KRPL, 2) pelaksanaan program KRPL, 3) tindak lanjut program KRPL dalam mendorong kemandirian anggota kelompok tani Bunda Asri. Konsep yang dijadikan tinjauan teori dalam penelitian ini adalah Konsep Manajemen Program, Konsep KRPL, Konsep Pemberdayaan, Konsep Kemandirian, dan Konsep Pendidikan Luar Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur dan triangulasi data. Semua teknik dan pendekatan dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengolah informasi tersebut menjadi sebuah temuan dalam pertanyaan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1). Perencanaan program KRPL diawali oleh identifikasi kebutuhan terlebih dahulu kepada anggota dalam bentuk musyawarah, sosialisasi, dan adanya pembuatan perencanaan pelaksanaan program. 2). Pelaksanaan KRPL di kelompok tani bunda asri menggambarkan pelaksanaan program. Kelompok tani Bunda Asri melaksanakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilihat dari proses tujuan, sasaran

program, waktu kegiatan, Fasilitas pendukung kegiatan, Penyuluhan hambatan dalam kegiatan program KRPL. 3). Dilihat dari tindak lanjut KRPL dimana pengembangan program berupa pemberian modal, pembinaan anggota kelompok, penguatan kelembagaan dan kemitraan. Pelaksanaan program KRPL di kelompok tani Bunda Asri dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut program merupakan upaya dalam mendorong kemandirian pangan untuk kesejahteraan anggota.

Rokhmatunnazula (2015) melakukan penelitian dengan judul “Respons Wanita Tani Terhadap Pelaksanaan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dalam Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Hargorejo Kecamatan Kokap dan Desa Srikayangan Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo dengan tujuan mengetahui 1) tingkat respons wanita tani terhadap pelaksanaan program M-KRPL, dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi respons wanita tani terhadap pelaksanaan program M-KRPL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survei. Pengambilan sampel kecamatan, desa dan kelompok wanita tani dilakukan secara purposive, sedangkan pengambilan sampel wanita tani dilakukan dengan acak sederhana. Total sampel berjumlah 60 wanita tani yaitu 20 wanita tani di Desa Pagerharjo (KWT Prasojo), 20 wanita tani di Desa Hargorejo (KWT Melati) dan 20 wanita tani di Desa Srikayangan (KWT Putri Manunggal). Metode analisis yang digunakan adalah uji proporsi dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

respons wanita tani terhadap pelaksanaan program M-RKPL dalam kategori tinggi dengan respons pengetahuan sebesar 81,33 %, respons sikap sebesar 78,67 % dan respons perilaku sebesar 85,26 %. Umur wanita tani berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan program M-KRPL dan partisipasi, persepsi, motivasi berpengaruh positif terhadap pelaksanaan program M-KRPL. Faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap pelaksanaan program M-KRPL adalah luas pekarangan, pekerjaan, peran pendamping, sarana pendampingan dan aktivitas pendampingan.

C. Kerangka Berpikir

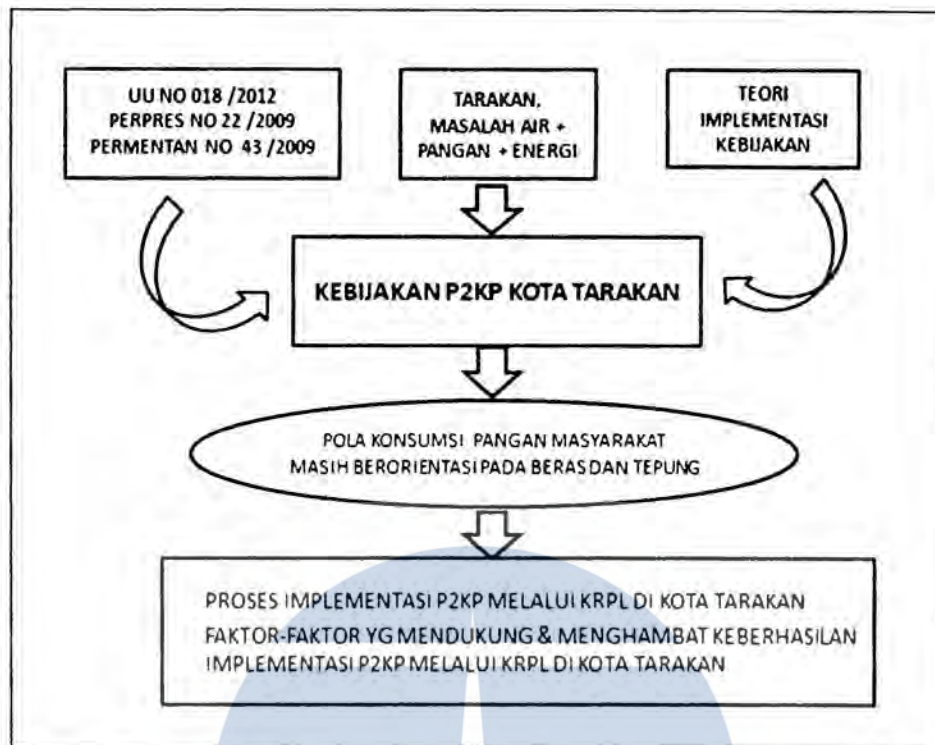
Pangan yang cukup dapat menjamin keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya, setiap orang membutuhkan pangan yang cukup, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas pangan mencakup antara lain aspek fisik pangan, keamanan, dan aspek gizi. Kualitas gizi menekankan terhadap keanekaragaman pangan. Setiap manusia tidak hanya membutuhkan pangan pokok saja, tetapi juga bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi maka semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup baik dalam jumlah maupun jenisnya. Keanekaragaman pangan dapat menjadi jalan keluar yang baik bagi berbagai permasalahan pangan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan di Kota Tarakan melaksanakan implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL). Masalah pangan tentunya dapat teratasi apabila kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Tindakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik.

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Analisis implementasi kebijakan yaitu seberapa jauh konsistensi antara *output* kebijakan dengan tujuannya. Dalam hal ini, analisis implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dapat menjadi ukuran yang menunjukkan sejauh mana implementasi kebijakan diversifikasi pangan tersebut sesuai dengan tujuan dari implementasi. Berdasarkan kerangka tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut ini akan disajikan kerangka pikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

D. Operasional Konsep

Penilaian terhadap implementasi kebijakan didasarkan pada teori yang dikemukakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 156), yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Adapun 4 variabel yang menjadi bagian dari analisis kebijakan publik berdasarkan teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Pelaksana Kebijakan

Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: Sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dicapai oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

2. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

3. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan bukanlah akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

4. Struktur Birokrasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran fenomena-fenomena yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengetahui tanggapan dan persepsi dari berbagai kalangan, seperti kelompok sasaran dalam program kawasan rumah pangan lestari (KRPL), yakni kelompok wanita tani, para pelaku pelaksana program (penyuluh pendamping) dan pemegang kebijakan (Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan kebijakan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang diteliti adalah kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Studi kasus lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *'how'* atau *'why'*, bila peneliti hanya memiliki sedikit

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer didalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian ini dilakukan secara spesifik, rinci dan mendalam mengenai suatu permasalahan dengan mencari informasi sebanyak mungkin agar dapat mengungkap suatu fenomena yang menjadi dasar bagi pemilihan pendekatan pemilihan penelitian.

Secara spesifik penelitian ini mengkaji secara mendalam berdasarkan pendekatan yang telah diungkap oleh Edward III (dalam Agustino, 2008:156) bahwa ada empat faktor penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian ini bisa dijadikan faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian ini mempunyai dua tujuan esensial. Tujuan pertama, yaitu penetapan fokus bertujuan membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus secara efektif tentunya mempermudah dalam menetapkan kriteria untuk menjangkau informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Menurut Moleong (2000), bahwa fokus penelitian sangat penting peranannya dalam penelitian, yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Dengan arahan fokus penelitian, peneliti dapat mengetahui secara persis data mana yang perlu dikumpulkan.

Di bawah ini diuraikan fokus penelitian yang akan dikaji sebagai berikut :

1) Proses Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dimensi dari proses implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Pimpinan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

b. Pengorganisasian

Fungsi kedua adalah pengorganisasian atau *organizing*. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang

harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

c. Pelaksanaan

Pengarahan atau pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*).

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi yang mengimplementasikan kebijakan untuk memastikan bahwa jalannya program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang pimpinan dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional implementasi program, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dimensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi dalam implementasi kebijakan program KRPL di Kota Tarakan berdasarkan aspek transmisi, kejelasan proses informasi dan konsistensi
- b. Sumber daya pelaksana dalam implementasi kebijakan program KRPL di Kota Tarakan berdasarkan aspek kondisi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas
- c. Disposisi (sikap) dalam implementasi kebijakan program KRPL di Kota Tarakan berdasarkan aspek pengangkatan birokrat dan insentif
- d. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program KRPL di Kota Tarakan berdasarkan aspek *Standard Operating Procedures (SOPs)* dan pelaksanaan fragmentasi.

Data merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Data dapat diperoleh dari sumber data penelitian.

Berdasarkan sumber datanya, data dapat digolongkan menjadi 2 jenis sebagaimana berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa media perantara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari penelitian diperoleh melalui berbagai sumber data, sebagai berikut ini :

1. Proses atau Aktivitas

Proses atau aktivitas dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan proses dan aktivitas dapat menyajikan tampilan dari keseluruhan keadaan yang diteliti, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Adapun yang dimaksud dengan proses atau aktivitas dalam penelitian ini adalah proses dan aktivitas implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam mendukung diversifikasi pangan di Kota Tarakan.

2. Informan atau Narasumber

Sumber data dalam pelaksanaan wawancara disebut dengan informan. Informan merupakan salah satu sumber data primer dalam penelitian ini. Melalui informan diperoleh data berupa jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan peneliti selama proses wawancara berlangsung. Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari:

- a. Aparat pelaksana kebijakan yang bekerja pada Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan, antara lain : Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Seksi Tanaman Pangan yang menangani P2KP;

- b. Penyuluh Pendamping program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan;
- c. Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ada 6 Kelompok, terdiri dari : Kelompok Dahlia, Kecubung, Kampung VI, Karang anyar, Hidayatullah dan mamburungan.
- d. Kelompok masyarakat yang peduli KRPL.

3. Dokumen

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen adalah data-data yang diperoleh melalui media perantara melalui proses penggandaan. Dokumen yang diteliti merupakan dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan mengenai KRPL di Kota Tarakan.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Lokus yang diambil pada Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan, kelompok wanita tani penerima bantuan Pogram Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebanyak 6 (enam) kelompok, penyuluh pendamping P2KP. Penentuan lokasi ini diambil atas dasar bahwa Kota Tarakan telah mendapat bantuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dari dana APBN (tahun 2013,2014) dan APBD Provinsi (tahun 2015).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini disesuaikan dengan informan dan teknik pengumpulan data yang dipilih. Adapun instrumen dalam penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut. Pengumpulan data pada penelitian ini dibantu dengan instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga diperlukan pedoman wawancara sebagai instrumen dalam pelaksanaan wawancara. Pedoman wawancara merupakan suatu daftar pertanyaan terbuka mengenai implementasi kebijakan KRPL di Kota Tarakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan secara lisan kepada narasumber atau informan penelitian. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti dapat menggali informasi lebih banyak lagi dengan pengembangan dari pedoman wawancara.

2. Pedoman Observasi

Check list merupakan pedoman observasi yang berisikan daftar dari kegiatan dalam implementasi kebijakan KRPL di Kota Tarakan. Penggunaan instrumen ini dilakukan peneliti dengan memberikan tanda pada kolom pada saat peristiwa tersebut muncul. Selain itu, peneliti juga

melakukan pencatatan mengenai pola perilaku subjek pada kolom keterangan dalam pedoman observasi tersebut.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Ada bermacam-macam cara yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data, informasi serta menguji data dan informasi tersebut. Cara-cara tersebut adalah mengadakan wawancara, mengadakan angket, mengadakan observasi, penelitian lapangan atau mengadakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana implementasi kebijakan KRPL. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sumber lain yang diyakini mampu memberikan jawaban yang mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu beberapa orang masyarakat Kota Tarakan.

Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai kesulitan, hambatan, dan penyebab kesulitan dan hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan KRPL. Wawancara dilakukan di

lingkungan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan. Proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara yang dipandu menggunakan bantuan pedoman wawancara. Panduan pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar selama proses wawancara dilakukan dapat memperoleh jawaban yang akurat dan tidak menyimpang dari maksud menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dilakukan tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana implementasi kebijakan KRPL berlangsung di Kota Tarakan. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu proses pelaksanaan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian di lokasi penelitian. Melalui teknik observasi langsung,

pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian.

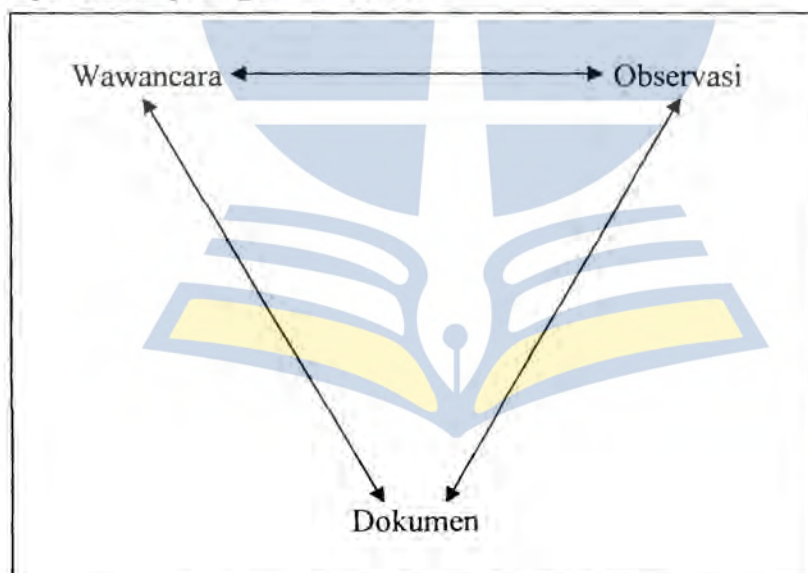
Observasi secara langsung dilakukan untuk dapat menjelaskan fenomena dalam implementasi kebijakan KRPL, yang meliputi apa kasus yang terjadi dalam implementasi kebijakan KRPL, mengapa implementasi kebijakan KRPL dilakukan, dimana implementasi kebijakan KRPL dilakukan, dan bagaimana implementasi kebijakan KRPL itu berlangsung. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah proses dan aktivitas yang dapat diobservasi selama berlangsungnya proses implementasi kebijakan KRPL. Dalam penelitian ini, observasi mempunyai peranan utama untuk menggali data mengenai proses implementasi kebijakan KRPL. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan observasi adalah aparat dan masyarakat dalam implementasi kebijakan KRPL.

F. Metode Analisis Data

1. Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Dalam triangulasi teknik, dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta menganalisis dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Hubungan antara ketiga metode pengumpulan data dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Sugiyono (2010: 126)

Gambar 3.1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Dari gambar diatas menunjukkan hubungan antara ketiga metode pengumpulan data. Data yang diperoleh pada masing-masing metode pengumpulan data dikonfrontasikan satu sama lain. Seluruh data hasil

wawancara dikonfrontasikan dengan data hasil observasi dan dokumentasi, begitu pula sebaliknya. Variabel-variabel yang dianalisis terkait aspek sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi divalidasi melalui triangulasi teknik. Triangulasi merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan proses-proses: (1) wawancara: untuk mendapatkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan KRPL, (2) kajian pustaka atas aturan-aturan dan laporan yang tersedia, (3) selanjutnya melakukan observasi di lapangan. Jadi ke tiga cara tersebut di atas dilakukan secara interaktif untuk mendapatkan data dan informasi yang valid.

Secara detail data dapat diperoleh dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil observasi dan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang implementasi kebijakan KRPL dan pelaksanaannya;
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Data dari ketiga metode pengumpulan data tersebut kemudian disesuaikan keterkaitannya dengan fakta yang terjadi. Penyesuaian fakta yang terungkap melalui data penelitian dilakukan melalui pengolahan data dengan bantuan tabel kerja triangulasi data. Selanjutnya, apabila ditemukan data yang berbeda-beda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap

benar. Pada saat melakukan triangulasi teknik, peneliti juga melakukan triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data yang sama pada waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari sumber-sumber data penelitian. Selain menggunakan triangulasi teknik, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama. Adapun informan yang dilibatkan dalam triangulasi sumber adalah kepala dinas, kepala bidang tanaman pangan, dan kepala seksi Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Jika kesimpulan dari masing-masing metode dan sumber sama, maka validitas dapat ditegakkan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Proses analisis data memiliki proses yang sangat berkaitan dengan rangkaian kegiatan lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini sangat berkaitan dengan jenis penelitian yang dipilih, rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data, jumlah informan, serta asumsi-asumsi teoritis yang melandasi kegiatan penelitian. Setiap rangkaian dan tahapan dalam penelitian ini sangat diperhatikan agar mampu melakukan analisis data sehingga penelitian yang dilaksanakan bersifat koheren.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut antara lain data mengenai implementasi kebijakan KRPL di Kota Tarakan. Selain itu, juga dilakukan

deskripsi terhadap data mengenai kendala dan keberhasilan pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Analisis data secara kualitatif juga dilakukan dengan menganalisis data hasil penelitian. Melalui analisis kualitatif, dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh dari wawancara, catatan observasi, dan data-data dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis sampai dengan menemukan kesimpulan.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi atau mencari informasi mengenai implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Proses analisis data dilaksanakan secara berkelanjutan dengan refleksi secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Teknik analisis data penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dalam tahap ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian pada tahap ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penyusunan proposal, peneliti menentukan fokus penelitian untuk mencari ta dari sumber data termasuk karakteristiknya.

b. Analisis data selama di lapangan

Pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Misalnya pada saat

wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Jika peneliti belum puas dengan jawaban dari responden, maka peneliti bisa melanjutkan pertanyaan lagi sampai batas tertentu diperoleh data yang valid.

c. Analisis data selesai di lapangan

Pada tahap akhir, analisis data dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 1) analisis domain yaitu memberi gambaran umum dari dan menyeluruh dari objek penelitian, 2) analisis taksonomi yaitu penjabaran secara rinci dari analisis domain melalui observasi terfokus, 3) analisis komponensial, yaitu mencari spesifik pada setiap detail struktur internal dan 4) analisis tema kultural yaitu mencari hubungan. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau

mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis Domain menurut Sugiyono (2011: 255), adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan *grand* dan *minitour*. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (*exhausted*). Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam.

Analisis taksonomi adalah analisis yang tidak hanya penjelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang

menjadi sasaran studi. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Tahap ini diperlukan analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Tarakan

a. Kondisi Geografis Kota Tarakan

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Tarakan. Secara geografis wilayah Kota Tarakan berada antara 117°34'-117°38' Bujur Timur dan 3°19'-3°20' Lintang Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan Perda Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, dimekarkan menjadi 4 (empat) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara. Disamping itu berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-Undang tersebut juga mengubah penyebutan "Kota Madya Tarakan" menjadi "Kota Tarakan".

Kota Tarakan mempunyai luas 657,33 km² dimana 38,2% nya atau 250,8 km² berupa daratan dan sisanya sebanyak 61,8% atau 406,53 km² berupa lautan. Letak Kota Tarakan terpisah dari pulau induk Kalimantan Utara, merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Kalimantan Utara. Batas-batas wilayah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir Pantai Kecamatan Pulau Bunyu;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesisir Pantai Kec. Tanjung Palas;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Pantai Kec. Sesayap.
- b. Sejarah Kota Tarakan

Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung *Tarak* (bertemu) dan *Ngakan* (makan) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain”. Selain itu, Tarakan juga merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap dan Malinau. Ketenangan masyarakat setempat agak terganggu ketika pada tahun 1896, sebuah perusahaan perminyakan Belanda, BPM (*Bataavishe Petroleum Maatchapij*) yang menemukan adanya sumber minyak di pulau ini. Banyak tenaga kerja didatangkan terutama dari pulau Jawa seiring dengan meningkatnya kegiatan pengeboran.

Mengingat fungsi dan perkembangan wilayah ini, pada tahun 1923 perkembangan wilayah ini, pada tahun 1923 Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menempatkan seorang Asisten Residen di pulau ini yang membawahi 5 (lima) wilayah. Wilayah tersebut adalah Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan, dan Berau. Namun pada masa pasca kemerdekaan, Pemerintah RI merasa perlu untuk merubah status

kewedanan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan sesuai dengan Keppres RI Nomor 22 Tahun 1963.

Letak dan posisi Kota Tarakan yang strategis telah mampu menjadikan Kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara. Dengan kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981. Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997. Tanggal tersebut sekaligus menandai dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Tarakan.

c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan

Visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan diharapkan mampu menjadi pedoman dan semangat membangun Kota Tarakan melalui perumusan strategi dan sasaran pokok pembangunan yang tepat, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Untuk memberikan gambaran dalam pembangunan di Kota Tarakan, pemerintah daerah terpilih menyusun visi dan misi pembangunan. Pada hakekatnya, visi yang dirumuskan ini adalah kerangka berpikir bersama berkaitan dengan cita-cita masa depan seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan (*stake holders*) di Kota Tarakan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Visi pembangunan Kota Tarakan dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata; didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang, maka ditetapkan misi yang menggambarkan arah pembangunan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - 2) Meningkatkan dan mengembang kualitas sumberdaya manusia;
 - 3) Melaksanakan peningkatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur;
 - 4) Melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup.
- d. Program Strategis Kota Tarakan

Jumlah penduduk Kota Tarakan terus meningkat. Pada tahun 1945, penduduk lokal Kota Tarakan yang umumnya dari suku Jawa, Thionghoa, dan Tidung tercatat hanya sekitar 5.000 orang. Pada pertengahan tahun 2006, jumlah penduduk menjadi 171.690 jiwa atau menjadi 34 kali dalam rentang waktu 61 tahun. Kepadatan penduduk saat ini sebesar 687 jiwa/km². Untuk dapat menapai visi melalui pelaksanaan misi yang telah dirumuskan, pemerintah daerah Kota Tarakan tentunya membutuhkan program strategis yang harus dijalankan. Adapun program-program strategis yang dilaksanakan di Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan dan ketersediaan serta cadangan energy listrik (BBM dan gas);
- 2) Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan serta cadangan air bersih (PDAM);
- 3) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;
- 4) Pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan;
- 5) Pengembangan dan pembangunan Usaha Kecil Menengah (UKM), kawasan perdagangan serta pusat transaksi perdagangan nasional dan internasional;
- 6) Pengembangan pembangunan dan peningkatan pelayanan ke pelabuhan dan Bandar Udara;
- 7) Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan sistem transportasi umum;
- 8) Pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK);
- 9) Pencegahan, penuntasan dan penanggulangan banjir, tanah longsor dan kawasan rawan kebakaran;
- 10) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri perkapalan;
- 11) Pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta kawasan minapolitan;
- 12) Pengembangan dan pembangunan sektor peternakan, pertanian dan tanaman pangan;

- 13) Pengembangan dan pembangunan kawasan wisata (wisata kuliner, wisata sejarah dan budaya, wisata rekreasi dan wisata alam);
- 14) Pengembangan dan pembangunan Kota Gas (*City Gas*);
- 15) Pembangunan kawasan pemakaman umum;
- 16) Penataan kota dan kawasan perparkiran;
- 17) Peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat;
- 18) Perluasan lapangan dan kesempatan kerja;
- 19) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 20) Pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan;
- 21) Pengembangan dan pembangunan sektor kesehatan;
- 22) Pengembangan dan pembangunan sektor keagamaan;
- 23) Pengembangan dan pembangunan teknologi, seni, budaya dan olahraga;
- 24) Penataan dan pembangunan infrastruktur kawasan pesisir;
- 25) Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 26) Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR);
- 27) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan program strategis yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa salah satu program yang menjadi prioritas sebagai program strategis adalah pengembangan dan pembangunan sektor peternakan, pertanian dan tanaman pangan. Kondisi ini tentunya sesuai dengan topik penelitian yang berkaitan

dengan kebijakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai salah satu program yang diimplementasikan untuk mendukung diversifikasi pangan di Kota Tarakan.

e. Data Kependudukan Kota Tarakan

Berikut ini disajikan gambaran luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Tarakan menurut jenis kelamin dan kecamatan tahun 2009-2013 pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Luas Area	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Tarakan Timur	58,01	25.680	23.256	48.936
Tarakan Tengah	55,54	35.711	33.309	69.020
Tarakan Barat	27,89	40.482	36.665	77.147
Tarakan Utara	109,36	13.427	11.670	25.097

Sumber: Tarakan Dalam Angka (2014)

Pada tabel di atas dapat tergambar jumlah keseluruhan penduduk di Kota Tarakan. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 55.960 Kepala Keluarga. Berikut disajikan rincian terkait jumlah kepala keluarga di Kota Tarakan.

Tabel 4.2. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
Tarakan Timur	11.851	9.391	10.455	10.855	11.926
Tarakan Tengah	17.170	13.738	15.293	15.879	17.446
Tarakan Barat	18.097	15.577	17.341	18.005	19.782
Tarakan Utara	5.802	5.359	5.966	6.194	6.806
Jumlah	52.920	44.065	49.055	50.933	55.960

Sumber: Tarakan Dalam Angka (2014)

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Tarakan, dimana pada tahun 2013, jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 55.960 kepala keluarga. Jumlah penduduk di Kota Tarakan adalah sebanyak 220.200 orang yang

berasal dari 55.960 Kepala Keluarga. Mayoritas penduduk di Kota Tarakan bekerja sebagai buruh atau karyawan dengan jumlah sebanyak 54,49% dari angkatan kerja

2. Deskripsi Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian

a) Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tarakan Tahun 2013

Berikut ini disajikan data terkait dengan jumlah rumah tangga pertanian menurut umur dan jenis kelamin di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kota Tarakan

No.	Kelompok Umur Petani Usaha	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	<15	0	-	0	-	0	-
2	15-24	97	98,98	1	1,02	98	100,00
3	25-34	1.323	98,81	16	1,19	1.339	100,00
4	35-44	2.671	97,48	69	2,52	2.740	100,00
5	45-54	1.909	96,03	79	3,97	1.988	100,00
6	55-64	1.019	94,00	65	6,00	1.084	100,00
7	≥65	362	95,26	18	4,74	380	100,00
	JUMLAH	7.381	96,75	248	3,25	7.629	100,00

Sumber : Data BPS Kota Tarakan Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 7.629 rumah tangga usaha pertanian, dimana sebanyak 7.381 rumah tangga usaha pertanian memiliki petani utama berjenis kelamin laki-laki dan 248 rumah tangga memiliki petani utama berjenis kelamin perempuan. Kecenderungan bahwa petani utama laki-laki lebih tinggi jumlahnya jika dibandingkan dengan petani utama perempuan, terjadi di setiap masing-masing kelompok umur.

Demikian pula halnya bila dirinci menurut kelompok umur petani utama, kelompok usia produktif (15–64 tahun) terlihat mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian. Tercatat sebanyak 7.249 rumah tangga usaha pertanian atau sebesar 95,02 persen yang kelompok umur petani utamanya antara 15–64 tahun. Sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan kelompok umur petani utama di atas 64 tahun adalah sebanyak 380 rumah tangga.

b) Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang di Kuasai di Kota Tarakan

Untuk mengetahui jumlah rumah tangga pertanian menurut golongan luas lahan yang di kuasai oleh masyarakat, maka kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang di Kuasai di Kota Tarakan

No.	Luas Lahan (M2)	Sensus Pertanian 2003	Sensus pertanian 2013	Perubahan	
				Absolut	%
1	<1 000	2.865	3.682	817	28,52
2	1 000–1 999	534	307	-227	-42,51
3	2 000–4 999	379	388	9	2,37
4	5 000–9 999	190	363	173	91,05
5	10 000–19 999	514	479	-35	-6,81
6	20 000–29 999	143	206	63	44,06
7	≥30 000	1.365	2.204	839	61,47
	JUMLAH	5.990	7.629	1.639	27,36

Sumber : Data BPS Kota Tarakan Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, dimana hasil sensus pertanian (2003) menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,10 ha (1.000 m²) mendominasi. Kondisi yang hampir serupa terjadi pada hasil sensus pertanian (2013), dimana jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai kurang dari 0,10 ha (1.000 m²) mendominasi (3.682 rumah tangga), mengalami peningkatan

sebesar 28,52 persen dibandingkan hasil sensus pertanian (2003), yang tercatat sebanyak 2.865 rumah tangga. Rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai antara 0,10–0,19 ha (1.000–1.999 m²) pada sensus pertanian (2013) sebanyak 307 rumah tangga, menurun sebesar 42,51 persen bila dibandingkan dengan sensus pertanian (2003) yang tercatat sebanyak 534 rumah tangga.

Golongan luas lahan 0,20–0,49 ha (2.000–4.999 m²) tercatat mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 388 rumah tangga pada sensus pertanian (2013), meningkat sedikit jika dibandingkan hasil sensus pertanian (2003) sebanyak 379 rumah tangga. Sedangkan untuk golongan luas lahan yang dikuasai lebih dari 0,50 hektar (5.000 m²), jumlah usaha rumah tangga pertanian hasil sensus pertanian (2013) meningkat sebanyak 1.040 rumah tangga jika dibandingkan dengan hasil sensus pertanian (2003).

c) Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Tahunan dan Semusim Menurut Kelompok Tanaman dan Kecamatan

Pada tabel dibawah ini akan disajikan jumlah rumah tangga hortikultura tahunan dan semusim menurut kelompok tanaman dan kecamatan sebagai berikut :

Table 4.5 Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Tahunan dan Semusim Menurut Kelompok Tanaman dan Kecamatan

Kecamatan	Rumah Tangga Hortikul tura	Buah-buahan		Sayuran		Tanaman obat-obatan		Tanaman Hias	
		Tahunan	Semusim	Tahunan	Semusim	Tahunan	Semusim	Tahunan	Semusim
Tarakan Timur	448	246	4	2	297	32	47	0	1
Tarakan Tengah	156	122	1	10	77	5	8	3	1
Tarakan Barat	596	314	4	6	420	16	29	1	4
Tarakan Utara	662	547	12	10	327	19	28	1	11
Kota Tarakan	1.862	1.229	21	28	1.121	72	112	5	17

Sumber : Data BPS Kota Tarakan Tahun 2014

Pada tabel diatas dapat terlihat, bahwa jumlah rumah tangga usaha hortikultura di Kota Tarakan adalah sebesar 1.862 rumah tangga. Dilihat dari pola penyebaran, rumah tangga usaha hortikultura paling banyak dijumpai di Kecamatan Tarakan Utara (662 rumah tangga) yang diikuti penyebaran rumah tangga di Kecamatan Tarakan Barat yang mencapai 596 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga usaha pertanian tanaman hortikultura paling sedikit berada di Kecamatan Tarakan Tengah sebesar 156 rumah tangga (8,38%).

Menurut hasil sensus pertanian (2013), kelompok tanaman hortikultura yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha hortikultura di Kota Tarakan adalah kelompok tanaman buah-buahan 67,13 persen (1250 rumah tangga) dan yang paling sedikit diusahakan adalah kelompok tanaman hias (22 rumah tangga). Jika melihat perbandingan antara jumlah rumah tangga usaha tanaman hortikultura tahunan dan semusim dapat dilihat bahwa untuk kelompok tanaman buah-buahan, jenis tanaman tahunan lebih banyak diusahakan dibandingkan dengan tanaman semusim. Hal yang berbeda terjadi pada tiga kelompok tanaman hortikultura lainnya karena dibandingkan dengan tanaman tahunan, tanaman semusim lebih banyak diusahakan pada kelompok tanaman sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan sensus pertanian tahun 2013 mencatat bahwa dari keempat kelompok tanaman hortikultura tahunan, kelompok tanaman buah-buahan merupakan kelompok tanaman yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha hortikultura dengan persentase sebesar 66,00 persen (1.229 rumah tangga). Potensi usaha kelompok tanaman buah-buahan tahunan terdapat di Kecamatan Tarakan Utara. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga usaha tanaman buah-

buah di kecamatan tersebut yang mencapai 547 rumah tangga (44,51%). Untuk kelompok tanaman sayuran tahunan, Kecamatan Tarakan Tengah dan Utara sama-sama memiliki jumlah rumah tangga usaha tanaman sayuran tahunan terbanyak yaitu sebesar 10 rumah tangga. Rumah tangga usaha tanaman hias tahunan paling banyak dijumpai di Kecamatan Tarakan Tengah walau hanya berjumlah 3 (tiga) rumah tangga dan rumah tangga usaha tanaman obat-obatan tahunan paling banyak terdapat di Kecamatan Tarakan Timur (32 rumah tangga).

Berbeda dengan kelompok tanaman hortikultura tahunan, kelompok tanaman hortikultura semusim yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha hortikultura adalah kelompok tanaman sayuran. Dari 1.862 rumah tangga usaha hortikultura, sebanyak 1.121 rumah tangga mengusahakan kelompok tanaman sayuran semusim. Kelompok tanaman buah-buahan semusim diusahakan sebanyak 21 rumah tangga, sedangkan kelompok tanaman obat-obatan semusim diusahakan oleh 112 rumah tangga. Tanaman hias merupakan kelompok tanaman hortikultura semusim yang paling sedikit diusahakan oleh rumah tangga usaha hortikultura di Kota Tarakan dengan 17 rumah tangga.

3. Deskripsi Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan di Kota Tarakan

Usaha Subsektor Tanaman Pangan meliputi usaha tanaman padi dan palawija. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (2013), diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Kota Tarakan didominasi oleh rumah tangga yang mengelola palawija. Dari keseluruhan rumah tangga yang mengelola tanaman palawija (801 rumah tangga), sebanyak 72,28% (579 rumah tangga) diantaranya mengelola ubi kayu. Sedangkan rumah tangga yang mengelola tanaman pangan

hanya sebanyak 4,58% (38 rumah tangga) dari seluruh rumah tangga tanaman pangan dimana sebagian besar merupakan pengelolaan tanaman padi sawah yang mencapai 94,74% (36 rumah tangga).

Jenis tanaman padi di Kota Tarakan terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Jenis padi sawah lebih banyak diusahakan oleh rumah tangga, bila dibandingkan dengan padi ladang. Menurut data Sensus Pertanian (2013) dari 38 rumah tangga tanaman padi, sekitar 94,74% (36 rumah tangga) mengelola tanaman padi sawah, sedangkan padi ladang hanya dikelola oleh sekitar 7,89% rumah tangga tanaman padi. Selain jumlah rumah tangga usaha pertanian tanaman pangan,

Sensus Pertanian (2013) juga memberikan informasi mengenai luas tanam dari masing-masing komoditas tanaman pangan. Luas tanam untuk tanaman padi secara keseluruhan berjumlah 50,11 ha yang terdiri dari luas tanam tanaman padi sawah seluas 46,87 ha dan padi ladang seluas 3,2 ha. Jika dilihat rata-rata luas tanaman padi per rumah tangga usaha dapat dilihat bahwa rata-rata luas tanam per rumah tangga tanaman padi sawah lebih besar jika dibandingkan tanaman padi ladang. Satu rumah tangga usaha tanaman padi sawah memiliki luas tanam sekitar 1,30 ha, sedangkan luas tanam yang dimiliki oleh rumah tangga tanaman padi ladang hanya sekitar 1,08 ha.

Tanaman palawija meliputi kelompok biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dari 7 (tujuh) komoditas utama palawija yang ditanam di Kota Tarakan, ubi kayu merupakan komoditas yang paling banyak ditanam oleh rumah tangga palawija di Kota Tarakan diikuti oleh komoditas jagung dan ubi jalar.

Persentase jumlah rumah tangga pada tiga komoditas utama ini terhadap jumlah rumah tangga palawija masing-masing adalah 72,28% (579), 42,20% (338), dan 4,74% (38). Sedangkan komoditas palawija yang paling sedikit ditanam adalah kedelai dan talas yang masing-masing hanya dikelola oleh 3 (tiga) rumah tangga dan 5 (lima) rumah tangga.

Jika dilihat dari besaran luas tanam per komoditas, jagung merupakan komoditas tanaman palawija yang memiliki luas tanam terbesar. Dari 216,89 ha luas tanam palawija, sekitar 53,20% (115,38 ha) merupakan luas tanam untuk komoditas jagung. Sementara itu, luas tanam terkecil adalah komoditas kedelai dan talas yang hanya seluas 0,12 dan 1,11 ha. Rata-rata luas tanam usaha tanaman palawija lebih kecil bila dibandingkan dengan tanaman padi, yaitu hanya sekitar 0,27 ha. Menurut komoditasnya, tanaman palawija yang memiliki rata-rata luas tanam terbesar adalah jagung yaitu seluas 0,34 ha per satu rumah tangga usaha tanaman jagung, sedangkan rata-rata luas tanam terkecil adalah talas yang rata-rata hanya ditanam seluas 0,02 ha per rumah tangga tanaman talas.

Berbeda dengan subsektor lainnya, pada subsektor tanaman pangan, rumah tangga yang mengelola tanaman pangan dengan tujuan seluruh hasilnya digunakan untuk dikonsumsi sendiri (tidak dijual) juga tergolong sebagai rumah tangga usaha pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (2013), terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga tanaman pangan melakukan usaha tanaman pangannya dengan tujuan hasil panennya untuk dijual. Dari 1.029 rumah tangga usaha tanaman padi, sekitar 64,14% rumah tangga bertujuan menjual seluruh hasil panennya. Sementara itu, rumah tangga yang menjual sebagian hasil panennya

sekitar 25,66% (264 rumah tangga), sedangkan yang mengkonsumsi sendiri seluruh hasil panennya ada sekitar 10,20% (105 rumah tangga).

Berbeda dengan rumah tangga padi, sebagian besar rumah tangga palawija (65,76%) menjual seluruh hasil panennya. Sementara itu, rumah tangga yang menjual sebagian hasil panen palawijanya ada sekitar 25,25% (250 rumah tangga), sedangkan jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi sendiri seluruh hasil panen palawijanya adalah sebesar 8,99%. Karakteristik penjualan hasil panen ini juga berlaku pada semua komoditas palawija kecuali kacang hijau dan talas dimana kacang hijau hanya dijual seluruhnya dan dikonsumsi sendiri, sedangkan komoditas talas tidak ada yang seluruh hasil panennya dikonsumsi sendiri karena minimal ada hasil panen dijual walau hanya sebagian.

Sistem pemanenan utama yang dipakai oleh sebagian besar rumah tangga usaha tanaman padi adalah dipanen sendiri. Jumlah rumah tangga tanaman padi yang memanen sendiri hasil panennya mencapai 89,74%. Di Kota Tarakan tidak ada satupun petani yang menebaskan atau mengijonkan hasil panennya. Seperti halnya padi, sistem pemanenan utama yang dipakai oleh sebagian besar rumah tangga usaha tanaman palawija pada periode yang sama adalah dipanen sendiri. Jumlah rumah tangga tanaman palawija yang memanen sendiri hasil panennya mencapai 74,04%. Meskipun tidak terlalu banyak, beberapa rumah tangga ada yang mengijonkan atau menebaskan tanaman palawijanya terutama komoditas ubi kayu. Sensus Pertanian (2013) mencatat bahwa sebesar 0,10% rumah tangga menebaskan tanamannya, sedangkan yang mengijonkan tanaman ubi kayunya hanya sekitar 0,40%.

Rumah tangga tanaman padi paling banyak berlokasi di Tarakan Timur dengan jumlah rumah tangga tanaman padi (sawah dan ladang) sebanyak 23 rumah tangga (60,53%). Meskipun begitu, untuk tanaman pangan palawija, Tarakan Timur hanya memiliki 12,11% rumah tangga palawija diantara 801 rumah tangga palawija se-Kota Tarakan. Sedangkan rumah tangga yang mengelola komoditas palawija tertinggi berada di Kecamatan Tarakan Utara yang mencapai 381 rumah tangga palawija atau sebanyak 47,56%, dimana komoditas jagung menjadi komoditas dominan palawija yang dikelola oleh rumah tangga tersebut. Secara umum, Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan yang memiliki banyak rumah tangga pertanian yang mengusahakan Subsektor Tanaman Pangan yang mencapai 46,14% (383 rumah tangga) dan diikuti oleh Kecamatan Tarakan Barat yang mencapai 28,67% (238 rumah tangga). Sedangkan kecamatan yang paling sedikit rumah tangga yang mengusahakan pertanian Subsektor Tanaman Pangan adalah Kecamatan Tarakan Tengah (95 rumah tangga atau 11,44%).

4. Deskripsi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Program KRPL merupakan wujud kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai bentuk keberlanjutan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang telah dimulai sejak tahun 2010. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sendiri merupakan salah upaya implementasi sukses dari

Peraturan Presiden (PP) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, kebijakan tersebut seharusnya ditindaklanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan sehingga akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan

lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL dilakukan dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP des/kelurahan dan Pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam. Di setiap kelurahan dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat, dan mengutamakan menanam tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat maupun jenis tanaman baru yang memiliki nilai gizi tinggi.

Kelompok sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 yang berdomisili berdekatan dalam satu desa/kelurahan. Setiap anggota wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi-umbian) ataupun memelihara ternak dan ikan, dengan tujuan untuk mencukupi

ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok. Setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri.

Berikut ini disajikan nama-nama kelompok wanita tani, nama ketua, alamat dan jumlah anggota kelompok yang menerima bantuan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Nama-Nama Kelompok Wanita Tani (KRPL) di Kota Tarakan

No.	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat	Jumlah Anggota
1.	Kecubung	Fenny	Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan	30
2.	Kampung Melati	Ratna	Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan	27
3.	PKK Kelurahan Mamburungan	Salbiah	Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan	30
4.	Hidayatullah	Hapsa	Kel. Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan	30
5.	PKK Kelurahan Kampung Enam	Sumiati	Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan	30
6.	Dahlia	Susiani Suwandi	Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan	30

5. Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Tarakan

Pola pangan harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Berikut ini disajikan pola pangan harapan (PPH) di Kota Tarakan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Tarakan

<i>No</i>	<i>Jenis Bahan Pangan</i>	<i>Gram</i>	<i>Energi(Kkal)</i>	<i>%AKG</i>	<i>Bobot</i>	<i>Sor PPH</i>
1.	Beras	250	956,47	55,5	0,5	27,75
2.	Umbi-umbian	110	125,23	7,27	0,5	3,63
3.	Pangan Hewani	114	194,44	11,28	2,00	22,56
4.	Minyak dan Lemak	18,7	164,71	9,56	0,50	4,78
5.	Buah/Biji Berminyak	9	48,70	2,83	0,50	1,41
6.	Kacang-kacangan	30	84,81	4,92	2,00	9,84
7.	Gula	21,44	76,71	4,43	0,50	2,21
8.	Sayur/buah	150	66,30	3,85	5,00	19,23
9.	Lain-lain	5,8	6,45	0,37	0,00	0,00
	Total	966,78	1723,42	100		91,43

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sasaran konsumsi energi tahun 2015 untuk Kota Tarakan adalah 1723,42 Kkal/Kap/hari yang berasal dari 9 (sembilan) kelompok bahan pangan dengan persentase Angka Kecukupan Gizi 100 % dan capaian skor PPH 91,43. Dalam rangka pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan untuk dikonsumsi penduduk kota

tarakan tahun 2015 adalah dengan memperhatikan pola konsumsi pangan dan tingkat ketersediaan pangan yang dinyatakan dalam Kkal/Kap/hari seperti tabel diatas yang kemudian dapat dikonversikan ke dalam bentuk (gr/kap/hari; kg/kap/tahun dan ton/tahun).

B. Hasil Penelitian

1. Proses Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan

a. Perencanaan Program

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa regulasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 43 tentang Percepatan P2KP dan Gerakan Percepatan P2KP. Ada sebagian anggota kelompok belum memahami isi regulasi tersebut. Sedangkan hasil wawancara menunjukkan bahwa informan dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan sangat memahami regulasi yang terkait dengan program KRPL. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“Ya, tentunya kami memahami regulasi tentang kebijakan P2KP terkait program KRPL. Kebijakan terkait antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 43 tentang Pangan, Percepatan P2KP dan Gerakan Percepatan P2KP” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui regulasi yang menjadi dasar dari program KRPL di Kota Tarakan. Kebijakan tersebut antara lain UU Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Presiden

Nomor 22 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 43 tentang Pangan, Percepatan P2KP dan Gerakan Percepatan P2KP. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan kemudian merespon melalui pelaksanaan rapat internal. Hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan berikut :

“Kita kemudian mengadakan rapat internal dengan bidang terkait, yaitu bidang ketahanan pangan. Rapat internal ini menjadi awal untuk melaksanakan perencanaan” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa setelah ada kebijakan yang mendasari, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan selaku pihak implementator kebijakan kemudian mengadakan rapat internal untuk membahas tentang perencanaan program KRPL yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam implementasi program KRPL tentunya diperlukan perencanaan yang baik agar program dapat berjalan dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun perencanaan, penetapan tujuan dari program harus menjadi dilaksanakan. Tujuan dari program KRPL dapat diketahui dari kutipan wawacara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan berikut:

“Tujuannya untuk memotivasi masyarakat khususnya kelompok wanita tani, ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekeliling rumahnya untuk menanam

sayur-sayuran, buah dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Kutipan wawancara di atas menginformasikan bahwa program KRPL bertujuan memotivasi masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran, buah dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Tujuan ini harus dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan, termasuk pelaksana di lapangan seperti halnya penyuluh program KRPL dan juga kelompok wanita tani. Dari wawancara yang dilaksanakan, penyuluh program KRPL menyatakan tentang tujuan program sebagaimana berikut :

“Tentu, untuk memotivasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyuluh memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan program KRPL. Di level pelaksana lapangan, kelompok wanita tani mengungkapkan pemahamannya tentang tujuan program KRPL sebagaimana utipan wawancara berikut :

“KRPL adalah program pemerintah berupa bansos untuk memberdayakan ibu rumah tangga menanam sayur-mayur di pekarangan. Kami setuju dan mendukung program P2KP tersebut” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Kutipan wawancara di atas juga menunjukkan bahwa program KRPL dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga untuk menggunakan lahan pekarangan menanam sayur-sayura guna mendukung pemenuhan gizi keluarga.

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa seluruh implementator kebijakan program KRPL sangat memahami tujuan dari program KRPL. Selanjutnya, tentu dapat disusun perencanaan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tersebut. Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan mengemukakan tentang proses perencanaan program sebagaimana kutipan berikut :

“Tahap perencanaan dilakukan dengan melaksanakan rapat internal di bidang ketahanan pangan untuk membentuk tim seleksi CP/CI, menetapkan tenaga Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan yang mengkoordinir di tingkat kota dan kelurahan dan penanggung jawab kegiatan pelaksanaan dan tenaga monev” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Melalui kutipan wawancara di atas dapat dipahami proses perencanaan program KRPL di level dinas. Perencanaan dilakukan melalui rapat internal, pembentukan tim seleksi CP/CI, serta menetapkan tenaga penyuluh. Adapun dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“Ada. Dokumen berupa DIPA/POK bantuan APBN 2013, penetapan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan dan penetapan CP/CL, rapat-rapat koordinasi” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Kutipan wawancara di atas menginformai adanya dokumen perencanaan program KRPL di level dinas, yaitu DIPA/POK bantuan APBN 2013, penetapan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan dan penetapan CP/CL. Di level

penyuluh program KRPL, perencanaan yang disusun diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut :

“Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat, yaitu kelompok wanita tani” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Adapun dokumen perencanaan yang disusun oleh Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan dapat diketahui dari kutipan berikut :

“Ada. Proposal usulan kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, SK dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, administrasi surat masuk/keluar kelompok” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Pada level pelaksana lapangan, perencanaan dilakukan melalui persiapan sosialisasi dengan melaksanakan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat. Setelah penyuluh melaksanakan sosialisasi, maka kelompok penerima manfaat atau kelompok wanita tani melaksanakan perencanaan sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Tahapan awal setelah kami mendapat sosialisasi dari penyuluh kota dan kelurahan, maka kami berinisiatif mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kerja anggota, dan pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Dari kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa setelah mendapat sosialisasi dari penyuluh, kelompok wanita tani juga menyusun perencanaan. Langkah perencanaan yang oleh kelompok penerima manfaat adalah mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan

rencana kerja anggota, dan pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas. Berkaitan dengan jadwal dan tahap dalam pelaksanaan, Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan mengungkapkan sebagaimana berikut :

“Ada pembagian tahapan. Mulai tahap persiapan, pelaksanaan, monev dan evaluasi program yang baru akan, telah, dan pasca pelaksanaan (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Tahap pelaksanaan program telah direncanakan sebelumnya, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan keseluruhan data mengenai perencanaan yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa perencanaan program KRPL di Kota Tarakan sudah disusun dengan baik. Dengan adanya perencanaan yang baik, tentunya tujuan dan dampak positif dari kebijakan program KRPL dapat dicapai tercapai sesuai harapan.

b. Pengorganisasian Program

Pengorganisasian dapat dipahami sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, lapangan, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pada tahap sebelumnya diketahui bahwa sudah ada penunjukan

terhadap penyuluh sebagai pelaksana lapangan. Penunjukan ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan. Penunjukan penyuluh dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan berikut :

“Kita punya tenaga penyuluh PNS, THL, TBPP atau penyuluh swadaya atau tokoh masyarakat yang bisa dilibatkan dalam program ini. Sumber daya manusia yang terkait dengan program ini antara lain Seluruh masyarakat Kota Tarakan, pemerintah kota khususnya Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan yang membidangi Ketahanan Pangan, kelompok wanita tani hasil penetapan CP/CL, dan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan juga mengungkapkan sumber daya manusia yang terkait dalam implementasi program KRPL sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Adapun tugas Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“Melaksanakan pertemuan sosialisasi P2KP pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Terkait dengan kesiapan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan penyuluh berikut :

“Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis P2KP tahun 2015” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui pihak pelaksana lapangan yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan. Pihak pelaksana lapangan antara lain tenaga penyuluh PNS, THL, TBPP atau penyuluh swadaya atau tokoh masyarakat Pelaksanaan Program. Dalam hal ini, penyuluh melalui persiapan dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis P2KP tahun 2015. Seluruh pihak tersebut bekerjasama dan dilibatkan dalam program KRPL. Adapun penganggung jawab dari pelaksanaan program KRPL di level dinas adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan dan juga penyuluh program KRPL. Namun demikian, pihak yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan program KRPL adalah Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan. Pengelompokan dan pembagian tugas dalam implementasi progra KRPL di Kota Tarakan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“Ada. Penanggung jawab Program Kepala dinas; Ir. Elang Buana, Penanggung jawab Kegiatan Kepala Bidang ketahana

Pangan; Ir. Tati, Penanggung jawab administrasi; Shinta, S.P., koordinator penyuluh; Hari K, S.P, dan penyuluh pendamping di tingkat kelurahan. Pembagian tugas sesuai dengan pengelompokan tugas, maka ada tupoksi masing-masing untuk menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan program” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Pengelompokan dan pembagian tugas juga dijelaskan oleh penyuluh sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Ada pengelompokan tugas, secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan. Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa ada pegelompokan dan pembagian tugas yang jelas dalam implementasi program KRPL. Hal ini sesuai dengan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan di Kota Tarakan. Pengelompokan dan pembagian tugas dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pihak. Di level kelompok penerima manfaat, pengorganisasian dilakukan terhadap fasilitas bantuan yang diterima sebagaimana kutipan berikut :

“Ada dari bantuan APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian untuk mendukung program KRPL. Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi berupa: polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer. Sedangkan dari APBN tahun 2015 tidak ada” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa fasilitas yang diterima oleh kelompok penerima manfaat adalah bantuan dari APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian. Fasilitas yang diberikan antara lain polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer. Berdasarkan

uraian di atas dapat dipahami bahwa pada tahap pengorganisasian, sudah ada pengaturan yang jelas terhadap sumber daya manusia berupa pengelompokan dan pembagian tugas secara terstruktur.

c. Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan program. Tanpa adanya pelaksanaan, tentunya tujuan program tidak akan pernah tercapai. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pelaksanaan program KRPL di Kota Tarakan dilakukan melalui langkah-langkah tertentu sebagaimana ungkapan informan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan berikut:

“Melaksanakan sosialisasi di tingkat kota, kelurahan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat, alim ulama untuk memberikan pemahaman dan pencerahan tentang tujuan, sasaran dan manfaat program yang akan dilaksanakan” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Hal senada juga diungkapkan oleh peenyuluh lapangan sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi di tingkat kota dan kelurahan. Melalui sosialisasi inilah masyarakat, khususnya kelompok wanita tani dapat mengenai program KRPL. Dalam wawancara yang

dilakukan, kelompok wanita tani mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan cukup informasi tentang program KRPL melalui sosialisasi yang dilakukan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Setelah memperoleh informasi dan memahami informasi mengenai program KRPL, tahap yang dilakukan antara lain media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan berikut :

“Ada. tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Sampai dengan saat ini perlu diketahui bahwa program KRPL sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan program KRPL diuraikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Program KRPL tahun 2013 ada bantuan dari APBN untuk 6 kelompok masing-masing 47 juta untuk pengembangan pekarangan, kebun bibit, dan demplot kelompok. Pada tahun 2014 bantuan dari APBN hanya 3 juta tambahan pengembangan kebun bibit saja. Tahun 2015 ada bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara berupa bantuan bahan dan alat pertanian” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program KRPL sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebelumnya. Kutipan wawancara di atas juga menginformasikan bantuan dana yang diberikan kepada kelompok wanita tani setiap tahunnya, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2015. Pada tahun 2013, kelompok wanita tani memperoleh bantuan berupa dana sebesar Rp.47.000.000,- untuk masing-masing kelompok. Dana ini dipergunakan untuk pengembangan pekarangan, kebun bibit, dan demplot kelompok. Pada tahun 2014, diberikan bantuan dari APBN sebesar Rp.3.000.000,- untuk tambahan pengembangan kebun bibit. Pada tahun 2015, kelompok wanita tani kembali memperoleh bantuan dari APBD berupa bahan dan alat pertanian. Tahap pelaksanaan program pada tingkat kelompok penerima manfaat dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“Setelah rencana kerja anggota disepakati lalu kelompok membeli kebutuhan sesuai dengan RKA yang ada. Penyiapan lahan untuk pengembangan pekarangan, kebun bibit, dan demplot kelompok. Pembibitan dapat dilakukan” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Kutipan wawancara di atas menceritakan mengenai tahap yang dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Keberhasilan pelaksanaan program KRPL diungkapkan oleh penyuluh sebagaimana kutipan berikut :

“Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Pelaksanaan program yang baik tentunya diharapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, program KRPL sudah berjalan sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Tanaan Pangan sebagaimana kutipan berikut :

“Sudah berjalan sesuai dengan rencana namun kendala pendanaan yang harus distimulasi kontinyu, karena program akan berjalan bilamana ada dukungan dana yang cukup” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Berdasarkan fakta yang terungkap melalui kutipan di atas dapat dipahami bahwa program sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, untuk dapat tetap berjalan dengan baik harus ada pendanaan yang berkesinambungan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Namun demikian, pendapat ini sedikit berbeda dengan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.

Penyuluh justru berpendapat bahwa tidak semua tahap dalam program KRPL berjalan lancar sesuai rencana. Pelaksanaan program KRPL sangat tergantung pada situasi di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan situasi di lapangan adalah lokasi lahan pekarangan yang digunakan untuk bertani. Dalam pelaksanaan di lapangan, program KRPL mengalami sedikit kendala seperti ungkapan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan berikut :

“Ada. Lahan pekarangan yang sangat terbatas sehingga untuk tahap pengembangan mengalami hambatan. Sumber daya penyuluh, dan pendanaan” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Hal senada juga diungkapkan oleh Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan, kutipan wawancara berikut :

“Ada. Mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang representatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa kendala yang ditemui di lapangan berkaitan dengan lahan yang digunakan. Lahan yang dapat digunakan sangat terbatas sehingga untuk tahap pengembangan mengalami hambatan. Begitu pula halnya dengan sumber daya penyuluh dan pendanaan yang dinilai masih kurang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kelompok penerima manfaat yang merasa bahwa bantuan pendanaan untuk pengembangan pekarangan anggota kelompok, dan kebun bibit masih kurang. Solusi dalam permasalahan ini adalah mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang representatif. Selain itu, dalam pelaksanaan juga perlu pemanfaatan lahan yang ada secara efektif. Di tingkat kelompok penerima manfaat, kesulitan yang dirasakan dapat diketahui dari kutipan berikut :

“Ya. Terutama pada penyediaan media tumbuh yang digunakan mengisi polibag serta musim kemarau yang berkepanjangan saat ini” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program sudah dijalankan sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemui sejumlah kendala dan kesulitan, terutama berkaitan dengan sumber daya dan pendanaan. Kesulitan ini yang kemudian menjadi hambatan dalam pelaksanaan program KRPL.

d. Pengawasan Program

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL selama ini telah terbukti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik bagi anggota kelompok wanita maupun lingkungan kawasan di sekitarnya. Bagi pelaku anggota kelompok wanita, kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pangan untuk dikonsumsi bagi keluarga, menghemat pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari dan terjadinya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga anggota. Bagi lingkungan kawasan, kegiatan ini dapat membuat suasana asri dan lingkungan lebih nyaman. Keberhasilan dari program KRPL yang telah dilaksanakan tergambar dalam kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan berikut :

“Kelompok Wanita Tani (Ibu rumah tangga) merasakan sangat terbantu dengan adanya program ini, karena untuk kebutuhan pangan sehari-hari tidak harus membeli ke pasar lagi. Cukup pemenuhan dengan mengambil hasil pekarangan yang ada untuk kebutuhan sehari-hari” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Keberhasilan program KRPL di Kota Tarakan dalam mencapai tujuan juga diungkapkan oleh penyuluh lapangan sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Pelaksanaan program dapat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Program KRPL di Kota Tarakan dipandang sebagai suatu program yang berdampak positif oleh kelompok wanita tani sebagaimana kutipan berikut :

“Tentu positif sekali, karena kita ibu-ibu di lingkungan ini sudah merasakan manfaat KRPL yaitu untuk kebutuhan sayur-mayur kami tidak perlu membel lagi ke pasar, banyak manfaat yang dapat diperoleh bukan hanya produk sayuran tapi silaturahmi yang lebih luas. Kelompok ibu rumah tangga dapat menekan pengeluaran belanja kebutuhan sayur-mayur sehari-hari, bahkan melalui kebun bibit hasilnya dapat kita jual ke perusahaan” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Dengan keberhasilan tersebut, sangat wajar apabila kelompok penerima manfaat memiliki harapan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh kelompok wanita tani sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Program ini sangat baik dan membantu ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok KRPL dan diupayakan program ini selalu di-support oleh pemerintah baik pendampingan lapangan maupun pendanaannya” (D.WWCR-3, 02 Oktober 2015).

Program KRPL yang telah dilaksanakan dapat dikatakan cukup berhasil dalam mencapai tujuan. Melalui program tersebut, kelompok wanita tani sebagai penerima manfaat merasa sangat terbantu untuk memenuhi pangan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelompok wanita tani atau ibu rumah tangga dapat mengambil hasil pekarangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa program KRPL sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk menjamin program KRPL tetap terlaksana dengan baik, dilakukan pengawasan dan monitoring

sebagaimana ungkapan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan

Kota Tarakan berikut :

“Ada. Dan dilakukan pengawasan dan penilaian kelompok yang berprestasi diberikan hadiah dan penghargaan” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Kelompok wanita tani dalam wawancara yang dilaksanakan peneliti juga membenarkan adalah monitoring dan evaluasi dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Lebih lanjut, kelompok wanita tani menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap semester di tahun 2014. Pada tahun ini, karena bantuan yang diberikan hanya berupa bahan dan alat pertanian, maka monitoring dan evaluasi hanya dilakukan dengan memeriksa sejauh mana bantuan telah disalurkan kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut :

“Ada. Setiap semester dilakukan tahun sebelumnya. Tahun ini karena bantuannya berupa bahan dan alat pertanian maka hanya mengecek sejauh mana telah disalurkan ke masyarakat” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan program KRPL dilakukan menggunakan instrumen penilaian. Adapun komponen yang dinilai melalui instrumen penilaian tersebut digambarkan melalui kutipan

wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota

Tarakan sebagaimana uraian berikut :

“Ada. Meliputi tingkat partisipasi anggota kelompok, pendampingan penyuluh, struktur organisasi, kelengkapan administrasi kelompok, pertemuan kelompok” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Komponen yang dinilai dalam instrumen penilaian juga diungkapkan oleh Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan

Tanaman Pangan Kota Tarakan sebagaimana kutipan berikut :

“Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Adapun elemen yang dinilai melalui instrumen penilaian dalam pelaksanaan evaluasi program adalah tingkat partisipasi anggota kelompok, pendampingan penyuluh, struktur organisasi, kelengkapan administrasi kelompok, pertemuan kelompok yang dibentuk oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan. Seluruh komponen yang dinilai tersebut akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program KRPL di Kota Tarakan. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan program dinilai sudah cukup berhasil. Keberhasilan program KRPL disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan dalam kutipan wawancara berikut :

“Ya. Masyarakat antusias pada program ditandai dengan keanggotaan kelompok yang bertambah. Pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat bertambah” (D.WWCR-1, 12 Oktober 2015).

Keberhasilan program KRPL di Kota Tarakan juga diungkapkan oleh penyuluh dalam kutipan wawancara berikut :

“Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok” (D.WWCR-2, 03 Oktober 2015).

Adapun yang menjadi indikator dari keberhasilan program secara keseluruhan adalah program tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan sehingga masyarakat menjadi lebih antusias untuk mengikuti program KRPL. Keberhasilan program juga ditandai dengan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap program KRPL di Kota Tarakan.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan

Implementasi suatu program kebijakan tentunya membutuhkan berbagai faktor pendukung. Namun demikian, tidak dapat pula dipungkiri bahwa ada faktor penghambat implementasi kebijakan. Faktor pendukung dan penghambat tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat krusial dalam mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Kondisi keempat faktor tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Berikut ringkasan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota

Tarakan dan wawancara dengan Koordinator Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.

Berikut disajikan tabel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kawasan rumah tangga lestari (KRPL) meliputi indikator, sub-indikator dan jawaban informan sebagai berikut :

Tabel 4.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program KRPL

No	Indikator	Sub-Indikator	Jawaban Informan	
			Aparat pemerintah	Pelaksana
1	Komunikasi	Transmisi (penyaluran komunikasi antar dinas terkait)	Baik, sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program	Baik, setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh
		Kejelasan (kejelasan komunikasi antar dinas terkait)	Ya, dinas yang terkait berkomunikasi secara jelas dan akurat	Ya, dinas yang terkait berkomunikasi secara jelas dan akurat
		Konsistensi (kejelasan instruksi kepada pelaksana di lapangan)	Ya, dinas yang terkait sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan	Ya, berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP
2	Sumber daya	Staf (kecukupan dan kompetensi staf)	Ya, memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya	Cukup memadai
		Informasi (ketepatan informasi yang diperoleh pelaksana lapangan)	Sudah sesuai tahun dengan pedoman umum, pedoman pelaksana dan petunjuk teknis tahun 2015	Ya, berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015
		Wewenang (pemahaman pelaksana terhadap wewenang yang dimiliki)	Ya sesuai dengan Tupoksi	Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan
		Fasilitas (keetersediaan fasilitas)	Fasilitas untuk promosi berupa brosur, leaflet dan buletin ada	Ya, bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik
3	Disposisi (Sikap)	Pengangkatan birokrat (pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil)	Pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan	Diumumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
		Insentif (ketersediaan insentif)	Ada untuk tahun 2013 dan 2014 dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada	Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan saprotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara
4	Struktur birokrasi	SOP (adanya SOP)	Belum	Belum ada
		Fragmentasi (kejelasan penyebaran tanggungjawab)	Sesuai dengan Tupoksi dan dilaksanakan penuh tanggungjawab	Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dinas

Pada tabel di atas terlihat hasil penilaian informan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Berikut uraian dari masing-masing kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KRPL di Kota Tarakan.

a. Faktor Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa transmisi atau penyaluran komunikasi sudah berlangsung dengan baik diantara implementator kebijakan. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program. Setiap minggu juga diadakan rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh. Oleh karena itu, transmisi komunikasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kejelasan komunikasi sudah berlangsung dengan baik diantara implementator kebijakan. Dinas yang terkait sudah berkomunikasi secara jelas dan akurat. Oleh karena itu, kejelasan komunikasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa konsistensi komunikasi sudah berlangsung dengan baik diantara implementator kebijakan. Dinas yang terkait sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP. Oleh karena itu, konsistensi komunikasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

b. Faktor Sumber Daya

Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

1) Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan

oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kondisi dan kecukupan sumber daya manusia sudah baik. Jumlah dan kompetensi staf yang dimiliki untuk implementasi program KRPL sudah cukup memadai. Oleh karena itu, staf dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ketepatan informasi yang diperoleh oleh pelaksana di lapangan sudah baik. Informasi yang diberikan kepada pelaksana di lapangan sudah sesuai dengan pedoman umum, pedoman pelaksana, dan petunjuk teknis yang ada. Oleh karena itu, informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

3) Wewenang

Dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman pelaksana terhadap wewenang yang dimiliki sudah baik. Pemahaman pelaksana terhadap wewenang sudah sesuai dengan Tupoksi dan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fasilitas yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Oleh karena itu, fasilitas dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

c. Faktor Disposisi (sikap)

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi antara lain:

1) Pengangkatan birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengangkatan birokrat sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam pengangkatan birokrat, diberikan pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pengumuman juga dilakukan di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas. Oleh karena itu, pengangkatan birokrat dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

2) Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada awalnya sudah ada ketersediaan insentif yang memadai. Namun demikian, pada tahun 2015 tidak ada insentif yang tersedia. Untuk tahun 2013 dan 2014 ada insentif dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada, melainkan hanya bantuan sarana produksi pertanian untuk KRPL dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, kurangnya ketersediaan insentif dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program KRPL.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

1) *Standard Operating Procedures* (SOPs)

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum ada SOP yang jelas dalam pelaksanaan program KRPL. Oleh karena itu, tidak

adanya SOP dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program KRPL.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Penyebaran tanggungjawab dilakukan sesuai dengan Tupoksi dan dilaksanakan penuh tanggungjawab karena sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dinas. Oleh karena itu, fragmentasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

C. Pembahasan

1. Proses Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan

a. Perencanaan Program

Perencanaan merupakan tahap awal dari implementasi suatu kebijakan. Perencanaan dilakukan agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan tepat guna mencapai tujuannya. Dalam pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), agar dapat berjalan baik dan sesuai harapan, maka diperlukan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengembangan KRPL dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) pembentukan kelompok, (2) identifikasi kebutuhan, (3) penyusunan rencana kegiatan, (4) sekolah lapang (SL) dan

pelatihan, (5) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (6) pengembangan demplot kelompok dan (7) penataan lingkungan kawasan. Sebelum perencanaan disusun, pelaksana program dan kebijakan tentunya harus memahami benar tentang program dan kebijakan yang mendasari program tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, program KRPL merupakan wujud kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai bentuk keberlanjutan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sendiri merupakan salah upaya implementasi sukses dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, bahwa proses implementasi kebijakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2008: 101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan

sebelumnya. Hal senada juga diungkapkan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan pihak pemerintah maupun individu yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Demikian pula dipertegas Handoko (2011) bahwa perencanaan adalah pilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) dalam proses implementasi program KRPL terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan dilakukan di setiap tingkat implementator yang meliputi Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan, penyuluh lapangan, serta di kelompok penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sudah disusun sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan diawali tahap penyusunan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan implementasi program KRPL telah dilakukan dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa program KRPL merupakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan

keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Melalui program ini akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Oleh karena itu, perencanaan harus disusun sesuai dengan tujuan pengembangan program KRPL.

Hal senada diungkapkan oleh Mulyono (2008:22), bahwa perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Dalam pelaksanaan perencanaan, implementor suatu kebijakan harus menyusun dengan jelas apa yang akan dilaksanakan selama program berlangsung. Perencanaan yang baik harus dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan suatu program secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Implementor mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan

dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Apabila dilihat proses perencanaan yang dilaksanakan dalam program KRPL maka dapat dikatakan bahwa perencanaan dilakukan dengan cukup baik, melibatkan seluruh pelaksana kebijakan dan memiliki dokumen perencanaan yang jelas.

Di tingkat lapangan, penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota kelompok dengan cara mengisi formulir (blangko) secara bersama-sama yang dibimbing oleh petugas lapangan atau penyuluh dan mendapat arahan dari pendamping desa/kelurahan maupun kabupaten/kota. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, penataan kawasan, dan pengembangan. Teknis penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan mengisi satu persatu kegiatan dalam blangko isian, sehingga penetapan jenis kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan sudah merupakan komitmen bersama dari kelompok. Rencana kegiatan disusun untuk periode waktu tertentu dengan target hasil yang jelas, termasuk yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana kegiatan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok. Meskipun telah disusun

disertai jadwal yang telah ditentukan, namun bersifat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Target hasil dari setiap jenis kegiatan merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Rencana kegiatan tersebut juga disusun disesuaikan dengan kondisi sumberdaya manusia di kelompok dan keadaan sumberdaya alam di wilayah setempat.

Oleh karena itu, dalam perencanaan program KRPL, perlu ada perencanaan yang baik, menyangkut langkah yang harus dilaksanakan, waktu pelaksanaan, cara pelaksanaan, dan pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini, program KPRL telah memiliki susunan yang jelas mengenai faktor-faktor tersebut. Adapun faktor yang harus dilakukan dalam program KRPL adalah kegiatan program rumah pangan lestari itu sendiri, yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai bentuk keberlanjutan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal. Waktu pelaksanaan dimulai dari kebijakan terkait dengan program KPRL ditetapkan. Cara pelaksanaan sudah dijelaskan dalam Panduan Teknis P2KP, dan pihak yang melaksanakan adalah kelompok wanita tani sebagai kelompok sasaran dengan pembinaan dari Dinas Perternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.

Selanjutnya Salam (2004: 15) telah dijelaskan bahwa jenis-jenis rencana terdiri dari kebijakan, anggaran, dan prosedur. Dalam implementasi kebijakan program KRPL, perencanaan yang dilaksanakan

sudah cukup baik. Hal ini disebabkan perencanaan telah memenuhi dua kriteria jenis rencana, yaitu ada kebijakan dan anggaran. Kebijakan yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan KRPL adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program KRPL juga telah memiliki anggaran yang jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh informan penelitian. Namun demikian, terkait dengan prosedur, program KRPL belum memiliki SOP. Hal inilah yang menjadi kekurangan dalam implementasi program KRPL di Kota Tarakan.

b. Pengorganisasian Program

Menurut Mulyono (2008: 22), bahwa tahapan pengorganisasian program KRPL meliputi pengangkatan sumber daya manusia yang bertugas sebagai pelaksana program di lapangan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dilakukan dengan pengelompokan dan pembagian tugas serta tanggung jawab secara jelas dan terstruktur. Pengorganisasian juga dilakukan dengan menyalurkan bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat. Pengorganisasian mempermudah pelaksana dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas

yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Hal ini dipertegas oleh Hasibuan (1995:123), bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut. Hal senada juga diungkapkan Terry (2011:73) bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. merupakan kegiatan dasar dari manajemen .Dalam pengorganisasian program KRPL, sudah dilaksanakan penentuan, pengelompokan, dan pengaturan dari setiap aktifitas yang harus dilaksanakan. Dalam tahap pengorganisasian juga dilakukan penunjukan terhadap tenaga teknis atau penyuluh lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengorganisasian program KRPL sudah sesuai dengan teori mengenai pengorganisasian.

Dalam pedoman pelaksanaan P2KP, diketahui bahwa kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL dilakukan

dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa/kelurahan dan Pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam. Adapun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa proses pengorganisasian juga berjalan dengan baik. Ada pendelegasian wewenang yang cukup baik dari pemerintah daerah kepada penyuluh sebagai pelaksana program di lapangan yang akan menjelaskan dan membina kelompok wanita tani selalu kelompok penerima manfaat.

Secara teknis di lapangan, tahap pengorganisasian dilaksanakan pada tahap pembentukan kelompok. KRPL idealnya dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis). Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan (Salam, 2004:

19). Untuk lebih jelasnya mengenai proses penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan KRPL dapat diketahui dari Panduan Pelaksanaan Program P2KP berikut.

1) Mekanisme penetapan desa/kelurahan dan kelompok penerima manfaat KRPL

a) Tim Teknis P2KP kabupaten/kota melakukan identifikasi CP/CL

berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi desa/kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman P2KP, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok).

b) Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long-list*), daftar sedang (*medium-list*), dan daftar pendek (*short-list*). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalam daftar panjang (*long-list*) diseleksi secara administratif. Bagi yang lulus seleksi administratif akan masuk ke dalam daftar sedang (*medium-list*) untuk selanjutnya dilakukan seleksi aspek teknis dan bagi yang lulus akan masuk ke dalam daftar pendek (*short-list*). Calon yang masuk dalam daftar pendek (*short-list*) ini kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.

- 2) Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) yang diidentifikasi
- a) Kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL;
 - b) Bukan kelompok penerima bantuan sosial lainnya dari lingkup kementerian pertanian di tahun berjalan;
 - c) Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang jelas dan diketahui kepala desa minimal ketua, sekretaris, bendahara serta seksi pengelola kebun bibit dan pemasaran hasil;
 - d) Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (bukan menyewa lahan) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainnya (surat pernyataan);
 - e) Setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak kecil dan ikan;
 - f) Mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan (surat pernyataan);
 - g) Mempunyai anggota yang dapat berpartisipasi dan memiliki semangat yang tinggi terhadap kegiatan KRPL. Sejak awal kelompok agar mendapat pendampingan dari petugas lapang atau

penyuluh. Untuk itu, kelompok sebaiknya memiliki jadwal rutin untuk pertemuan atau aktifitas kelompok, sehingga petugas lapang atau penyuluh dapat melakukan pembinaan pada saat pertemuan tersebut;

- h) Selanjutnya hasil CPCL tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota untuk dana TP dan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi untuk dana dekonsentrasi;
- i) Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi pada bulan Februari 2015;
- j) Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan sebelum ditetapkan dengan Keputusan KPA.

Hal senada juga disampaikan oleh Salam (2004:19), bahwa beberapa tahap dalam proses pengorganisasian, yaitu penentuan kegiatan, pengelompokan kegiatan, dan pendelegasian wewenang. Kegiatan tahap tersebut telah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan program KRPL. Berdasarkan kondisi di lapangan dapat diketahui bahwa sudah ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaan tahap pengorganisasian dalam implementasi program kebijakan terkait dengan KRPL di Kota Tarakan. Sampai dengan saat ini, pengorganisasian telah berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Ada

pembagian tahapan yang jelas dalam implementasi program KRPL sehingga pengorganisasian ini dapat dikatakan berjalan dengan baik.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya dalam implementasi kebijakan program KRPL adalah tahap pelaksanaan. Menurut Mulyono (2008: 22), bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha yang telah dilakukan sebelumnya). Dalam hal ini, pelaksanaan adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam tahap pelaksanaan dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*).

Berdasarkan pedoman pelaksanaan P2KP diketahui bahwa dalam pelaksanaan program KRPL di setiap desa/kelurahan dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat, dan mengutamakan menanam tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat maupun jenis tanaman baru yang memiliki nilai gizi tinggi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Hasibuan (1995: 176), bahwa penggerakan atau pelaksanaan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pelaksanaan program KRPL di Kota Tarakan bisa dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan kerjasama yang baik antara kelompok. Dalam pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 yang berdomisili berdekatan dalam satu desa. Setiap anggota wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi-umbian) ataupun memelihara ternak dan ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

Hal ini juga dipertegas oleh Salam (2004: 20), bahwa pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Semangat dan usaha keras dalam mencapai tujuan program KRPL dapat dilihat dari pelaksanaan program yang cukup berhasil. Setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan

dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri. Pada tahap pelaksanaan ini, sudah dilakukan implementasi program KRPL di Kota Tarakan sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terhadap beberapa kendala dan hambatan yang berkaitan dengan kondisi lapangan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program KRPL di Kota Tarakan antara lain keterbatasan lahan dan berkurangnya penyediaan bantuan anggaran. Untuk dapat terus melaksanakan program secara berkelanjutan, tentunya diperlukan juga anggaran yang tersedia secara kontinyu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi program KRPL di Kota Tarakan sudah berjalan dengan cukup baik. Apabila ditinjau berdasarkan pedoman pelaksanaan program P2KP, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengembangan KRPL dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) pembentukan kelompok, (2) identifikasi kebutuhan, (3) penyusunan rencana kegiatan, (4) Sekolah lapang (SL) dan pelatihan, (5) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (6) pengembangan demplot kelompok dan (7) penataan lingkungan kawasan. KRPL idealnya dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut. Adapun masing-masing tahap tersebut diuraikan sebagaimana berikut :

- 1) Pembentukan kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan sebagaimana pelaksanaan pengorganisasian yang telah dijelaskan sebelumnya.

2) Identifikasi kebutuhan

Langkah selanjutnya apabila kelompok sudah ditetapkan oleh KPA, maka kelompok perlu membuat identifikasi kebutuhan kelompok sebagai salah satu langkah persiapan sebelum melakukan pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan meliputi: kebutuhan sarana, prasarana dan teknologi, serta komoditas tanaman dan air misalnya kebutuhan bibit tanaman, kebun bibit, peralatan dan perlengkapan lainnya. Informasi yang diperlukan termasuk luas kebun bibit, penempatan kebun bibit dan sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

Identifikasi kebutuhan ini dapat diperoleh melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalaman kepada beberapa anggota kelompok pada pertemuan terbatas. Dalam identifikasi juga digali permasalahan dan solusi pemecahan terkait dengan rencana pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan ini diperlukan untuk mendapatkan database karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya di kawasan tersebut sebelum dilakukan kegiatan KRPL. Setiap anggota kelompok dapat mengusulkan kebutuhan untuk masing-masing pekarangannya dalam musyawarah kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

3) Penyusunan rencana kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ditingkat lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahap perencanaan sebelumnya.

4) Sekolah Lapangan (SL) dan Pelatihan Kelompok

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan dengan metode Sekolah Lapangan (SL). Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (Self Learning) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (*from farm to table*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan. Sekolah lapangan dan sosialisasi dilakukan dan dibimbing oleh pendamping P2KP desa kepada para penerima manfaat.

Melalui sekolah lapangan, para penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing bersama-sama oleh penyuluh pendamping P2KP desa/kelurahan maupun kabupaten/kota. Penyusunan RKKA dilakukan setelah ditetapkan CPCL.

Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, yaitu motivasi, kepemimpinan, sikap, dan komunikasi

(Salam, 2004:21). Seluruh faktor tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya Sekolah Lapangan. Sekolah Lapangan P2KP dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan dikembangkan atas dasar pemikiran, bahwa sistem pelatihan tersebut harus mampu mengubah sasaran dari sikap “ketergantungan” (*dependent*) kearah “kemandirian” (*independent*) dan sikap “saling ketergantungan” (*interdependent*) kearah kerja dalam kelompok (*team work*); dari sikap kerja berdasarkan kebiasaan atau pemberian/petunjuk ke arah sikap kerja rasional; dari sekedar bisa bekerja atau terampil ke arah bekerja secara professional (ahli). Tujuan khusus penyelenggaraan Sekolah Lapangan P2KP adalah:

- 1) Membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat.
- 2) Mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola pekarangan.
- 3) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Pelaksanaan SL dilakukan melalui pendampingan yang intensif oleh penyuluh pendamping P2KP desa yang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan, dan tetap berkoordinasi dengan penyuluh pendamping P2KP kabupaten/kota dan

aparatur kabupaten/kota serta provinsi. Sekolah Lapangan P2KP (SL-P2KP) berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi kelompok wanita, sekaligus sebagai media pengambilan keputusan, tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Kelompok SL-P2KP nantinya akan mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan teknis dan ekonomis dalam setiap tahapan kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan serta mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara benar sehingga meningkatkan kualitas konsumsi pangan keluarga dan pendapatannya.

d. Pengawasan Program

Tahap selanjutnya implementasi kebijakan program KRPL adalah pengawasan. Menurut Mulyono (2008: 22), bahwa pengawasan adalah proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi yang mengimplementasikan kebijakan untuk memastikan bahwa jalannya program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan harus dilakukan agar program berhasil. Seorang implementor dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional program, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar. Hal senada juga disampaikan Hasibuan (1995:222) bahwa pengawasan berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan saling mengisi dan tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan. Meskipun masih menghadapi

kendala di lapangan, namun implementasi program KRPL di Kota Tarakan tetap dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dapat diketahui dari keberhasilan program KRPL Kota Tarakan dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian pada data yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan KRPL Kota Tarakan dalam mencapai tujuannya ini dinilai melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala minimal sebanyak dua kali dalam setahun. Monitoring dan evaluasi program KRPL yang telah dilaksanakan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan dengan menggunakan instrumen penilaian.

Selanjutnya Hasibuan (1995: 223), bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pelaksanaan program KRPL sudah dapat dikatakan cukup berhasil dengan pengawasan yang dilaksanakan. Berdasarkan uraian sebelumnya sudah cukup jelas bahwa implementasi kebijakan program KRPL di Kota Tarakan sudah dilaksanakan dengan baik melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program ini dapat dikatakan cukup berhasil karena adanya pencapaian tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan program dapat dikatakan berhasil apabila ada pencapaian terhadap tujuan yang diharapkan.

Apabila dilihat dari makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008: 65) dapat diketahui bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan

Menurut Edward III (dalam Juliartha, 2009: 58) Mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (a) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (b) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III (dalam Juliartha, 2009: 58) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Berikut akan dibahas uraian dari masing-masing kondisi faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi program KRPL di Kota Tarakan sebagai berikut :

a. **Faktor Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan program KRPL. Antara pemegang kebijakan dan pelaksana dilapangan serta kelompok penerima manfaat (kelompok tani wanita) diperlukan komunikasi yang baik sehingga informasi-informasi sehubungan dengan pedoman umum, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana dan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dapat terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam pelaksanaan program. Hal ini di tegaskan oleh Edward III (dalam Juliartha, 2009:58), bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlihat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut ada tiga indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

1) Transmisi

Menurut Winarno (2008:127), bahwa Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transmisi atau penyaluran komunikasi sudah berlangsung dengan baik diantara implementator kebijakan. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program. Setiap minggu juga diadakan rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh. Oleh karena itu, transmisi komunikasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan. Hal senada juga disampaikan oleh Goggin, et al. (1990: 34), bahwa dengan pendekatan komunikasi dengan kejelasan, akurat tentu dalam implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan,

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kejelasan komunikasi sudah berlangsung dengan baik diantara implementator

kebijakan. Dinas selaku penanggung jawab sudah berkomunikasi secara jelas dan akurat. Oleh karena itu, kejelasan komunikasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

3) Konsistensi

Menurut Winarno (2008: 127), bahwa Perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsistensi komunikasi sudah berlangsung dengan baik diantara implementator kebijakan. Dinas yang terkait sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP. Oleh karena itu, konsistensi komunikasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

b. **Faktor Sumber Daya**

Kita ketahui bersama bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sebagaimana di jelaskan oleh Widodo (2001: 73), bahwa jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

1) Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Menurut pendapat Winarno (2008: 132, bahwa salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi dan kecukupan sumber daya manusia sudah baik. Jumlah dan kompetensi staf yang dimiliki untuk implementasi program KRPL sudah cukup memadai. Oleh karena itu, staf dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, hal senada juga dikemukakan oleh Winarno (2008: 134),

bahwa implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan informasi yang diperoleh oleh pelaksana di lapangan sudah baik. Informasi yang diberikan kepada pelaksana di lapangan sudah sesuai dengan pedoman umum, pedoman pelaksana, dan petunjuk teknis yang ada. Oleh karena itu, informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

3) Wewenang

Dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya. Hal senada juga diungkapkan oleh Winarno (2008: 134) implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman pelaksana terhadap wewenang yang dimiliki sudah baik. Pemahaman pelaksana terhadap wewenang sudah sesuai dengan Tupoksi dan

pembagian tugas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fasilitas yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Oleh karena itu, fasilitas dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

c. Faktor Disposisi (sikap)

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi antara lain:

1) Pengangkatan birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Menurut Winarno (2008: 144), bahwa disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengangkatan birokrat sudah dilaksanakan dengan

baik. Dalam pengangkatan birokrat, diberikan pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pengumuman juga dilakukan di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas. Oleh karena itu, pengangkatan birokrat dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

2) Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, hal senada juga disampaikan oleh Winarno (2008: 146). Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi. (Winarno, 2008: 146). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada awalnya sudah ada ketersediaan insentif yang memadai. Namun demikian, pada tahun 2015 tidak ada insentif yang tersedia. Untuk tahun 2013 dan 2014 ada insentif dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada, melainkan hanya bantuan sarana produksi pertanian untuk KRPL dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Oleh

karena itu, kurangnya ketersediaan insentif dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program KRPL.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2008: 151), bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Prosedures* (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

1) *Standard Operating Prosedures* (SOPs)

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum ada SOP yang jelas dalam pelaksanaan program KRPL. Oleh karena itu, tidak adanya SOP dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program KRPL.

2) Fragmentasi

Menurut Winarno (2008:153) bahwa Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Penyebaran tanggungjawab dilakukan sesuai dengan Tupoksi dan dilaksanakan penuh tanggungjawab karena sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dinas. Oleh

karena itu, fragmentasi dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program KRPL.

Keempat faktor tersebut dapat menjadi pendukung ataupun penghambat dari implementasi kebijakan progra KRPL di Kota Tarakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, diperoleh bahwa dalam implementasi program KRPL, lebih banyak faktor pendukung dibandingkan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi program KRPL di Kota Tarakan antara lain aspek transmisi, kejelasan proses informasi, dan konsistensi dalam faktor komunikasi, aspek staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dalam faktor sumber daya pelaksana, aspek pengangkatan birokrat pada faktor disposisi, dan aspek fragmentasi pada faktor struktur birokrasi. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah aspek insentif dalam faktor disposisi dan aspek SOP pada faktor struktur birokrasi.

Hasil identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat menunjukkan bahwa dalam implementasi program KRPL di Kota Tarakan ditemui lebih banyak faktor pendukung dibandingkan dengan faktor penghambat. Hal ini tentunya sangat baik mengingat bahwa faktor-faktor pendukung tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program KRPL di Kota Tarakan. Namun demikian, kedua faktor yang menjadi penghambat tentunya

juga harus mendapatkan perhatian agar implementasi program KRPL di Kota Tarakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan berjalan efektif, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Bentuk tahapan kegiatan implementasi program KRPL adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, serta pengawasan. Tujuan Pemerintah Kota Tarakan melaksanakan program KRPL adalah memotivasi dan memberdayakan masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan seoptimal dan seefisien mungkin untuk menanam sayur-sayuran, buah dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga untuk mendukung Ketahanan Pangan;
2. Ada beberapa kendala yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program KRPL di Kota Tarakan sebagai berikut :
 - a. Komunikasi
 - 1) Dari segi transmisi dapat diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi antara dinas berjalan dengan baik. Sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program. Setiap minggu juga ada rapat

evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh.

- 2) Dari segi kejelasan dapat dipahami bahwa masing-masing pihak sudah berkomunikasi secara jelas dan akurat.
- 3) Dari segi konsistensi dapat dipahami bahwa konsistensi perintah yang diberikan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan kepada aparat pelaksana di lapangan sudah baik. Dinas yang terkait sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP.

b. Sumber Daya

- 1) Dari segi aparat pelaksana, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya pegawai yang menangani KRPL sudah memadai dengan kompetensi yang sesuai di bidangnya.
- 2) Dari segi informasi dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Tarakan kepada pelaksana di lapangan dan masyarakat sudah terlaksana dengan baik, mengacu pada pedoman umum, pedoman pelaksana dan petunjuk teknis yang ada;
- 3) Dari segi wewenang dapat diketahui bahwa masing-masing aparat pelaksana sudah memiliki wewenang masing-masing dan menggunakan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- 4) Dari segi fasilitas dapat diketahui bahwa fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi proram KRPL memadai dan berada dalam kondisi yang baik.

c. Disposisi/Sikap

- 1) Dari segi pengangkatan birokrat, cukup baik. Pengumuman pengangkatan birokrat dilakukan melalui media cetak dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- 2) Dari segi insentif dapat diketahui bahwa pelaksanaan program KRPL tahun 2013 dan tahun 2014 mendapat insentif, sedangkan pelaksanaan tahun 2015 tidak ada, hal ini dapat dijadikan faktor penghambat dalam implementasi program;

d. Struktur Birokrasi

- 1) Dari segi SOP dapat diketahui bahwa belum pernah dibuat SOP mengenai implementasi program KRPL. Hal ini juga dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi program KRPL.
- 2) Dari segi fragmentasi diketahui bahwa struktur organisasi dan pembagian kewenangan dalam implementasi program KRPL sudah jelas, sesuai dengan Tupoksi dan dilaksanakan penuh tanggungjawab.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti terkait dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Walikota Tarakan diharapkan dapat berperan sebagai integrator utama dalam mengoordinasikan program KRPL sebagai salah satu upaya

- diversifikasi pangan , khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*);
2. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi kendala yang ada pada pelaksanaan program KRPL, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara pelaksana lapangan KRPL dan pihak kelompok wanita tani, sehingga ketika ada kendala dilapangan dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan bersama;
 3. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan sebaiknya mengupayakan dan mengusulkan agar ada anggaran yang jelas untuk mendukung implementasi program KRPL di Kota Tarakan;
 4. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan hendaknya mengupayakan penyusunan SOP Program KRPL agar ada prosedur yang pasti dan tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman ketika program tersebut dilaksanakan;
 5. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang relevan terhadap penelitian ini, diharapkan dapat melakukan pengembangan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

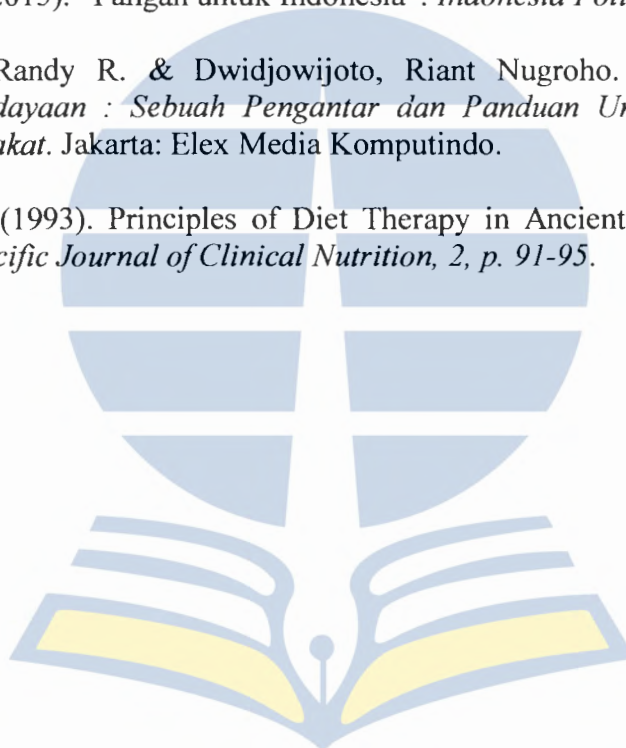
DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Syukur. (1997). *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, H.Buchari. (2012). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ariani, Mewa, dkk. (2003). "Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Pangan di Indonesia. *Forum Agro Ekonomi*. Vol. 21 No 2. Bogor. 2003.
- Boone, Louis & Kurtz, David. (2004). *Contemporary Marketing*. Arkansas: Cengage Learning.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly, Inc
- FAO, (2006). "Food Security". FAO Agricultural and Development Economics Division, *Policy Brief, June 2006, Issue 2*.
- Goggin, Malcolm L, Ann O'M. Bowman, James. P. Lester, and Laurence J. O'Toole. (1990). *Implementation Theory & Practice: Toward a Third Generation*. Illionis: Glenview.
- Griffin, Ricky W. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University.
- Hanafie, Rita. (2012). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi.
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Harahap, Sofyan Syarif. (2004). *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardinsyah. (1996). "Measurement and Determinant of Food Diversity: Implication For Indonesian's Food and Nutrition Policy". *Disertasi Doktor, Faculty of Medicine, University of Queensland*.

- Hasibuan, S.P Malayu. (1995). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hikmat, H. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Juliartha, Edward. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Trio Riba Persada.
- Lipsky, Michael. (1980). *Street-Level Buraucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mariyati, Aprilia Dwi. (2014). "Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Implementasi pada KRPL Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)". *Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No 9 (2014)*.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexdy J.(1999). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Morse, Janice M. (Ed.). (1994). *Critical Issues in Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.
- Mubyarto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi & Organisasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Talcott. (2005). *The Social System*. New York: Free Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabowo, Rossi (2010). "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia". *Mediagro, Vol 6. No 2, 2010, hlm. 62-73*.
- Prijono, Onny S. & Pranarka, A. M. W. 2006. "Pemberdayaan (Empowerment)". *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, hlm. 44-46*.

- Riyadi. (2003). "Kebiasaan Makan Masyarakat dalam Kaitannya dengan Penganekaragaman Konsumsi Pangan". *Prosiding Simposium Pangan dan Gizi serta Kongres IV Bergizi dan Pangan Indonesia*. Jakarta.
- Rohayat, Dede. (2014). "Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Mendorong Kemandirian Anggota Kelompok Tani Bunda Asri di Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong". *Tesis tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Yogyakarta*.
- Rokhmatunnazula, Este. (2015). "Respons Wanita Tani Terhadap Pelaksanaan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dalam Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo". *Tesis tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta*.
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salim, Emil. (2011). *Mengolah Singkong Menjadi Tepung Moka Bisnis Produk Alternatif Pengganti Terigu*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartono. 2008. "Riset dan Konsientisasi: Pendekatan Freirean dalam Konteks Perburuhan". *Artikel Forum Pendamping Buruh Nasional*.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pangan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suprihono, Budi. 2003. "Analisis Efisiensi Usaha Padi pada Lahan Sawah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak". *Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro*.
- Suryaningrat, Bayu. (1999). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suyono. (2002). "Peta Pangan dan program Penganekaragaman Pangan 1939-2002 (63 Tahun)". *Dalam Penganekaragaman Pangan. Prakarsa Swasta dan Pemerintah Daerah. Forum Kerja Penganekaragaman Pangan*. 2003. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Terry, George R. (2011). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society February 1975 6, p. 445-488.*
- Wahab, Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Worldbank. (2015). "Pangan untuk Indonesia". *Indonesia Policy Briefs, 2015.*
- Wrihatnolo, Randy R. & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zhi-chien H. (1993). Principles of Diet Therapy in Ancient Chinese Medicine. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2, p. 91-95.*





UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda

Jl. H.A.M.M. Rifadin, Samarinda Sebrang 75131

Telepon: 0541-7269108, Faksimile: 0541-7269109

E-mail: samarinda@ut.ac.id

Samarinda, 9 September 2015

Nomor : *Yur* UN31.46/LL/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

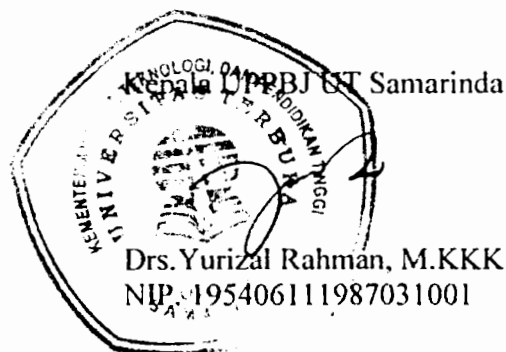
Yth. Kepala Dinas Perternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
di
Tarakan

Sehubungan dengan akan adanya rencana penelitian Tesis yang merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ- UT Samarinda tersebut di bawah ini :

Nama : Hairul Anwar
NIM : 500024915
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik UT
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan Prov.Kaltara.

Untuk keperluan tersebut diatas, kami mohon izin mengadakan penelitian dan permintaan data serta kesediaan untuk menjadi Informan. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak kami mengucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PETERNAKAN DAN TANAMAN PANGAN

Jalan Jendral Sudirman No. 76 Gedung Gadis II Lt. 5 Kota Tarakan

Telp (0551) 212911 Fax (0551) 35532

E-mail : disnaktan@tarakankota.go.id Website : disnaktan.tarakankota.co.id

TARAKAN 77111

Tarakan, 27 Oktober 2015

Kepada

Nomor : 524/2510 /Disnaktan-I

Yth. Sekretariat Daerah Provinsi

Lampiran : -

di -

Perihal : Permohonan Tempat Penelitian

Tanjung Selor

Menindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 848/005/Peg-II/2015 tentang Izin Belajar dan Surat permohonan Sdr. Hairul Anwar, S.Hut tanggal 01 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Tempat Penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut.

Demikian di sampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas



H. Etang Buhana, M.Si
 Pembina Utama Muda

NIP. 19660714 199403 1 014

Tanjung Selor, 01 Oktober 2015

Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : *Permohonan Tempat Penelitian*
Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda

Kepada Yth.
Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

di-
Tarakan

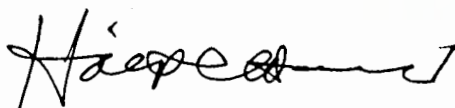
Dengan hormat,

Universitas Terbuka (UT) adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dalam sistem ini kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan mahasiswa. Menjelang akhir masa studi mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Berkaitan dengan hal ini, kami mohon kepada Bapak sekiranya dapat berkenan memberikan ijin sebagai tempat dalam proses penelitian dalam pengambilan data. Adapun ijin belajar dan judul tesis yang akan di teliti sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



Hairul Anwar
NIM. 500024915

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Pegawai Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Tarakan)

1. Apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

2. Bagaimana proses ditunjuknya Kota Tarakan menjadi salah satu kota untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

3. Bagaimana kesiapan Kota Tarakan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik teknis maupun nonteknis?

Jawaban:

4. Menurut Anda, apakah tujuan dilaksanakannya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

5. Siapa saja pihak yang berperan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
6. Apakah kriteria yang diperlukan untuk menjadi Tim Teknis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

7. Bagaimana proses untuk menjadi Tim Teknis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

8. Bagaimana cara pemerintah Kota Tarakan memberikan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

9. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?

Jawaban:

10. Bagaimana cara Kota Tarakan melakukan koordinasi dengan masyarakat agar Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?

Jawaban:

11. Apakah wewenang dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

12. Apa saja kendala/hambatan yang dialami pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

13. Apa saja upaya pemerintah Kota Tarakan dalam menangani kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

14. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

15. Menurut Anda, fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

16. Adakah fasilitas tambahan yang diberikan pemerintah Kota Tarakan jika Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan mengalami kendala?

Jawaban:

17. Menurut Anda, perlukan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

18. Bagaimanakah tujuan strategis/target kerja yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan dalam mengimplemetasikan kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

19. Apa harapan Anda selaku pemerintah Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan dalam penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

20. Menurut Anda, apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan sudah dapat dinyatakan berhasil?

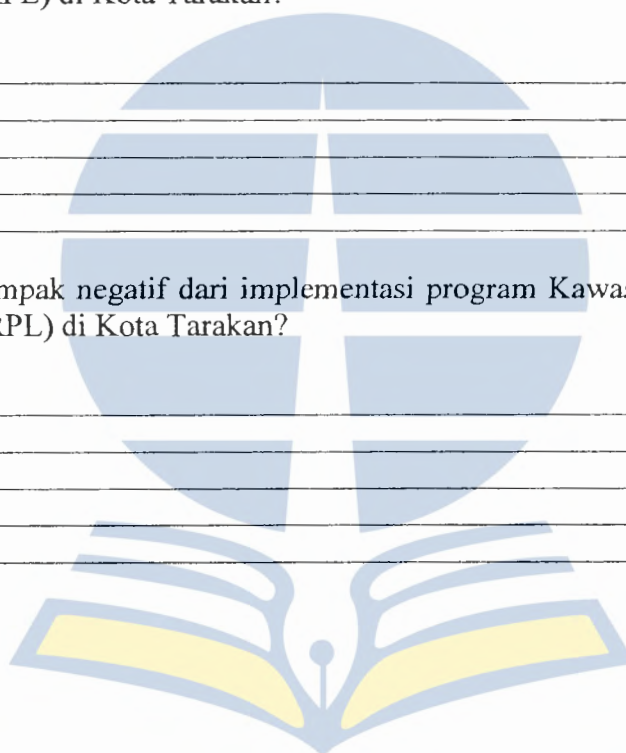
Jawaban:

21. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

22. Apakah dampak negatif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:



PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Tim Teknis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di
Kota Tarakan)

1. Menurut anda selaku Tim Teknis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

2. Apa dampak positif dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

3. Bagaimana kesiapan anda selaku Tim Teknis dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

4. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Tim Teknis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

5. Apa saja yang Anda dapatkan ketika diberikan pelatihan oleh pihak Kota Tarakan dalam rangka implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
6. Bagaimana Anda melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
7. Apakah anda mengalami kendala/hambatan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
8. Bagaimana upaya anda untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
9. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak Tim Teknis dengan dinas dan masyarakat agar Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
10. Apakah fasilitas yang tersedia dalam rangka implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memenuhi harapan?

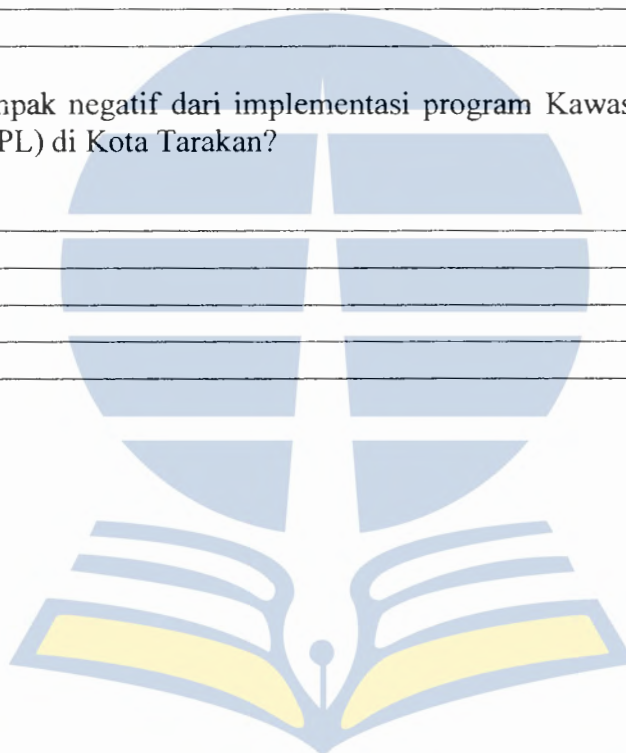
Jawaban:

11. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

12. Apakah dampak negatif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:



PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Pengisian KPRL dan Masyarakat di Kota Tarakan)

1. Apakah pendapat anda tentang dilaksanakannya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

2. Apakah anda setuju dengan adanya program tersebut? Alasannya?

Jawaban:

3. Menurut Anda selaku masyarakat apa dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

4. Bagaimana tahapan pembuatan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

5. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pembuatan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

- _____
- _____
6. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan tim teknis P2KP dalam menangani Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Apakah sudah cukup memuaskan?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
7. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
8. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
- _____
9. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

- _____
- _____
- _____
10. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

11. Apakah dampak negatif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

12. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:



Nama Responden : IR. ELANG BUANA
 Jabatan/Posisi : Kepala dinas Peternakan dan Tanaman Pangan
 Alamat : Kantor Gadis Tarakan
 Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015
 Jam : 11.12 Wita
 Kede : D.WWWC-1,12 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui regulasi tentang kebijakan P2KP terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ya. UU no.18 Th. 2012, PP No.22 Th.2009 dan Permentan N0.43 tentang pangan, percepatan p2kp dan gerakan percepatan p2kp

2. Bagaimana tindak lanjut pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kita adakan rapat internal dengan bidang terkait (ketahanan pangan) untuk melaksanakan perencanaan

3. Bagaimana kesiapan pelaku yang ada dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik teknis maupun nonteknis?

Jawaban:

Kita punya tenaga penyuluh PNS,THL,TBPPatau penyuluh swadaya atau tokoh masyarakat yang bisa dilibatkan dalam program ini

4. Menurut Anda, apakah tujuan yang ingin dicapai pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kota Tarakan?

Jawaban:

Untuk memotivasi masyarakat khususnya kelompok wanita tani (Ibu rumah tangga) untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekeliling rumahnya untuk menanam sayur-sayuran, buah dan ternak guna pemenuhan pangan dan giji keluarga

5. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan untuk mensukseskan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!

Jawaban:

Tahap persiapan : melaksanakan rapat internal di bidang ketahanan pangan untuk membentuk tim seleksi CP/CI , menetapkan tenaga penyuluh lapangan yang mengkoordinir di tingkat kota dan kelurahan dan penanggung jawab kegiatan pelaksanaan dan tenaga monev

Tahap pelaksanaan :

6. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Melaksanakan sosialisasi di tingkat kota, kelurahan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat, alim ulama untuk memberikan pemahaman dan pencerahan tentang tujuan, sasaran dan manfaat program yang akan dilaksanakan

7. Apakah ada dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!

Jawaban:

Ada. Dokumen berupa DIPA/POK bantuan APBN 2013, penetapan penyuluh lapangan dan penetapan CP/CL, rapat-rapat koordinasi

8. Apakah ada pembagian tahapan (skedul) dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada. Mulai tahap persiapan, pelaksanaan, monev dan evaluasi program yang baru akan, telah dan pasca pelaksanaan

9. Siapakah saja sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh masyarakat Kota Tarakan, Pemerintah Kota khususnya Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan yang membidangi Ketahanan Pangan, kelompok wanita tani hasil penetapan CP/CL, Penyuluh lapangan

10. Siapakah penanggungjawab dilapangan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Penyuluh lapangan yang telah di SK-kan untuk pendampingan kelompok

11. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Penanggung jawab Program Kepala dinas (Ir. Elang Buana), Penanggung jawab Kegiatan Kepala Bidang ketahanan Pangan (Ir. Tati), Penanggung jawab administrasi Shinta, SP), koordinator penyuluh (Hari K, S.Pt), dan penyuluh pendamping di tingkat kelurahan

12. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan pengelompokan tugas, maka ada tupoksi masing-masing untuk menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan program

13. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

14. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang sudah dilaksanakan? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Program KRPL tahun 2013 ada bantuan dari APBN untuk 6 kelompok masing-masing 47 juta untuk pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot kelompok. Pada tahun 2014 bantuan dari APBN hanya 3 juta tambahan pengembangan kebun bibit saja, Tahun 2015 ada bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara berupa Bantuan bahan dan alat pertanian

15. Apakah dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Sudah berjalan sesuai dengan rencana namun kendala pendanaan yang harus distimulasi kontinyu. karena program akan berjalan bilamana ada dukungan dana yang cukup

16. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada. Lahan pekarangan yang sangat terbatas sehingga untuk tahap pengembangan mengalami hambatan. Sumber daya penyuluh, dan pendanaan

17. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kelompok Wanita Tani (Ibu rumah tangga) merasakan sangat terbantu dengan adanya program ini, karena untuk kebutuhan pangan sehari-hari tidak harus membeli ke pasar lagi. Cukup pemenuhan dengan mengambil hasil pekarangan yang ada untuk kebutuhan sehari-hari

18. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada. Dan dilakukan monev dan penilaian kelompok yang berprestasi diberikan hadiah dan penghargaan

19. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya. Masyarakat antusias pada program ditandai dengan keanggotaan kelompok yang bertambah dan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat bertambah

20. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada. Setiap semester dilakukan tahun sebelumnya. Tahun ini karena bantuannya berupa bahan dan alat pertanian maka hanya mengecek sejauh mana telah disalurkan ke masyarakat

21. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Meliputi tingkat partisipasi anggota kelompok, pendampingan penyuluh, struktur organisasi, kelengkapan adm kelompok, pertemuan kelompok

22. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik. Sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya.

24. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya

25. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Ya

26. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Sudah sesuai tahun dengan pedoman umum, pedoman pelaksana dan petunjuk teknis tahun 2015

27. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan tufoksi

28. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Fasilitas untuk promosi berupa brosur, leaflet dan buletin ada

29. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan

30. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada untuk tahun 2013 dan 2014 dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada

31. Adakah SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Belum

32. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan tufoksi dan dilaksanakan penuh tanggungjawab

Nama Responden : Ir. Tatik
 Jabatan/Posisi : Kepala Bidang Tanaman Pangan
 Alamat : Kantor Gadis Tarakan
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2015
 Jam : 11.05 Wita
 Kode : D.WWCR-4, 15 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui regulasi tentang kebijakan P2KP terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Tentu tersurat pada UU no.18 Th. 2012, PP No.22 Th.2009 dan Permentan N0.43
2. Bagaimana tindak lanjut pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Karena amanat uu, PP, dan Permentan serta di anggarkan melalui APBN, maka kami merencanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada mengevaluasi
3. Bagaimana kesiapan pelaku yang ada dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik teknis maupun nonteknis?
 Jawaban:
Pelaku kegiatan pendamping lapangan kami siap baik PNS,THL,TBPPatau penyuluh swadaya atau tokoh masyarakat
4. Menurut Anda, apakah tujuan yang ingin dicapai pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kota Tarakan?
 Jawaban:
Membangun peran aktif ibu rumah tangga melalui kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga
5. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan untuk mensukseskan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!
 Jawaban:
Mempersiapkan administrasi SK Penerima manfaat, SK Pendamping, RKKA ,SK Tim seleksi CP/CI
6. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Setelah CP/CL Penerima manfaat ditetapkan dilakukan sosialisasi program
7. Apakah ada dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!
 Jawaban:
Ada. SK Penerima manfaat, SK Pendamping, RKKA
8. Apakah ada pembagian tahapan (skedul) dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada.

9. Siapakah saja sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan yang membidangi Ketahanan Pangan, kelompok wanita tani hasil penetapan CP/CL, Penyuluh lapangan

10. Siapakah penanggungjawab dilapangan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Penyuluh lapangan yang telah di SK-kan untuk pendampingan kelompok

11. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Penanggung Kepala dinas (Ir. Elang Buana), Penanggung jawab Kegiatan Kepala Bidang ketahanan Pangan (Ir. Tatik), Penanggung jawab administrasi Shinta, SP) , koordinator penyuluh (Hari K, S.P), dan penyuluh pendamping di tingkat keurahan

12. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai masing-masing tufuksi

13. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

14. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang sudah dilaksanakan? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Berjalan sesuai dengan perencanaan dan berpedoman pada pedoman umum dan pedoman pelaksanaan P2KP

15. Apakah dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Ya. Walaupun masih ada kendala di lapangan

16. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada. Media tumbuh untuk menanam di pot-pot, cara mengatasinya mencari tanah yang mungkin untuk digunakan

17. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kebutuhan rumah tangga para anggota terutama pemenuhan sayur-sayuran dan kebutuhan dapur lainnya telah tercukupi

18. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada. Dilakukan minimal 2 dalam semester . Ada tim yang dibentuk oleh kota yang ditugaskan

19. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya berhasil. Keanggotaan kelompok bertambah dan partisipasi meningkat

20. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada. Setiap semester dilakukan tahun sebelumnya. Tahun ini karena bantuannya berupa bahan dan alat pertanian maka hanya mengecek sejauh mana telah disalurkan ke masyarakat

21. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Meliputi tingkat partisipasi anggota kelompok, pendampingan penyuluh, struktur organisasi, kelengkapan adm kelompok, pertemuan kelompok

22. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik. Sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya.

24. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya

25. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Ya

26. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Sudah sesuai dengan pedoman umum, pedoman pelaksana dan petunjuk teknis tahun 2015

27. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan tugas dan fungsi

28. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Fasilitas untuk promosi berupa brosur, leaflet dan buletin ada

29. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan

30. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada untuk tahun 2013 dan 2014 dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada

31. Adakah SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL.)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Belum

32. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan tufoksi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab



Nama Responden : Shinta ,SP, MP
 Jabatan/Posisi : Kepala Seksi Tanaman Pangan
 Alamat : Kantor Gadis Tarakan
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2015
 Jam : 15.25 Wita
 Kode : D.WWCR-7, 15 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui regulasi tentang kebijakan P2KP terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Tentu, yaitu UU no.18 Th. 2012, PP No.22 Th.2009 dan Permentan N0.43

2. Bagaimana tindak lanjut pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Untuk tahun 2015 ada bantuan dari provinsi kaltara melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, karena bantuan dari APBN hanya dialokasi tahun 2013 masing-masing kelompok 47 juta, tahun 2014 3 juta per kelompok dari 6 kelompok penerima bantuan dan tahun 2015 dari APBD Provinsi berupa bahan dan alat Pertanian (KRPL), maka kita mengusulkan ke Provinsi dan dapat bantuan

3. Bagaimana kesiapan pelaku yang ada dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik teknis maupun nonteknis?

Jawaban:

Tenaga penyuluh lapangan siap memfasilitasi dan selalu berkoordinasi

4. Menurut Anda, apakah tujuan yang ingin dicapai pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kota Tarakan?

Jawaban:

Pemenuhan kebutuhan pangan keluarga berupa sayur-mayur, lombok, seletri,kacang, kemangi dll,bertujuan untuk menekan pengeluaran rumah tangga dari sisi pangan

5. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan untuk mensukseskan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!

Jawaban:

Tahap persiapan : melaksanakan rapat internal di bidang ketahanan pangan untuk membentuk tim seleksi CP/CI , menetapkan tenaga penyuluh lapangan yang mengkoordinir di tingkat kota dan kelurahan

6. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Melaksanakan sosialisasi di tingkat kota, kelurahan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat, alim ulama untuk memberikan pemahaman dan pencerahan tentang tujuan, sasaran dan manfaat program yang akan dilaksanakan

7. Apakah ada dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!

Jawaban:

Ada. Dokumen berupa SK-SK penerima manfaat, pendamping, format RKKA, Keanggotaan Kelompok, susunan pengurus dll

8. Apakah ada pembagian tahapan (skedul) dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada. Mulai tahap persiapan, pelaksanaan, monev dan evaluasi program yang baru akan, telah dan pasca pelaksanaan

9. Siapakah saja sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh masyarakat Kota Tarakan, Pemerintah Kota khususnya Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan yang membidangi Ketahanan Pangan, kelompok wanita tani hasil penetapan CP/CL, Penyuluh lapangan

10. Siapakah penanggungjawab dilapangan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Penyuluh lapangan yang telah di SK-kan untuk pendampingan kelompok

11. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Penanggung jawab Program Kepala dinas (Ir. Elang Buana), Penanggung jawab Kegiatan Kepala Bidang ketahanan Pangan (Ir. Tati), Penanggung jawab lapangan sdr. Shinta, SP), koordinator penyuluh (Hari), dan penyuluh pendamping di tingkat kelurahan

12. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan pengelompokan tugas, maka ada tupoksi masing-masing untuk menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan program

13. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

14. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang sudah dilaksanakan? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Berjalan dengan baik berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan P2KP

15. Apakah dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Sudah berjalan sesuai dengan rencana namun kendala pendanaan yang harus di stimulasi kontinyu. karena program akan berjalan bilamana ada dukungan dana yang cukup

16. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada. Lahan pekarangan yang sangat terbatas sehingga untuk tahap pengembangan mengalami hambatan.

17. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kelompok Wanita Tani (Ibu rumah tangga) merasakan sangat terbantu dengan adanya program ini, karena untuk kebutuhan pangan sehari-hari tidak harus membeli ke pasar lagi. Cukup pemenuhan dengan mengambil hasil pekarangan yang ada untuk kebutuhan sehari-hari

18. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada. Dilakukan oleh tim yang di bentuk kepala dinas dan melibatkan personil intern

19. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya. Masyarakat antusias pada program ditandai dengan keanggotaan kelompok yang bertambah dan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat bertambah

20. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada. Setiap semester dilakukan tahun sebelumnya. Tahun ini karena bantuannya berupa bahan dan alat pertanian maka hanya mengecek sejauh mana telah disalurkan ke masyarakat

21. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Meliputi tingkat partisipasi anggota kelompok, pendampingan penyuluh, struktur organisasi, kelengkapan adm kelompok, pertemuan kelompok

22. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik. Sering diadakan pertemuan konsolidasi untuk percepatan program

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya.

24. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya

25. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Ya

26. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Sudah sesuai tahun dengan pedoman umum, pedoman pelaksana dan petunjuk teknis tahun 2015

27. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan tufuksi

28. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Fasilitas untuk promosi berupa brosur, leaflet dan buletin ada

29. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan

30. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada untuk tahun 2013 dan 2014 dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada

31. Adakah SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

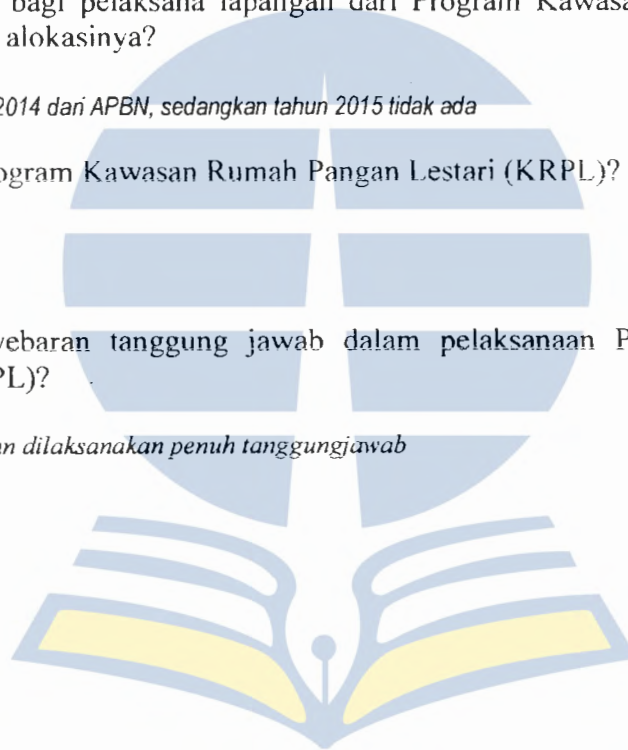
Jawaban:

Belum

32. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan tufoksi dan dilaksanakan penuh tanggungjawab



Nama Responden : Ir. Toto
 Jabatan/Posisi : Kepala Seksi Perkebunan
 Alamat : Kantor Gadis Tarakan
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2015
 Jam : 14.20 Wita
 Kode : D.WWCR-10, 15 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui regulasi tentang kebijakan P2KP terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Jelas sebagai dasar pelaksanaan yakni : UU no.18 Th. 2012, PP No.22 Th.2009 dan Permentan N0.43 tentang pangan, percepatan p2kp dan gerakan percepatan p2kp

2. Bagaimana tindak lanjut pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Untuk tahun 2013 dan 2014 berasal dari APBN, kami mempersiapkan Administrasi pendukung dan CP/CI lokasi penerima

3. Bagaimana kesiapan pelaku yang ada dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik teknis maupun nonteknis?

Jawaban:

Personil penyuluh siap untuk pendampingan dalam program ini

4. Menurut Anda, apakah tujuan yang ingin dicapai pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kota Tarakan?

Jawaban:

Ibu rumah tangga kelompok wanita tani penerima manfaat bisa menggunakan bantuan untuk mengembangkan lahan pekarangan mereka untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga

5. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan untuk mensukseskan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!

Jawaban:

Menyiapkan kelengkapan administrasi berupa SK penerima manfaat, SK Pendamping, Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Teknis P2KP

6. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Melaksanakan sosialisasi di tingkat kota, kelurahan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat, alim ulama untuk memberikan pemahaman dan pencerahan tentang tujuan, sasaran dan manfaat program yang akan dilaksanakan

7. Apakah ada dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!

Jawaban:

Ada. Dokumen berupa DIPA/POK bantuan APBN 2013, penetapan penyuluh lapangan dan penetapan CP/CL

8. Apakah ada pembagian tahapan (skedul) dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada. Mulai tahap persiapan, pelaksanaan, monev dan evaluasi program yang baru akan, telah dan pasca pelaksanaan

9. Siapakah saja sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Diupayakan Seluruh masyarakat Kota Tarakan, pegawai terkait Program yang ada di pemkot yang membidangi Ketahanan Pangan, kelompok wanita tani hasil penetapan CP/CL, Penyuluh lapangan

10. Siapakah penanggungjawab dilapangan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Penyuluh lapangan yang telah di SK-kan untuk pendampingan kelompok

11. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Penanggung jawab Program Kepala dinas (Ir. Elang Buana), Penanggung jawab Kegiatan Kepala Bidang ketahanan Pangan (Ir. Tati), Penanggung jawab administrasi (Shinta, SP), koordinator penyuluh (HariK, S.P), dan penyuluh pendamping di tingkat kelurahan

12. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan pengelompokan tugas, maka ada tupoksi masing-masing untuk menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan program

13. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

14. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang sudah dilaksanakan? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Program KRPL tahun 2013 ada bantuan dari APBN untuk 6 kelompok masing-masing 47 juta untuk pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot kelompok. Pada tahun 2014 bantuan dari APBN hanya 3 juta tambahan pengembangan kebun bibit saja, Tahun 2015 ada bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara berupa Bantuan bahan dan alat pertanian

15. Apakah dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Sudah berjalan sesuai dengan rencana namun kendala pendanaan yang harus distimulasi kontinyu, karena program akan berjalan bilamana ada dukungan dana yang cukup

16. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada. Lahan pekarangan yang sangat terbatas sehingga untuk tahap pengembangan mengalami hambatan. Sumber daya penyuluh, dan pendanaan

17. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kelompok Wanita Tani (Ibu rumah tangga) merasakan sangat terbantu dengan adanya program ini, karena untuk kebutuhan pangan sehari-hari tidak harus membeli ke pasar lagi. Cukup pemenuhan dengan mengambil hasil pekarangan yang ada untuk kebutuhan sehari-hari

18. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada. Di lakukan oleh tim yang di bentuk dari dinas dandi dampingi oleh penyuluh lapangan

19. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Sudah. Partisipasi masyarakat khususnya kelompok wanita tani keanggotaan bertambah terus

20. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada. Setiap semester dilakukan tahun sebelumnya. Tahun ini karena bantuannya berupa bahan dan alat pertanian mka hanya mengecek sejauh mana telah disalurkan ke masyarakat

21. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Meliputi tingkat partisipasi anggota kelompok, pendampingan penyuluh, struktur organisasi, kelengkapan adm kelompok, pertemuan kelompok

22. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik. Sering diadakan pertemuan di dinas untuk membahas tindakan percepatan program

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Dapat. saling berkoordinasiterkait program

24. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Sudah. Terutama dalam pencapaian target

25. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Mencukupi terutama pendamping di kelurahan program KRPL

26. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
Jawaban:
Sudah sesuai tahun dengan pedoman umum, pedoman pelaksana dan petunjuk teknis tahun 2015
27. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?
Jawaban:
Ya sesuai dengan tufuksi
28. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?
Jawaban:
Fasilitas untuk promosi berupa brosur, leaflet dan buletin ada
29. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Pengumuman melalui media cetak dan pengumuman dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan
30. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?
Jawaban:
Ada untuk tahun 2013 dan 2014 dari APBN, sedangkan tahun 2015 tidak ada
31. Adakah SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!
Jawaban:
Belum
32. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Sesuai dengan tufuksi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab

Nama Responden : Titik Mulyati, A.Md
 Jabatan/Posisi : Penyuluh Pendamping Kelompok Wanita Tani "Dahlia"
 Alamat : Tarakan
 Hari/Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2015
 Jam : 15.25 Wita
 Kode : D.WWCR-5, 02 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Menurut anda selaku Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Tentu, untuk memotifasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga

2. Bagaimana kesiapan anda selaku Penyuluh dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis p2kp tahun 2015

3. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Melaksanakan pertemuan sosialisasi p2kp pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman

4. Bagaimanakah perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!

Jawaban:

Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat (Kelompok wanita tani)

5. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan

6. Adakah dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!

Jawaban:

Ada. Proposal usulan Kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, sk dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, adm. surat masuk/keluar kelompok

7. Adakah pembagian tahap dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada. tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan

8. Siapakah sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Penyuluh lapangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL
9. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
Jawaban:
Kepala Bidang
10. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!
Jawaban:
Ada . secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan
11. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!
Jawaban:
Ada. Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev
12. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Kepala Dinas
13. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut? Mohon jelaskan!
Jawaban:
Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat
14. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?
Jawaban:
Ya namun tidak semuanya. Hal ini tergantung situasi di lapangan
15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?
Jawaban:
Ada . mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang refresentatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin
16. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
Jawaban:
Dapat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur

17. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada dari dinas Peternakan dan tanaman pangan Kota Tarakan

18. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok.

19. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada yang dibentuk oleh dinas.

20. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL

21. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik . setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh

22. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya . Berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP

24. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Cukup memadai

25. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Ya. Berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015

26. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan

27. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Ya. bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik

28. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Di umumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

29. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan saprotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara

30. Apakah ada SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Belum ada

31. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dinas

Nama Responden : Sudirman
 Jabatan/Posisi : Penyuluh Pendamping Kelompok Wanita Tani "Hidayatullah"
 Alamat : Tarakan
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 08.25 Wita
 Kode : D.WWCR-8, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Menurut anda selaku Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Tentu, untuk memotifasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga
2. Bagaimana kesiapan anda selaku Penyuluh dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis p2kp tahun 2015
3. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Melaksanakan pertemuan sosialisasi p2kp pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman
4. Bagaimanakah perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!
 Jawaban:
Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat (Kelompok wanita tani)
5. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan
6. Adakah dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!
 Jawaban:
Ada. Proposal usulan Kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, sk dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, adm. surat masuk/keluar kelompok
7. Adakah pembagian tahap dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada. tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan

8. Siapakah sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Penyuluh lapangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL

9. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kepala Bidang

10. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada . secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan

11. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev

12. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

13. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat

14. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Ya namun tidak semuanya. Hal ini tergantung situasi di lapangan

15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada . mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang representatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin

16. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Dapat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur

17. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada dari dinas Peternakan dan tanaman pangan Kota Tarakan

18. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok.

19. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada yang dibentuk oleh dinas.

20. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL

21. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik . setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh

22. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya . Berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP

24. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Cukup memadai

25. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Ya. Berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015

26. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan

27. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Ya. bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik

28. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Di umumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

29. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan sprotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara

30. Apakah ada SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Belum ada

31. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dias

Nama Responden : Ira Yuniarsih, SP
 Jabatan/Posisi : Penyuluh Pendamping Kelompok Wanita Tani "Kampung Melati"
 Alamat : Tarakan
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 15.25 Wita
 Kode : D.WWCR-13, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Menurut anda selaku Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Tentu, untuk memotifasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga
2. Bagaimana kesiapan anda selaku Penyuluh dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis p2kp tahun 2015
3. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Melaksanakan pertemuan sosialisasi p2kp pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman
4. Bagaimanakah perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!
 Jawaban:
Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat (Kelompok wanita tani)
5. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan
6. Adakah dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!
 Jawaban:
Ada. Proposal usulan Kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, sk dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, adm. surat masuk/keluar kelompok
7. Adakah pembagian tahap dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada. tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan

8. Siapakah sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Penyuluh lapangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL

9. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kepala Bidang

10. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada . secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan

11. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev

12. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

13. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat

14. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Ya namun tidak semuanya. Hal ini tergantung situasi di lapangan

15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada . mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang refresentatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin

16. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Dapat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur

17. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada dari dinas Peternakan dan tanaman pangan Kota Tarakan

18. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok.

19. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada yang dibentuk oleh dinas.

20. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL

21. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik . setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh

22. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya . Berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP

24. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Cukup memadai

25. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
Jawaban:
Ya. Berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015
26. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?
Jawaban:
Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan
27. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?
Jawaban:
Ya. bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik
28. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Di umumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
29. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?
Jawaban:
Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan saprotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara
30. Apakah ada SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!
Jawaban:
Belum ada
31. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dias

Nama Responden : Hari Suyanto. SP
 Jabatan/Posisi : Penyuluh Pendamping Kelompok Wanita Tani "PKK Kampung VI"
 Alamat : Tarakan
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 12.20 Wita
 Kode : D.WWCR-2, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Menurut anda selaku Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Tentu, untuk memotifasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga
2. Bagaimana kesiapan anda selaku Penyuluh dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis p2kp tahun 2015
3. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Melaksanakan pertemuan sosialisasi p2kp pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman
4. Bagaimanakah perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!
 Jawaban:
Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis , pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat (Kelompok wanita tani)
5. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan
6. Adakah dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!
 Jawaban:
Ada. Proposal usulan Kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, sk dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, adm. surat masuk/keluar kelompok
7. Adakah pembagian tahap dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada . tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan

8. Siapakah sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Penyuluh lapangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL

9. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kepala Bidang

10. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada . secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan

11. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev

12. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

13. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat

14. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Ya namun tidak semuanya. Hal ini tergantung situasi di lapangan

15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada . mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang refresentatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin

16. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Dapat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur

17. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada dari dinas Peternakan dan tanaman pangan Kota Tarakan

18. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok.

19. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada yang dibentuk oleh dinas.

20. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL

21. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik . setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh

22. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya . Berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP

24. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Cukup memadai

25. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Ya. Berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015

26. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan

27. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Ya. bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik

28. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Di umumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

29. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan saprotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara

30. Apakah ada SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Belum ada

31. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dinas

Nama Responden : Damiran
 Jabatan/Posisi : Penyuluh Pendamping Kelompok Wanita Tani "Kecubung"
 Alamat : Tarakan
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 14.25 Wita
 Kode : D.WWCR-15, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Menurut anda selaku Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Tentu, untuk memotifasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga
2. Bagaimana kesiapan anda selaku Penyuluh dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis p2kp tahun 2015
3. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Melaksanakan pertemuan sosialisasi p2kp pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman
4. Bagaimanakah perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!
 Jawaban:
Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis , pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat (Kelompok wanita tani)
5. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan
6. Adakah dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!
 Jawaban:
Ada. Proposal usulan Kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, sk dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, adm. surat masuk/keluar kelompok
7. Adakah pembagian tahap dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada . tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan

8. Siapakah sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Penyuluh lapangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL

9. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kepala Bidang

10. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada . secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan

11. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada. Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev

12. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

13. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat

14. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Ya namun tidak semuanya. Hal ini tergantung situasi di lapangan

15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada . mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang refresentatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin

16. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Depat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur

17. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada dari dinas Peternakan dan tanaman pangan Kota Tarakan

18. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terbilang berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok.

19. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada yang dibentuk oleh dinas.

20. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL

21. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik . setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh

22. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya . Berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP

24. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?

Jawaban:

Cukup memadai

25. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Ya. Berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015

26. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?

Jawaban:

Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan

27. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?

Jawaban:

Ya. bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik

28. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Di umumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

29. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?

Jawaban:

Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan saprotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara

30. Apakah ada SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Belum ada

31. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dias

Nama Responden : Wijaya T. S.Hut
 Jabatan/Posisi : Penyuluh P2KP Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan
 Alamat : Tarakan
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 10.45 Wita
 Kode : D.WWCR-11, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Menurut anda selaku Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Tentu, untuk memotifasi peran aktif masyarakat kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran, umbi dan ternak guna pemenuhan pangan dan gizi keluarga

2. Bagaimana kesiapan anda selaku Penyuluh dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Dengan mempelajari pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis p2kp tahun 2015

3. Bagaimana proses ditunjuknya Anda sebagai Penyuluh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Melaksanakan pertemuan sosialisasi p2kp pada masyarakat, pembuatan RKKA kelompok, pendampingan pelaksanaan pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot tanaman

4. Bagaimanakah perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon dijelaskan!

Jawaban:

Perencanaan dimulai dengan tahapan persiapan sosialisasi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, pembuatan RKKA kepada kelompok penerima manfaat (Kelompok wanita tani)

5. Langkah apakah yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Sosialisasi tentang program P2KP khususnya optimalisasi pengembangan pekarangan, membuat rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan belanja kelompok, penanaman dan pemeliharaan

6. Adakah dokumen perencanaan yang disusun terkait Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan, bentuk dokumen tersebut!

Jawaban:

Ada. Proposal usulan Kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, visi misi kelompok, kelembagaan, SK dan berita acara pembentukan kelompok, buku rekening kelompok, adm. surat masuk/keluar kelompok

7. Adakah pembagian tahap dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada . tahapan awal penyiapan media tumbuh, pembibitan, penanaman dan perawatan

8. Siapakah sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Seluruh pegawai dalam lingkup bidang ketahanan kota Tarakan, Penyuluh lapangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada pada KRPL

9. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Kepala Bidang

10. Adakah pengelompokan tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada . secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing personil yang di tunjuk oleh kepala dinas melalui surat penetapan

11. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Ada . Sesuai dengan peran masing-masing dalam program, seperti yang bertanggungjawab di administrasi, pelaksanaan, monev

12. Siapakah yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Kepala Dinas

13. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

Cukup berhasil bila di dukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah, sebaliknya bila tidak jalan di tempat

14. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya?

Jawaban:

Ya . namun tidak semuanya. Hal ini tergantung situasi di lapangan

15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Ada . mencari lahan untuk kebun bibit dan demplot yang refesentatif. Solusinya memanfaatkan lahan yang ada seefektif mungkin

16. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Dapat menekan pengeluaran untuk pembelian kebutuhan konsumsi dan gizi rumah tangga terutama sayur-mayur

17. Adakah pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana pengawasan dilakukan? Siapa yang melaksanakan pengawasan dan monitoring tersebut?

Jawaban:

Ada dari dinas Peternakan dan tanaman pangan Kota Tarakan

18. Apakah pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah terhitung berhasil? Apa indikator keberhasilannya?

Jawaban:

Ya cukup berhasil ditandainya dengan masyarakat wanita tani memahami program KRPL dan mengerti manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Semakin banyaknya partisipasi ibu rumah tangga masuk keanggotaan kelompok.

19. Adakah evaluasi yang dilaksanakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Siapa yang melaksanakan evaluasi tersebut? Bagaimana metode evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?

Jawaban:

Ada yang dibentuk oleh dinas.

20. Adakah instrumen penilaian yang digunakan dalam evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana bentuk instrumen tersebut?

Jawaban:

Ada. Keanggotaan kondisi awal dan akhir, kelembagaan, keadministrasian dan partisipasi dan peran aktif dari anggota kelompok pada program KRPL

21. Bagaimanakah penyaluran komunikasi antara dinas yang terkait dengan penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Baik . setiap minggu ada rapat evaluasi program KRPL yang difasilitasi oleh dinas dengan melibatkan penyuluh

22. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkomunikasi secara jelas dan akurat?

Jawaban:

Ya

23. Apakah dinas yang terkait dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memberikan instruksi yang jelas kepada pelaksana di lapangan?

Jawaban:

Ya . Berdasarkan SK Penunjukan Pendampingan P2KP

24. Apakah staf yang menjadi pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memadai, mencukupi, dan kompeten dibidangnya?
Jawaban:
Cukup memadai
25. Apakah pelaksana di lapangan sudah memperoleh informasi yang tepat mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
Jawaban:
Ya. Berpedoman pada pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan KRPL tahun 2015
26. Apakah pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah memahami dan melaksanakan wewenangnya masing-masing dengan baik?
Jawaban:
Ya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan
27. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah tersedia? Apa saja fasilitas tersebut? Bagaimana kondisinya?
Jawaban:
Ya. bahan dan alat dari bantuan APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan kondisi baik
28. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan personil yang menjadi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Di umumkan melalui surat kabar setempat, pengumuman di kantor dinas, diseleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
29. Apakah ada insentif bagi pelaksana lapangan dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Bagaimana alokasinya?
Jawaban:
Ada pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak dapat yang ada hanya bantuan saporotan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara
30. Apakah ada SOP dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Mohon jelaskan!
Jawaban:
Belum ada
31. Bagaimanakah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
Jawaban:
Sesuai dengan hasil rapat dan penunjukan dari kepala dias

Nama Responden : Susini Suwandi
 Jabatan/Posisi : Ketua kelompok Wanita Tani Dahlia
 Alamat : Jl. Cendrawasih Blok C.1 RT.07.No. 25 Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara
 Hari/Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2015
 Jam : 15.25 Wita
 Kode : D.WWCR-3, 02 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa pendapat anda dan setujuakah anda dengan adanya program P2KP tersebut? Alasannya?
 Jawaban:
P2KP adalah program pemerintah berupa bansos untuk memberdayakan ibu rumah tangga menanam sayur-mayur di pekarangan. Kami setuju dan mendukung program P2KP tersebut

2. Menurut Anda selaku penerima manfaat apakah ada dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Tentu positif sekali, karena kita ibu-ibu di lingkungan ini sudah merasakan manfaat KRPL yaitu untuk kebutuhan sayur-mayur kami tidak perlu membeli lagi ke pasar, banyak manfaat yang dapat diperoleh bukan hanya produk sayuran tapi silaturahmi yang lebih luas

3. Bagaimana tahapan perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Tahapan awal setelah kami mendapat sosialisasi dari penyuluh kota dan kelurahan, maka kami berinisiatif mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kerja anggota, pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas terkait

4. Apakah ada fasilitas dibantu yang digunakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada dari bantuan APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian untuk mendukung program KRPL

5. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Setelah rencana kerja anggota di sepakati lalu kelompok membeli kebutuhan sesuai dengan RKA yang ada. Penyiapan lahan untuk pengembangan pekarangan, kebun bibit dan demplot kelompok. Pembibitan dapat dilakukan

6. Siapakah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Tim movev yang di tetapkan oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan

7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas dan aparat pemerintah terkait terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada minimal 2 kali dalam setahun

8. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ya. Terutama pada penyediaan media tumbuh yang digunakan mengisi polibag serta musim kemarau yang berkepanjangan saat ini

9. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan penyuluh P2KP dalam menangani Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Apakah sudah cukup memuaskan?

Jawaban:

Cukup baik

10. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Bantuan pendanaan untuk pengembangan pekarangan anggota kelompok, dan kebun bibit

11. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

Ya melalui penyuluh lapangan yang ada

12. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi berupa :polibag, gantung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer. Sedangkan dari APBN tahun 2015 tidak ada

13. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

Kelompok ibu rumah tangga dapat menekan pengeluaran belanja kebutuhan sayur-mayur sehari-hari, bahkan melalui kebun bibit hasilnya dapat kita jual ke perusahaan

14. Apa harapan anda selaku penerima manfaat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Program ini sangat baik dan membantu ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok KRPL dan diupayakan program ini selalu di support oleh pemerintah baik pendampingan dilapangan maupun pendanaannya

Nama Responden : Fenny
 Jabatan/Posisi : Ketua Kelompok Wanita Tani Kecubung
 Alamat : Jl. Mulawarman RT.44 Kelurahan Karang anyar , Tarakan Barat
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 14.25 Wita
 Kode : D.WWCR-6, 02 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa pendapat anda dan setujukah anda dengan adanya program P2KP tersebut? Alasannya?
 Jawaban:
P2KP adalah program pemerintah untuk kelompok wanita tani membantu pengembangan pekarangan rumah agar dapat bermanfaat untuk keluarga. Setuju sangat membantu keuangan rumah tangga
2. Menurut Anda selaku penerima manfaat apakah ada dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Ada dampak positif karena keperluan dan kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran sudah dapat terpenuhi dari lahan pekarangan yang dikembangkan
3. Bagaimana tahapan perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Setelah mendapat sosialisasi dari penyuluh kota dan kelurahan, maka kami berinisiatif mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kerja anggota, pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas
4. Apakah ada fasilitas dibantu yang digunakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada, dari APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian untuk mendukung program KRPL, pelaksanaan APBN tahun 2013 bansos sebesar 47 juta dan tahun 2014 sebesar 3 juta untuk pengembangan kebun bibit
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Rapat kelompok untuk membuat Rencana kebutuhan anggaran. pengusulan ke dinas terkait, penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan panen
6. Siapakah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Tim yang dibentuk dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas dan aparat pemerintah terkait terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada minimal 2 kali dalam setahun
8. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada, pengetahuan tentang bercocok tanam sayuran yang masih minim dan perlu pendamping dari penyuluh

10. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pelatihan pengembangan SDM bagi kelompok belum pernah ada dari program

11. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

Ya melalui penyuluh lapangan yang ada, brosur, leaflet dan buletin

12. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi berupa :polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer dirasakan sangat membantu untuk pengembangan kebun bibit

13. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

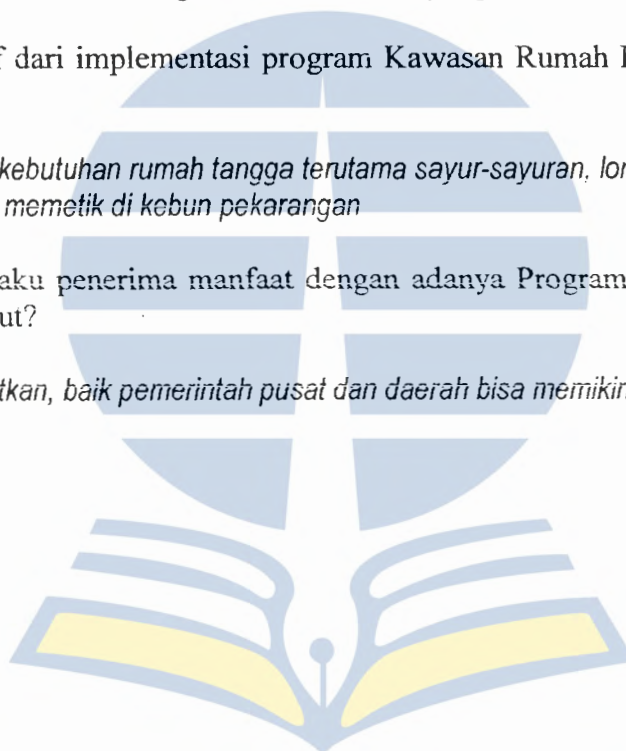
Jawaban:

Setelah ada program ini kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran, lumbak dll tidak perlu lagi untuk membeli ke pasar cukup memetik di kebun pekarangan

14. Apa harapan anda selaku penerima manfaat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Program ini perlu dilanjutkan, baik pemerintah pusat dan daerah bisa memikirkan keberlangsungannya



Nama Responden : Hapsa
 Jabatan/Posisi : Ketua Kelompok Wanita Tani Hidayatullah
 Alamat : Jl. P.Hidayatullah RT.10/20 Kelurahan Mamburungan Timur , Tarakan Timur
 Hari/Tanggal : Sabtu ,03 Oktober 2015
 Jam : 08.25 Wita
 Kode : D.WWCR-16, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa pendapat anda dan setujuakah anda dengan adanya program P2KP tersebut? Alasannya?

Jawaban:

P2KP adalah program pemerintah untuk membantu ibu rumah tangga mengembangkan pekarangan rumah agar dapat bermanfaat untuk keluarga. Setuju membantu rumah tangga

2. Menurut Anda selaku penerima manfaat apakah ada dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Ada karena keperluan dan kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran sudah dapat terpenuhi dari lahan pekarangan rumah

3. Bagaimana tahapan perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Setelah mendapat sosialisasi dari penyuluh kota dan kelurahan, maka kelompok mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kerja anggota, pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas

4. Apakah ada fasilitas dibantu yang digunakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada, dari APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian untuk mendukung program KRPL, pelaksanaan APBN tahun 2013 bansos sebesar 47 juta dan tahun 2014 sebesar 3 juta untuk pengembangan kebun bibit

5. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Rapat kelompok untuk membuat Rencana kebutuhan anggaran, pengusulan ke dinas terkait, penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan panen

6. Siapakah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Tim dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan

7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas dan aparat pemerintah terkait terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada 2 kali dalam setahun

8. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada, menyediakan media tumbuh untuk digunakan di polibag

9. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan penyuluh P2KP dalam menangani Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Apakah sudah cukup memuaskan?

Jawaban:

Pelayanan penyuluh cukup maksimal, dan perlu ditingkatkan lagi

10. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pelatihan pengembangan SDM bagi kelompok belum pernah ada dari program dan perlu diadakan

11. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

Ya melalui penyuluh lapangan yang ada, brosur, leaflet dan buletin

12. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi berupa :polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer dirasakan sangat membantu untuk pengembangan kebun bibit

13. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

Setelah ada program ini kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran, lomba dll tidak perlu lagi untuk membeli ke pasar cukup memetik di kebun pekarangan

14. Apa harapan anda selaku penerima manfaat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Program ini perlu dilanjutkan dan di bantu dana yang lebih besar lagi porsinya

Nama Responden : Sumiati
 Jabatan/Posisi : Ketua Kelompok Wanita Tani Kampung Melati
 Alamat : Jl. P. Nunukan RT.17 Kelurahan Kampung I/SKIP Kec. Tarakan Timur
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 15.25 Wita
 Kode : D.WWCR-12, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa pendapat anda dan setujukah anda dengan adanya program P2KP tersebut? Alasannya?
 Jawaban:
P2KP adalah program pemerintah untuk penganekaragaman konsumsi pangan diperuntukkan bagi kelompok wanita tani. Setuju untuk membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga
2. Menurut Anda selaku penerima manfaat apakah ada dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Jelas ada. Kami diajarkan cara bercocok tanam sayuran di pekarangan
3. Bagaimana tahapan perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Setelah mendapat penjelasan dari penyuluh, maka kami mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kerja anggota, pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas
4. Apakah ada fasilitas dibantu yang digunakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada, dari APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian untuk mendukung program KRPL, pelaksanaan APBN tahun 2013 bansos sebesar 47 juta dan tahun 2014 sebesar 3 juta untuk pengembangan kebun bibit
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Rapat kelompok untuk membuat Rencana kebutuhan anggaran, pengusulan ke dinas terkait, penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan panen
6. Siapakah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Tim yang dibentuk dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas dan aparat pemerintah terkait terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada minimal 2 kali dalam setahun
8. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada, pengetahuan tentang bercocok tanam sayuran yang masih minim dan perlu pendamping dari penyuluh

9. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan penyuluh P2KP dalam menangani Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Apakah sudah cukup memuaskan?

Jawaban:

Pendampingan dari penyuluh cukup maksimal, dan perlu ditingkatkan lagi

10. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pelatihan pengembangan SDM bagi kelompok belum pernah ada dari program

11. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

Ya melalui penyuluh lapangan yang ada, brosur, leaflet dan buletin

12. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi berupa :polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer dirasakan sangat membantu untuk pengembangan kebun bibit

13. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

Setelah ada program ini kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran, tidak perlu lagi untuk membeli ke pasar cukup memetik di lahan pekarangan

14. Apa harapan anda selaku penerima manfaat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Program ini perlu dilanjutkan dan dibantu dana yang lebih memadai lagi

Nama Responden : Salbiah
 Jabatan/Posisi : Ketua Kelompok Wanita Tani Mamburungan
 Alamat : Jl. Sei Sembakung RT.08 Kel. Mamburungan, Tarakan Timur
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 10.45 Wita
 Kode : D.WWCR-9, 03 Oktober 2015

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa pendapat anda dan setujuakah anda dengan adanya program P2KP tersebut? Alasannya?
 Jawaban:
P2KP adalah program pemerintah untuk kelompok wanita tani untuk penganeekaragaman konsumsi melalui pengembangan pekarangan rumah agar dapat bermanfaat untuk keluarga. Setuju sangat membantu

2. Menurut Anda selaku penerima manfaat apakah ada dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?
 Jawaban:
Ada dampak positif karena keperluan dan kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran sudah dapat terpenuhi dari lahan pekarangan yang dikembangkan

3. Bagaimana tahapan perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Setelah sosialisasi dari penyuluh P2KP, maka kami mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kerja anggota, pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas

4. Apakah ada fasilitas dibantu yang digunakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada, dari APBD Provinsi berupa bahan dan alat pertanian untuk mredukung program KRPL, pelaksanaan APBN tahun 2013 bansos sebesar 47 juta dan tahun 2014 sebesar 3 juta untuk pengembangan kebun bibit

5. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Rapat kelompok untuk membuat Rencana kebutuhan anggaran, pengusulan ke dinas terkait, penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan panen

6. Siapakah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Tim yang dibentuk dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan

7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas dan aparat pemerintah terkait terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada minimal 2 kali dalam setahun

8. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
 Jawaban:
Ada, pengetahuan tentang bercocok tanam sayuran yang masih minim dan perlu pendamping dari penyuluh

9. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan penyuluh P2KP dalam menangani Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)? Apakah sudah cukup memuaskan?

Jawaban:

Pendampingan dari penyuluh cukup maksimal, dan perlu ditingkatkan lagi

10. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Pelatihan pengembangan SDM bagi kelompok belum pernah ada dari program

11. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

Ya melalui penyuluh lapangan yang ada, brosur, leaflet dan buletin

12. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi berupa :polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer dirasakan sangat membantu untuk pengembangan kebun bibit

13. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

Setelah ada program ini kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran, lombak dll tidak perlu lagi untuk membeli ke pasar cukup memetik di lahan pekarangan

14. Apa harapan anda selaku penerima manfaat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Program ini perlu dilanjutkan, karena sangat menyentuh masyarakat rumah tangga

Nama Responden : Sumiati
 Jabatan/Posisi : Ketua kelompok Wanita Tani PKK Kelurahan Kampung VI
 Alamat : Jl.Gunung Tembak Kelurahan Kampung VI, Tarakan Timur
 Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2015
 Jam : 12.20 Wita
 Kode : D.WWCR-14, 03 Oktober 2015

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa pendapat anda dan setujuakah anda dengan adanya program P2KP tersebut? Alasannya?

Jawaban:

P2KP adalah program pemerintah untuk penganekaragaman pangan pada kelompok wanita tani untuk pengembangan pekarangan rumah agar dapat bermanfaat bagi keluarga. Setuju sangat membantu mengurangi belanja rumah tangga

2. Menurut Anda selaku penerima manfaat apakah ada dampak positif dari pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Ada dampak positif karena keperluan dan kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran sudah dapat terpenuhi dari lahan pekarangan yang dikembangkan bahkan bila ada lebih bisa di jual ke pasar

3. Bagaimana tahapan perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Penyuluh pendamping melakukan sosialisasi, mengadakan rapat pembentukan kelompok, pembuatan rencana kebutuhan anggaran, pembuatan proposal pengajuan bantuan dan mengusulkan kepada dinas

4. Apakah ada fasilitas dibantu yang digunakan dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada, dari APBD Provinsi tahun 2015 berupa bahan dan alat pertanian untuk mendukung program KRPL, pelaksanaan APBN tahun 2013 bansos sebesar 47 juta dan tahun 2014 sebesar 3 juta untuk pengembangan kebun bibit

5. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Rapat kelompok pembentukan pengurus kelompok, pembuatan Rencana kebutuhan anggaran, pengusulan ke dinas terkait, penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan panen

6. Siapakah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Tim yang dibentuk dari Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan

7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas dan aparat pemerintah terkait terhadap Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada biasanya 2 kali dalam setahun

8. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Ada, pengetahuan tentang bercocok tanam sayuran yang masih minim dan perlu pendampingan dan

10. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

Jawaban:

Keberlangsungan dan pendanaan bantuan yang berkesinambungan sehingga program ada setiap tahun

11. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kota Tarakan?

Jawaban:

Ya melalui sosialisasi oleh pemerintah kota, penyuluh lapangan yang ada, brosur, leaflet dan buletin

12. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah cukup baik?

Jawaban:

Bantuan bahan dan alat pertanian dari APBD Provinsi tahun 2015 berupa :polibag, guntung, cangkul, paranet, benih sayuran, gunting, sprayer dirasakan sangat membantu untuk pengembangan kebun bibit

13. Apakah dampak positif dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Tarakan?

Jawaban:

Setelah ada program ini kebutuhan rumah tangga terutama sayur-sayuran, lombak dll tidak perlu lagi untuk membeli ke pasar cukup memetik di kebun pekarangan

14. Apa harapan anda selaku penerima manfaat dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut?

Jawaban:

Program ini perlu dilanjutkan dan sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota kelompok terutama membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga dari pemenuhan lauk-pauk keluarga



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

42617.pdf

JALAN MT. HARYONO NO. 36 , TELEPON / FAX (0541) 768230

Email : bkpp_prov.kaltim@yahoo.co.id

SAMARINDA 75124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 058/BKPP-KKP/IV/2013

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN P2KP TAHUN 2013
"OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI
KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)"

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan belum mencapai kondisi yang optimal, yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai dan sering berfluktuasi. Disamping itu, belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar penetapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dilaksanakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Sumber daya lokal;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan

Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran Nomor DIPA : 018.11.3.169000/2013 tanggal 05 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kelompok Wanita dan Sekolah yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai kelompok penerima manfaat kegiatan P2KP 2013 " Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL " di Kota Tarakan
- Kedua : Bertanggung Jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum dalam DIPA Nomor : 018.11.3.169000/2013 tanggal 05 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 April 2013



H. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Muda. IV/C
Nip. 19600710 198908 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 058/BKPP-KKP/IV/2013
 Tanggal : 23 April 2013

Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan P2KP Tahun 2013
*** Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ***

No	Nama Kelompok Wanita	Nama Sekolah	Alamat	Besarnya Dana
1	Dahlia	SDS Yaditra	Jl. Cendrawasih Block C 1 RT.7 NO. 25 Kelurahan Juata Pemai, Kecamatan Tarakan Utara , Kota Tarakan	Rp. 47.000.000,-
2	Kecubung	SDN 003 Tarakan	Jl. Mulawarman RT. 44 Kelurahan Kr. Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan	Rp. 47.000.000,-
3	Kampung Melati	SMK I Tarakan	Jl. P. Nunukan RT. 17 Kelurahan Kampung I/Skip , Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Rp. 47.000.000,-
4	PKK Kelurahan Mamburungan	SDN 007	Jl. Sie Sembakung RT. 08 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Rp. 47.000.000,-
5	Hidayatullah	SDN 027	Jl. P.Hidayatullah RT.10/20 Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Rp. 47.000.000,-
6	PKK Kelurahan Kampung VI	MTS Negeri Tarakan	Jl. Gunung Tembak Kelurahan Kampung VI , Kecamatan Tarakan Timur , Kota Tarakan	Rp. 47.000.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 23 April 2013





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Jln. MT Haryono No. 35 Telp/Fax : (0541) 768230

SAMARINDA

Kode Pos : 75124

Email : bkpp_prov.kaltim@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 047/BKPP-KKP/III/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PENDAMPING KABUPATEN KEGIATAN P2KP TAHUN 2013
 "OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP
 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)"**

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2013**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Ketahanan Pangan untuk Diversifikasi Pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional diwujudkan melalui Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan (P2KP);
 - b. Bahwa sebagai penunjang Program P2KP maka ditunjuk Penyuluh Pendamping Kabupaten Pelaksanaan Program P2KP melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dan ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5560);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Memperhatikan :

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Nomor :
DIPA.018.11.3.169000/2013 Tanggal 05 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendamping (Penyuluh Pendamping P2KP) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- Kedua :** Pendamping P2KP mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan tugas pendampingan untuk Petugas Pendamping dilapangan dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis P2KP 2013;
2. Mengikuti Pertemuan Petugas Pendamping P2KP yang diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mengkoordinir dan memberikan laporan berkala secara tertulis sesuai Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis P2KP 2013.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pendamping P2KP bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala;
- Keempat : Memberikan honorarium kepada Pendamping P2KP setiap bulan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;
- Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Penggunaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor : DIPA.018.11.3.169000/2013 Tanggal 05 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Maret 2013



ALFED ASADDIN, M.Si
NIP. 19600715 198908 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur.

Nomor : 047/BKPP-KKP/III/2013

Tanggal : 20 Maret 2013

No.	Nama	NIP	Kabupaten/Kota
1	Hermansyah, S.ST	19850512 200604 1 001	Tarakan
2	Gunawan, SP	19731221 201001 1 002	Penajam Paser Utara
3	Sulistiadi, SP	19591110 198103 1 026	Kutai Kartanegara
4	Dahrin, SP	19701008 200212 1 007	Paser
5	Agustina Rante Manik, SP	19710825 200604 2 022	Nunukan
6	Priyo Isnoto, SP	19810902 200904 1 001	Tana Tidung
7	Sabransyah Helmi, SP	19710327 200504 1 009	Kutai Barat
8	Petrus Ivung, SP	19710603 200901 1 005	Kutai Timur
9	Supoyo, SP	19580314 198603 1 010	Bulungan
10	Endah Susilowati, SP	Penyuluh PTT	Bontang
11	Ribut Budiono, S.ST	19810517 200502 1 001	Malinau
12	Zulkifli Prawira Saputra, S.Pi	19700715 199903 1 005	Balikpapan
13	Hartari, S.PKP	19621228 198803 2 066	Samarinda
14	Suwito, S.PKP	19550718 198103 1 015	Berau



DINAS PETERNAKAN DAN TANAMAN PANGAN

Jalan Jendral Sudirman No.76 Gedung Gadis II Lt.5

42617.pdf

Telp. (0551) 21291 Fax (0551) 35532

E-mail : disnaktrk@yahoo.com

TARAKAN 77111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN TANAMAN PANGAN KOTA TARAKAN NOMOR : 902/484.a/DISNAKTAN-II

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING KELURAHAN KEGIATAN P2KP TAHUN 2013 "OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)"

- Menimbang :
- bahwa Program Ketahanan Pangan diwujudkan melalui Gerakan Percepatan Penganugeragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Gerakan P2KP dilaksanakan berdasarkan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan perlu ditunjuk nama-nama pendamping kelurahan dan sekolahan bantuan sosial sekaligus sebagai pelaksana di tingkat lapangan.
 - bahwa nama – nama pendamping kelurahan dan sekolah dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1996 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembar negara tahun 1999 nomor:75, tambahan lembar negara nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

- 10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) Juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 12.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran 018-11.3. 169000/2013 Tanggl 5 Desember 2012,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini Tenaga Pendamping Kelurahan (Penyuluh Pendamping P2KP) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Pertama
- Kedua : Pendamping P2KP mempunyai tugas yaitu :
1. Membimbing kelompok dalam melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan motode Sekolah Lapangan (SL)
 2. Melakukan identifikasi potensi kelurahan/desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan,sayuran dan buah, peternakan dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan,pengolahan pangan lokal,dan usaha lainya yang terkait diversifikasi pangan)
 3. Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit.
 4. Memberikan informasi dan motivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA.
 5. Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok.
 6. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok.
 7. Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan.
 8. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana bansos.
 9. Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk kegiatan pengembangan kebun sekolah.
 - 10.Membina dan mendampingi pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun sekolah.
 - 11.Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping kota.
 - 12.Mengumpulkan data konsumsi anggota kelompok P2KP untuk penghitungan PPH dengan format yang telah disediakan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pendamping Kelurahan P2KP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan yang menangani Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala

- Keempat : Memberikan honorarium kepada Pendamping P2KP setiap bulan sebesar ^{42617.pdf} Rp. 350.000.- (Tiga lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan selama melaksanakan tugas pendampingan.
- Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA 1816.001.015 Kota Tarakan sesuai dengan dengan yang tercantum dalam DiPA Nomor 018-11.3.169000/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Tanggal : 1 Maret 2013

Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan



Ir. ELANG BUHANA, M.Si
Pembina Utama Tk. I

NIP. 19660714 199403 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq. Pusat Panganeragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Tarakan;
4. Walikota Tarakan;

Lampiran Surat Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan

Nomor : 902 /484.a/ DISNAKTAN-II

Tanggal : 01 Maret 2013

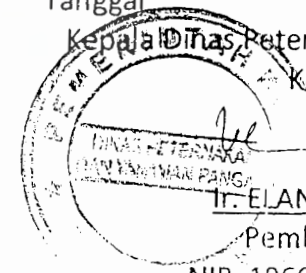
Tentang : Penetapan Pendamping Kelurahan dan sekolah Kegiatan Percepatan Penganeragaman Konsumsi Pangan P2KP dengan Optimalisasi Pemanfaatan Pebaranagan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);

No	Nama	Kelurahan	Optimalisasi Pebaranagan			Sekolah		
			Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua	Nama Sekolah	Alamat	Nama Kepala Sekolah
1	2	3	4		5	6		7
1.	Titik Mulyati, A.Md	Juata Permai	"Dahlia"	Jl. Cendrawasih Block C 1 RT. 7 No. 25 Kel. Juata Pema	Susiani Suwandi	SDS Yaditra	Jl. Cendrawasih Block C RT.5 Kel. Juata Permai	Suryani, SE
2.	Damiran	Karang Anyar	"Kecubung"	Jl. Mulawarman RT.44 Kel. Kr. Anyar	Fenny	SDN 003 Tarakan	Jl. Damai RT. 16 Kr. Anyar Pantai	Damus Udan, SE
3.	Ira Yuniarsih, SP	Kampung I/Skip	"Kampung Melati"	Jl. P. Nunukan RT. 17 Kel. Kampung I/Skip	Ratna	SMK I Tarakan	Jl. Diponegoro Kel. Pamusian	Drs. Sriyono
4.	Wijaya T. S.Hut	Mamburungan	"PKK Kelurahan Mamburungan"	Jl. Sei Sembakung RT.08 Kel. Mamburungan	Salbiah	SDN 007	Jl. Sei Sembakung RT.09 Kel. Mamburungan	Suyono, S.Pd
5.	Sudirman	Mamburungan Timur	"Hidayatullah"	Jl. P. Hidayatullah RT.10/20 Kel. Mamburungan Timur	Hapsa	SDN 027	Jl. P Hidayatullah RT.10/20 Kel. Mamburungan Timur	Iskandar, S.Pd
6.	Hari Suyanto, SP	Kampung VI	" PKK Kelurahan Kampung VI"	Jl. Gunung Tembak Kel. Kampung VI	Sumiati	MTS Negeri Tarakan	Jl. Sei Mahakam Kel.Kampung IV	Drs. Abdul Malik

Ditetapkan di : Tarakan

Tanggal : 1 Maret 2013

Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan
Kota Tarakan



Ir. ELANG BUHANA, M.Si

Pembina Utama Tk I

NIP. 19660714 199403 1 014

Demikian musyawarah ini telah dilaksanakan dengan sebenar – benarnya. Dan Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tarakan

Pada Tanggal : 20 Maret 2013

Ketua

RATNA SARI Y

Bendahara

NOVITA SANTI

Mengetahui :

Ketua RT.17 Kampung 1 SKIP

Lurah Kampung I Skip

SUHERMAN

BENNY PURWANTO, SE

NIP. 19751025 199903 1 008

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN SOSIAL
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Nomor : 029.037/BKPP-Sek/VI/13

Tanggal : 20 Juni 2013

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IR. BUDI SYAHBANDI
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur DIPA Tahun 2013 No:018.11.169000 tanggal 05 Desember 2012
 Alamat : Jalan MT. Haryono. No. 36 Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
 Nama : SUSIANI SUWANDI
 Nama Kelompok : Kelompok Wanita "DAHLIA", untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Paket Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan baik berupa :

Paket Bansos : Rp.47.000.000.- (Empat puluh tujuh juta rupiah)
 Lokasi berada di : Jl. Cendrawasih Block C RT.7 No. 25 Juata Permai
 Kelurahan : Juata Permai
 Kecamatan : Tarakan Utara
 Kota : Tarakan
 Provinsi : Kalimantan Timur

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan paket bantuan sosial untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
 Yang Menyerahkan,

IR. BUDI SYAHBANDI
 Pejabat Pembuat Komitmen



Kuitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP :

MAK :

T.A :

KUITANSI

No :

Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur DIPA Tahun 2013 No. 018.11.169000 Tanggal 05 Desember 2012
Uang sebanyak	:	Rp. 47.000.000.-
Untuk pembayaran	:	Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan P2KP Kelompok Wanita "DAHLIA" Di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No: 101/BKPP-KKP/2013 tanggal 06 Mei 2013
Terbilang Rp	:	EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH

Tarakan, 20 Juni 2013

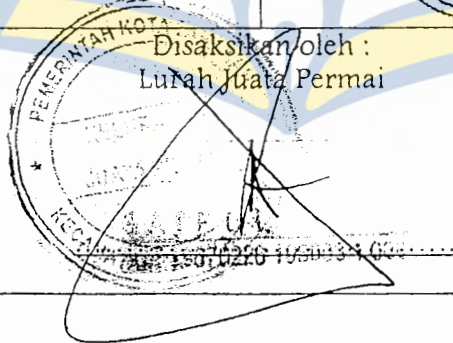
Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat KomitmenIR, BUDI SYAHBANDI
Nip. 19632212 199003 1 002METERAI
TEMPEL
EAB00ABF38170793

6000 DJP

Yang menerima,
Ketua Kelompok

DAHLIA

SUSIAN SUWANDI

Disaksikan oleh :
Lurah Juata Permai

PERYATAAN KESANGGUPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN

42617.pdf

Dalam rangka menyukseskan Kegiatan Percepatan Penganeragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi serta yang di tingkat rumah tangga dan tingkat kelurahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	: SUSIANI SUWANDI	Ketua Kelompok
	Kelompok	: "DAHLIA"	
	Alamat	: Jl. Cendrawasih Blok C 1. RT. 7 No. 25 Kel. Juata Permai Tarakan Utara	
Seiaku Pihak Pertama			
2.	Nama	TITIK MULYATI, A.Md	Pendamping Kelurahan
	Alamat	Jl. Mulawarman Gang Salak No. 114 RT. 54 Kel. Karang Anyar Tarakan Barat	
Selaku Pihak Kedua			

Pihak Pertama Berjanji akan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan keberhasilan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Kelurahan Juata Permai yang terdiri dari pengembangan kebun bibit, pengadaan sarana pendukung pasca panen dan pengolahan menu B2SA.

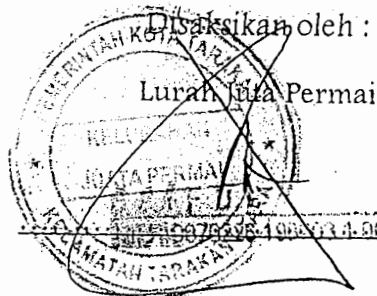
Pihak Kedua berjanji akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan yang dilakukan oleh pihak pertama sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas pangan di tingkat rumah tangga dan kelurahan Juata Permai.

Tarakan, 20 Juni 2013

Pendamping Kelurahan,



TITIK MULYATI, A.Md



REKAPITULASI RKKA

42617.pdf

Kelompok : Dahlia
Nama Ketua Kelompok : Susini Suwandi
Kelurahan : Juata Permai
Kecamatan : Tarakan Utara
Kabupaten : Tarakan
Provinsi : Kalimantan Timur

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)

Juata Permai, 1 Juli 2013

Kepada,

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Prov. Kalimantan Timur

Di-

Samarinda

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 058/BKPP – KKP/IV/2013 Tanggal 23 april 2013 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2013 dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 47.000.000; (Emat Puluh Juta Rupuah)sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampirr dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3
1	Pembuatan Kebun Bibit	
	Balok 5 x 10 8 batang @ Rp. 60.000	Rp. 480.000
	Balok 5 x 5 25 batang @ Rp. 40.000	Rp. 1.000.000
	Semen 1 zak	Rp. 80.000
	Pasir 3 Zak @ Rp. 15.000	Rp. 45.000
	Plywood 3 Lembar @ Rp. 72.000	Rp. 216.000
	Paku Ulin 2 Kg @ Rp. 25.000	Rp. 50.000
	Paku 3 Inci 2 Kg @ Rp. 20.000	Rp. 40.000
	Palu 1 buah	Rp. 50.000
	Tali Nylon 1 rol	Rp. 50.000
	Plastik UV 1 rol	Rp. 250.000
	Sarlon Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka	Rp. 450.000

Paranet 1 rol	Rp. 1.300.000
Profil Tank 650 Liter 1 paket	Rp. 750.000
Pipa Air 6 Dim 1 buah	Rp. 275.000
Talang Air 1 buah	Rp. 80.000
Tray 3 buah @ Rp. 30.000	Rp. 90.000
Papan Nama "Kebun Bibit" 1 buah	Rp. 300.000
Tanah 642 Kg @ Rp. 2000	Rp. 1.284.000
Pupuk Kandang 600 Kg @ Rp.2.500	Rp. 1.500.000
Kapur Dolomit 2 Zak @ Rp.65.000	Rp. 130.000
Polybag ukuran kecil 10 Kg @ Rp. 35.000	Rp. 350.000
Cangkul 1 buah	Rp. 50.000
Cetok 1 buah	Rp. 25.000
Sekop 1 buah	Rp. 55.000
Alat semprot 1 buah	Rp. 50.000
Gembor plastic 1 buah	Rp. 60.000
Gerobak dorong 1 buah	Rp. 500.000
Benih Sayuran 1 Paket	Rp. 2.400.000
Pestisida dan Pupuk Organik Cair 1 Paket	Rp. 300.000
J U M L A H	Rp. 12.000.000
2 Pemanfaatan Pekarangan Anggota Kelompok	
Polybag 10 Kg @ Rp. 35.000	Rp. Rp. 350.000
Tanah 1468 Kg @ Rp. 2.000	Rp. 2.936.000
Pupuk Kandang 590 Kg @ Rp. 2.500	Rp. 1.475.000
Pupuk Kompos 600 Kg @ Rp. 2.500	Rp. 1.500.000
Pupuk NPK Phonska 150 Kg @ Rp. 9.900	Rp. 1.485.000
Pupuk Organik Cair 30 Liter @ Rp.100.000	Rp. 3.000.000
Kapur Pertanian/Dolomit 3 Zak @ Rp. 65.000	Rp. 195.000
Pestisida 1 Paket	Rp. 500.000
Alat semprot 6 buah @ Rp. 60.000	Rp. 360.000
Cetok 12 buah @ Rp. 26.000	Rp. 312.000
Kayu 5 x 5 90 buah @ Rp. 40.000	Rp. 3.600.000
Bambu 60 buah @ Rp. 20.000	Rp. 1.200.000
Paku 2 Inci 5 Kg @ Rp. 20.000	Rp. 100.000
Paku 3 Inci 3 Kg @ Rp. 20.000	Rp. 60.000
Talang Air 30 buah @ Rp. 80.000	Rp. 2.400.000
Bibit Lele 1200 ekor @ Rp. 500	Rp. 600.000
Pakan Bibit Lele 2 Zak @ Rp. 150.000	Rp. 300.000

	Pakan Lele Dewasa 3 Zak @ Rp. 200.000	Rp. 600.000
	Terpal 3 x 4 m 3 buah @ Rp. 70.000	Rp. 210.000
	Pipa Air 6 Dim 1 buah	Rp. 275.000
	Pipa Air ½ Inchi 1 buah	Rp. 17.000
	Bebek 10 ekor @ Rp. 80.000	Rp. 800.000
	Bibit tanaman buah 60 batang @ Rp. 50.000	Rp. 3.000.000
	Pot Semen Besar 30 buah @ Rp.65.000	Rp. 3.900.000
	Ember Plastik 6 buah @ Rp. 25.000	Rp. 150.000
	J U M L A H	Rp. 30.000.000
3	Kebun Sekolah	
	Pupuk Kandang 154 Kg @ Rp. @Rp. 2.500	Rp. 385.000
	Kapur Pertanian 1 Zak @ Rp. 65.000	Rp. 65.000
	Pupuk NPK Phonska 50 Kg @ Rp. 9.900	Rp. 495.000
	Pupuk Organik cair 2 Liter @ Rp. 100.000	Rp. 200.000
	Pestisida 1 paket	Rp. 144.000
	Parang 2 buah @ Rp. 45.000	Rp. 90.000
	Paku 3 Inchi 2 Kg @ Rp. 20.000	Rp. 40.000
	Palu 1 buah	Rp. 45.000
	Tali Nylon 1 buah	Rp. 25.000
	Kayu ukuran 5 x 5 10 buah @ Rp. 40.000	Rp. 400.000
	Sekop 1 buah	Rp. 80.000
	Cetok 1 buah	Rp. 26.000
	Cangkul 1 buah	Rp. 60.000
	Alat semprot 1 buah	Rp. 50.000
	Gembor plastic	Rp. 60.000
	Ember plastic 1 buah	Rp. 25.000
	Mulsa 1 rol	Rp. 520.000
	Talang air 1 buah	Rp. 80.000
	Polybag 2 Kg @ Rp. 35.000	Rp. 70.000
	Jala 20 meter @ Rp. 7000	Rp. 140.000
	J U M L A H	Rp. 3.000.000
3	Pengembangan Menu B2SA	
	Bahan dan Alat Pendukung 1 paket	Rp. 2.000.000
	J U M L A H	Rp. 2.000.000
	J U M L A H T O T A L 1 + 2 + 3	Rp. 47.000.000

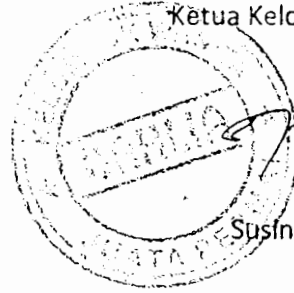
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 101/BKPP-KKP/2013 Tanggal : 06 Mei 2013,
Dana Bantuan Sosial Kelompok tersebut agar di pindahkan/bukukan Ke Rekening Kelompok Dahlia No
Rekening : 148-00-1180771-9 pada Bank Mandiri KCP Tarakan Simpang Tiga.

Mengetahui,

Pendamping P2KP Kel. Juata Permai

Titik Mulyati, A.Md

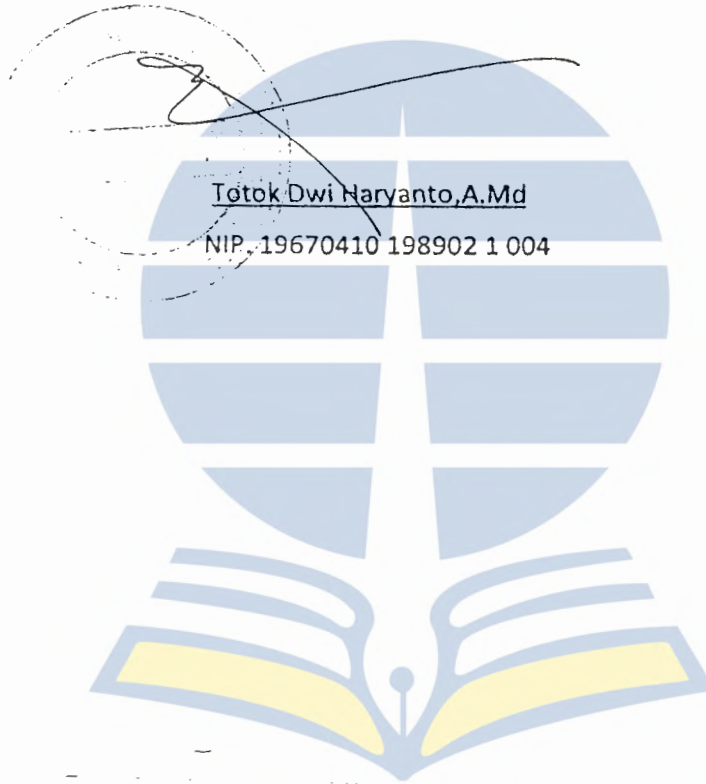
Ketua Kelompok Dahlia



Susni Suwandi

Menyetujui,

Pejabat Pembuat Komitmen Kota tarakan



Totok Dwi Haryanto, A.Md

NIP. 19670410 198902 1 004

Selanjutnya Kegiatan Tersebut akan dilaksanakan oleh anggota kelompok dan sekolah yang t^g 2017.pdf

dari :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Susini Suwandi	Ketua	Rt. 7 Juata Permai
2	Wiwin Dwi Puspitosari	Sekretaris	Rt. 7 Juata Permai
3	Sudarwati	Bendahara	Rt. 7 Juata Permai
4	Heni Purwandari	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
5	Zulfatria	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
6	Suyatmi	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
7	Martha.U	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
8	Yayuk Rahayuni	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
9	Suprapti	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
10	Nanik Prasmiati	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
11	Paulina Bombing	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
12	Ngadinem	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
13	Margareta Rompa	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
14	Hj. Hajezia	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
15	Risna Eka Wati	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
16	Sumpeni	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
17	Sumarni	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
18	Olfawati. P	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
19	Arbayah	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
20	Sari	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
21	Muntiah	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
22	Irva Musrifa	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
23	Damaris	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
24	Aya Uluy	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
25	Lusdiana	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
26	Lilies Suryani	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
27	Yuniayati	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
28	Samiasih Tyas Rahayu	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
29	Nur Cahyani	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
30	Mastuni	Anggota	Rt. 7 Juata Permai
31	SDS Yaditra	Sekolah	Rt. 7 Juata Permai

PERKEMBANGAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KOTA TARAKAN TAHUN 2014

42617.pdf

No	Jenis Tanaman	Tarakan Timur				Tarakan Tengah				Tarakan Barat				Tarakan Utara				Jumlah di Kota Tarakan				Harga Pasar Per-Kg	Pendapatan Rp	Keterangan		
		LT (Ha)	LP (Ha)	Prod. Rata2 (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	LT (Ha)	LP (Ha)	Prod. Rata2 (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	LT (Ha)	LP (Ha)	Prod. Rata2 (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	LT (Ha)	LP (Ha)	Prod. Rata2 (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	LT (Ha)	LP (Ha)	Prod. Rata2 (Kw/Ha)	Produksi (Ton)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
A	PADI (Beras)	71	71	52,3	371,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	52,3	371,3	-	-	-	2.322.000.000,00	Gabahan Kering
1	(untuk benih 0,5%)				(-) 1,87																(-) 1,87					
	Beras				232,2																232	10.000,00		2.322.000.000,00	Beras	
B	PALAWLJA	107	97	228,2	2.214	92	92	246,2	2.265	130	116	253,6	2.942	153	142	255,1	3.622	482	447	247,1	11.043,5	4.500,00	49.565.792.500,00			
1	Jagung	69	66	172,0	1.135,2	53	52	176,0	915,2	59	59	180,0	1.062,0	74	74	188,4	1.394,0	255	251	179,5	4.506,4	5.000,00	27.038.400.000,00	Jagung Muda		
2	Ubi Kayu	38	31	348,0	1.078,8	39	40	337,5	1.350,0	60	48	373,5	1.792,8	63	56	379,3	2.123,9	200	175	362,6	6.345,5	3.335,00	23.162.242.500,00	Umbi Basah		
3	Ubi Jalar	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	97,0	87,3	16	12	86,9	104,3	27	21	91,2	191,6	7.125,00	1.365.150.000,00	Umbi Basah		
4	Kedele																									
5	Kacang Tanah																									
6	Kacang Hijau																									
C	SAYUR-SAYURAN	496	406	106,4	4.318,1	258	232	118,5	2.749,4	542	393	107,4	4.219,9	610	531	133,2	7.073,8	1.906	1.562	117,5	18.361,2	10.000,00	184.611.769.800,00			
1	Bawang Daun	25	23	29,6	68,1	8	6	32,7	19,6	12	12	32,6	39,1	16	17	37,2	63,2	61	58	32,8	190,0	38.500,00	7.315.000.000,00	Sayur Sejar		
2	Sawi	60	61	111,0	677,1	21	20	105,3	210,6	39	40	104,2	416,8	43	42	101,9	427,8	163	163	106,3	1.732,3	6.500,00	11.259.950.000,00	Sayur Sejar		
3	Kacang Panjang	45	45	104,1	468,4	40	42	111,6	468,7	35	32	114,3	365,8	54	56	121,4	679,6	174	175	113,3	1.982,5	12.100,00	24.087.812.500,00	Sayur Sejar		
4	Lombok Besar	19	21	38,9	81,7	19	19	51,7	98,2	22	24	45,7	109,7	29	25	90,6	226,4	89	89	58,0	516,9	32.450,00	16.847.400.000,00	Sayur Sejar		
5	Lombok Kecil	25	22	48,7	107,1	21	21	43,4	91,2	23	23	47,5	109,2	31	25	85,0	212,5	100	91	57,1	320,0	43.750,00	12.750.000.000,00	Sayur Sejar		
6	Tomat	21	20	208,3	416,6	24	23	219,9	505,8	20	21	227,6	478,0	27	28	221,3	619,6	92	92	219,6	2.120,0	12.625,00	23.500.500.000,00	Sayur Sejar		
7	Terong	4	5	107,4	53,7	6	6	157,7	94,6	18	19	140,1	266,2	39	35	281,5	985,3	67	65	215,4	1.599,8	7.750,00	12.340.000.000,00	Sayur Sejar		
8	Buncis	22	24	88,4	212,2	18	19	91,8	174,5	21	21	93,0	195,2	32	34	91,0	309,3	93	98	90,9	391,2	4.900,00	1.700.250.000,00	Sayur Sejar		
9	Ketimun	45	43	197,6	849,5	27	26	189,4	492,5	25	25	180,2	450,5	29	34	184,9	628,5	126	128	189,1	2.421,0	4.850,00	12.847.350.000,00	Sayur Sejar		
10	Terong	-	-	-	-	-	-	-	-	21	19	182,1	346,0	52	52	201,8	1.049,5	73	71	196,5	1.395,5	4.850,00	6.670.500.000,00	Sayur Sejar		
11	Beras	15	15	153,1	229,6	13	14	191,0	267,4	18	19	166,0	315,4	35	36	173,9	626,2	81	84	171,3	1.438,5	4.625,00	6.660.375.000,00	Sayur Sejar		
12	Kangkung	57	57	118,0	672,6	12	12	111,9	134,3	44	44	115,0	506,0	54	52	117,9	613,1	167	165	116,7	1.326,0	4.550,00	1.395.450.000,00	Sayur Sejar		
13	Bawang	53	52	58,6	304,7	12	12	60,0	72,0	38	37	60,0	222,0	48	46	60,1	276,3	151	147	59,5	873,6	4.540,00	1.700.250.000,00	Sayur Sejar		
14	Lada Kurma Labu air	3	3	286,0	85,8	2	2	290,0	58,0	3	3	300,0	90,0	4	4	295,0	118,0	12	12	293,2	351,8	3.200,00	1.250.500.000,00	Sayur Sejar		
15	Nenas Muda	102	15	60,7	91,0	35	10	62,0	62,0	203	54	57,4	310,0	117	45	53,0	238,5	457	124	56,6	701,5	3.200,00	2.250.400.000,00	Sayur Sejar		
	Jumlah	(21.185)	(3.118)			(7.293)	(2.165)			(42.300)	(11.307)			(24.295)	(9.303)			(95.073)	(25.893)							
D	BUAH-BUAHAN	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (kg)	Produksi (Ton)	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (kg)	Produksi (Ton)	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (kg)	Produksi (Ton)	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (kg)	Produksi (Ton)	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (pohon)/rumpun	Satuan (kg)	Produksi (Ton)					
1	Selak	903.241	76.095	44,7	3.404,2	105.567	25.776	36,7	946,3	530.258	150.605	52,5	7.901,1	258.648	111.173	45,9	5.103,8	1.797.714	363.649	47,7	17.355,4	7.500,00	131.527.500.000,00	Buah Sejar		
2	Pisang	557.618	26.665	13,8	368,0	10.630	2.670	12,7	33,9	1.460	537	11,5	6,2	800	-	-	570.508	29.872	13,7	46,1	500,00	1.600.000.000,00	Buah Sejar			
3	Pisang	3.660	3.575	48,6	173,7	1.406	1.321	49,0	64,7	112.940	110.530	53,9	5.957,5	43.575	38.375	55,3	2.123,1	161.581	153.801	54,1	8.319,0	7.000,00	58.230.000.000,00	Buah Sejar		
4	Pisang	227.175	2.232	35,6	79,4	45.980	1.112	36,0	40,0	183.727	2.939	30,0	88,2	76.320	2.883	40,5	116,9	533.202	9.166	35,4	324,5	5.750,00	843.875.000,00	Buah Sejar		
5	Pisang	9.953	1.866	42,0	78,4	795	533	48,6	25,9	13.403	4.820	64,8	312,3	25.385	7.198	77,5	558,0	49.536	14.417	67,6	974,5	4.250,00	4.140.250.000,00	Buah Sejar		
6	Durian/Elai	5.025	1.578	76,8	121,2	240	172	63,4	10,9	932	695	68,2	47,4	5.565	1.981	68,3	135,3	11.762	4.426	71,1	314,8	8.500,00	1.566.400.000,00	Buah Sejar		
7	Mangga/Kuwani	29.620	23.870	77,9	1.859,4	5.400	4.157	78,8	327,6	2.265	1.530	74,5	114,0	15.595	12.100	80,0	968,0	52.880	41.657	78,5	3.269,0	8.000,00	25.152.000.000,00	Buah Sejar		
8	Nangka	21.185	3.118	43,0	134,1	7.293	2.165	42,6	92,2	42.300	11.307	40,4	456,8	24.295	9.303	39,6	368,4	95.073	25.893	40,6	1.051,5	5.000,00	5.257.500.000,00	Buah Sejar		
9	Rambutan	3.510	1.978	68,3	135,1	8.305	2.826	69,6	196,7	11.400	10.524	70,3	740,0	8.750	7.153	62,0	443,5	31.965	22.481	67,4	1.515,3	8.500,00	12.880.050.000,00	Buah Sejar		
10	Jambu Air	2.595	1.575	27,5	43,3	426	203	31,0	6,3	727	427	30,4	13,0	780	517	45,3	23,4	4.528	2.722	31,6	86,0	15.000,00	1.290.000.000,00	Buah Sejar		
11	Jambu Biji	670	308	26,6	8,2	185	98	27,6	2,7	560	473	34,2	16,2	755	692	25,1	17,4	2.170	1.571	28,3	44,5	12.000,00	534.000.000,00	Buah Sejar		
12	Nenas	31.073	2.903	28,8	81	14.730	1.073	3,0	3,2	156.020	3.972	3,1	12,5	28.105	3.856	3,0	11,6	229.928	11.804	3,0	35,4	10.000,00	354.000.000,00	Buah Sejar		
13	Sukun	5.280	2.237	49,9	111,7	52	17	41,2	0,7	1.110	695	48,1	33,4	1.400	817	45,0	36,8	7.842	3.766	48,5	182,6	10.000,00	1.826.000.000,00	Buah Sejar		
14	Sursak	315	72	25,0	1,8	590	166	27,1	4,5	1.460	617	26,7	16,5	986	563	28,1	15,8	3.351	1.418	27,2	38,6	12.000,00	463.200.000,00	Buah Sejar		
15	Senangka	-	-	-	-	8.000	8.000	6,3	50,2	-	-	-	-	24.000	24.000	7,7	184,8	32.000	32.000	7,3	235,0	4.000,00	960.000.000,00	Buah Sejar		
16	Petai	492	378	33,1	12,5	60	43	27,9	1,2	664	492	31,3	15,4	452	375	29,9	11,2	1.668	1.288	31,3	40,3	22.500,00	906.750.000,00	Buah Sejar		
17	Terap	5.070	3.740	72,0	269,3	1.475	1.220	70,2	85,6	1.290	1.047	68,5	71,7	1.885	1.360	65,9	89,6	9.720	7.367	70,1	516,2	5.000,00	2.581.000.000,00	Buah Sejar		

Keterangan

LT : Luas Tanam (Untuk I,II,III)/Luas Tanaman (IV&V) (Ha)
LP : Luas Panen (Ha)
Harga : Harga Tingkat Produksi
Pendapatan : Pendapatan Usaha Tani (Out Put)

Tarakan, Januari 2015

Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan
Kota Tarakan

DATA KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN LOKAL DAN CAPAIAN KONSUMSI PENDUDUK KOTA TARAKAN
TAHUN 2014

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton) ketersediaan	Dijual keluar daerah (%)	Rusak/tidak laku di pasar (%)	Jumlah bahan pangan yang dihitung (ton)	jumlah edible portion B.d.d (%)	Jumlah Bersih yang dikonsumsi (ton)	Jumlah Penduduk 2014 (jiwa)	Jumlah Konsumsi rata-rata/kapita/		Ket	
									Tahun (kg)	Hari (g)	Standar anjuran	(referensi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PADI (Beras)	371,3	-	-	-	100	(233,4)		113	309		
1	Gabah	371,3	-	-	-	-	-					
2	Beras	233,4	-	-	-	100	233,4		113	309		
II	PALAWUA	11.043,5	-	-	11.043,5	62,9	6.947,2		29,98	82,1	32 Kg/Kap/Th	Kementerian Pertanian 2014
1	Jagung	4.506,4	-	-	4.506,4	28	1.261,8		5,44	14,9		
2	Ubi Kayu	6.345,5	-	-	6.345,5	87	5.520,6		23,82	65,3		
3	Ubi Jalar	191,6	-	-	191,6	86	164,8		0,71	1,9		
4	Kedelai	-	-	-	-	-	-		-	-		
5	Kacang Tanah	-	-	-	-	-	-		-	-		
6	Kacang Hijau	-	-	-	-	-	-		-	-		
III	SAYUR-SAYURAN	18.361,2	7,4	2,1	16.488,0	80,5	13.264,8		57,2	156,8	58 Kg/Kap/Th	Kementerian Pertanian 2014
1	Bawang Daun	190,0	5	0,5	179,6	87	156,2		0,67	1,8		
2	Sawi	1.732,3	8	5	1.507,1	87	1.311,2		5,66	15,5		
3	Kacang Panjang	1.982,5	12	2	1.705,0	75	1.278,7		5,52	15,1		
4	Lombok Besar	516,0	5	1	485,0	85	412,3		1,78	4,9		
5	Lombok Kecil	520,0	5	1,5	486,2	85	413,3		1,78	4,9		
6	Tomat	2.020,0	10	3	1.757,4	95	1.669,5		7,20	19,7		
7	Terong	1.399,8	10	2	1.231,8	87	1.071,7		4,62	12,7		
8	Buncis	891,2	8	1	811,0	90	729,9		3,15	8,6		
9	Kelapa	2.421,0	8	3	2.154,7	70	1.508,3		6,51	17,8		
10	Pare	1.395,5	10	1	1.242,0	77	956,3		4,13	11,3		
11	Gambas	1.438,6	5	1	1.352,3	85	1.149,4		4,96	13,6		
12	Kangkung	1.926,0	5	5	1.733,4	70	1.213,4		5,24	14,3		
13	Bayam	875,0	5	3	805,0	71	571,6		2,47	6,8		
14	Lada kuning/lada air	351,8	-	0,5	350,0	78	273,0		1,18	3,2		
15	Kembang Muka	701,5	-	2	687,5	80	550,0	231741	2,37	6,5		
IV	BUAH-BUAHAN	Produksi (Ton)	Dijual keluar daerah (%)	Rusak/tidak laku di pasar (%)	jumlah bahan pangan yang dihitung (ton)	jumlah edible portion b.d.d (%)	Jumlah Bersih yang dikonsumsi (ton)					
		17.355,4	4,0	1,4	16.811,0	63,7	10.703,8		46,2	126,5	70 Kg/Kap/Th	Saran FAO untuk Indonesia tahun 2003
1	Sabak	408,1	5	2	379,5	50	189,8		0,82	2,2		
2	Pecahan	8.319,0	3	2	7.903,1	75	5.927,3		25,58	70,1		
3	Pecang	324,5	-	0,5	322,9	75	242,2		1,04	2,9		
4	Jeruk	974,6	-	2	960,0	72	691,2		2,98	8,2		
5	Durian/Elai	314,8	-	-	314,8	22	69,3		0,30	0,8		
6	Mangga/Kuwani	3.269,0	-	2,0	3.203,6	65	2.082,4		8,99	24,6		
7	Nangka	1.051,5	-	-	1.051,5	28	294,4		1,27	3,5		
8	Rambutan	1.515,3	-	0,5	1.507,7	40	603,1		2,60	7,1		
9	Jambu Air	86,0	-	0,5	85,6	90	77,0		0,33	0,9		
10	Jambu Biji	44,5	-	-	44,5	82	36,5		0,16	0,4		
11	Nenas	35,4	-	-	35,4	53	18,8		0,08	0,2		
12	Sukun	182,6	-	-	182,6	80	146,1		0,63	1,7		
13	Sirsak	38,6	-	-	38,6	68	26,2		0,11	0,3		
14	Semangka	235,0	-	-	235,0	46	108,1		0,47	1,3		
15	Petai	40,3	-	-	40,3	36	14,5		0,06	0,2		
16	Terap	516,2	-	2	505,9	35	177,1		0,76	2,1		

Keterangan :

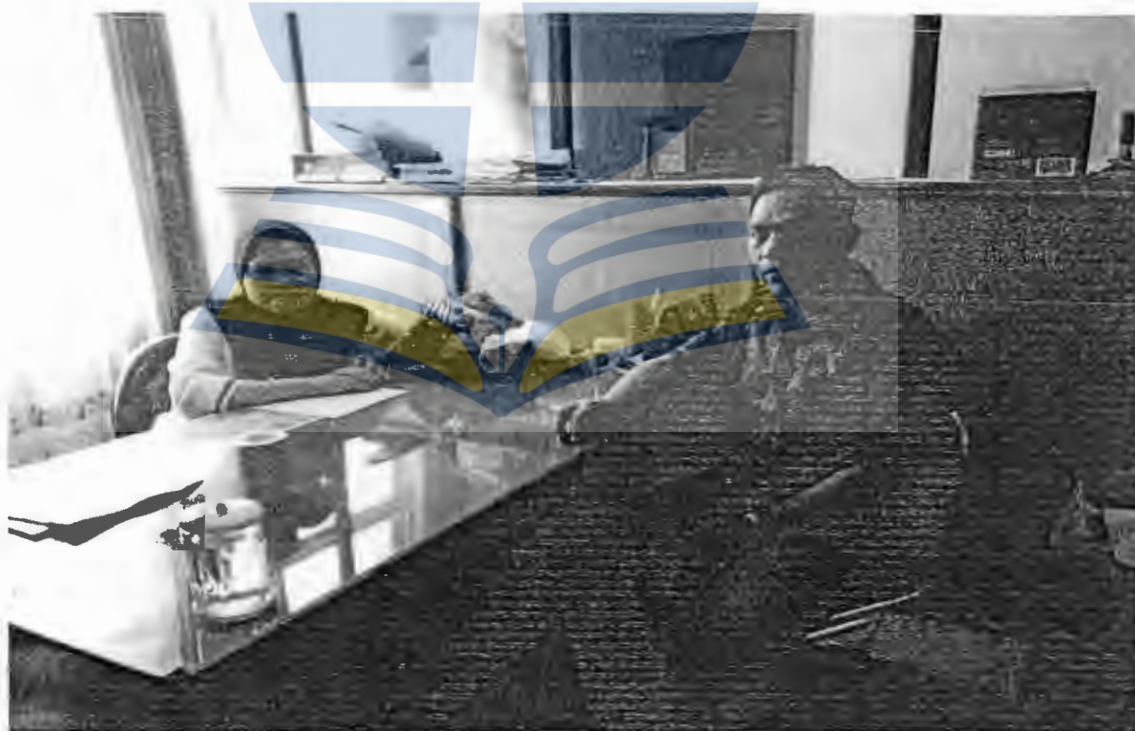
Sumber data yang diolah :

1. Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2014
2. Data Jumlah Penduduk terhadap data ini adalah data akhir jumlah penduduk per Desember tahun 2014 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2014 (sebagai pembagi)
3. Kolom (4-5) adalah dari hasil survey ke lapangan dan pasar
4. kolom (7) adalah B.d.d = standar perhitungan kadar gizi komposisi bahan makanan direktorat gizi depkes RI
5. kolom (8) adalah jumlah bersih bahan pangan yang dikonsumsi

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan (Ibu Tatik) Kota Tarakan



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Seksi P2KP (Ibu Shinta) dan Penanggung Jawab Kegiatan P2KP (Bapak Toto)



Gambar 4. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dahlia (Ibu Susini) dan Pendamping P2KP (Ibu Titik Mulyati) di Kelurahan Juata Permai Tarakan Utara



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua Kelompok Mamburungan (Ibu Salbiah) Tarakan Timur



Gambar 6. Wawancara dengan Ketua kelompok Kampung VI (Ibu Sumiati) di Kelurahan Kampung VI Tarakan Timur



Gambar 7. Wawancara dengan Ketua Kelompok Kecubung (Ibu Fenny) di Kelurahan Karano Anvar Tarakan Barat



Gambar 8. Wawancara dengan Ketua Kelompok Hidayatullah (Ibu Hapsa) di Kelurahan Mamburungan Timur Tarakan Timur



Gambar 9. Wawancara dengan Ketua kelompok Kampung Melati (Ibu Ratna) di Kelurahan Kampung I Tarakan Tengah



Gambar 10. Wawancara dengan Pendamping P2KP Kelompok Kampung Melati (Ibu Ira) di Kelurahan Kampung I Tarakan Tengah



Gambar 11. Tanaman Pekarangan Kelompok Dahlia di Kelurahan Juata Permai Tarakan Utara



Gambar 12. Tanaman Pekarangan Kelompok Mamburungan di Kelurahan Mamburungan Tarakan Timur



Gambar 13. Tanaman Pekarangan Kelompok Kampung Melati di Kelurahan Kampung I Tarakan Tengah



Gambar 14. Kebun Bibit Kelompok Dahlia di Kelurahan Juata Permai Tarakan Utara